

SKRIPSI

ANALISIS TUGAS CAMAT SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN DALAM MELAKSANAKAN PEMBINAAN DAN MENYELENGGARAKAN PEMERINTAH DESA KECAMATAN KUBU KABUPATEN ROKAN HILIR

Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Oleh :

UMI NASIROH

10875004151

**PROGRAM S1
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
PEKANBARU
1433 H/2012 M**

SKRIPSI

ANALISIS TUGAS CAMAT SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN DALAM MELAKSANAKAN PEMBINAAN DAN MENYELENGGARAKAN PEMERINTAH DESA KECAMATAN KUBU KABUPATEN ROKAN HILIR



Oleh :

UMI NASIROH

10875004151

**PROGRAM S1
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
PEKANBARU
1433 H/2012 M**

ABSTRAK
ANALISIS TUGAS CAMAT SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN
DALAM MELAKSANAKAN PEMBINAAN DAN
MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN
KUBU KABUPATEN ROKAN HILIR

Oleh:

UMI NASIROH
NIM. 10875004151

Penelitian ini dilakukan pada pemerintah di tiga desa yang ada di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir. Adapun permasalahannya yang diangkat dalam penelitian ini yaitu dikarenakan adanya indikasi bahwa pembinaan yang dilakukan camat pada pemerintah desa belum terlaksana seperti yang diharapkan, seperti buku tentang administrasi kependudukan, administrasi umum dan administrasi keuangan, kemudian yang seharusnya buku-buku anggaran desa buku kas umum, buku kas pembantu yang seharusnya dilaporkan ke camat setiap pertiga bulannya juga belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kemudian kegiatan yang dilakukan camat dalam tahunan ataupun bulanan tentang pembinaan pemerintah desa juga belum ada, dan tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tugas camat sebagai kepala pemerintah dalam melaksanakan pembinaan dan menyelenggarakan pemerintah desa Kecamatan Kubu. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi, kuesioner, wawancara. Responden dalam penelitian ini berjumlah 18 orang yang terdiri dari camat, sekretaris camat, kasi pemerintahan, kepala desa, kaur pembangunan, kaur pemerintahan, kaur perekonomian. Kemudian teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis data yang telah terkumpul, ditabulasikan menurut jenis data, dan memberikan keterangan dengan mengaitkan dengan teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada dan memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan yang kemudian diambil kesimpulan dan saran. Dalam penelitian ini, tugas camat sebagai kepala pemerintahan dalam melaksanakan pembinaan dan menyelenggarakan pemerintah desa Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir dilihat melalui PP No.19 Tahun 2008 Pasal 21 tentang Kecamatan, Pemerintah Menugaskan Camat sebagai kepala pemerintahan untuk melakukan pembinaan dalam menyelenggarakan pemerintah desa, pengawasan tertib administrasi desa, bimbingan supervisi, pengawasan terhadap kepala desa atau kelurahan, melaporkan pelaksanaan. Dari hasil pengukuran terhadap masing-masing indikator tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa analisis tugas camat sebagai kepala pemerintahan dalam melaksanakan pembinaan dan menyelenggarakan pemerintah desa Kecamatan Kubu dikategorikan Cukup Baik.

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PERSEMBAHAN

ABSTRAK

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi

BABI PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Sistematika Penulisan	9

BAB II TELAAH PUSTAKA

2.1. Otonomi daerah	11
2.2. Kecamatan	14
2.3. Pengertian Pelaksanaan tugas	20
2.4. Pengertian Pemerintah	22
2.5. Pemerintah Daerah.....	24
2.6. Otonomi Desa	26
2.7. Pemerintah Desa	27
2.7.1 Administrasi Desa.....	30
2.8. Kerangka Pikiran	31
2.9. Defenisi Konsep.....	33
2.10. Defenisi Operasional.....	34
2.11. Hipotesis.....	35
2.12. Indikator Variabel.....	35
2.13. Teknik Pengukuran	39

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian	45
3.2. Lokasi Penelitian	45
3.3. Populasi dan Sampel.....	46
3.4. Teknik Penarikan Sampel	46
3.5. Jenis dan Sumber Data.....	47
3.6. Teknik Pengumpulan Data	48
3.7. Teknik Analisa Data	48

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Keadaan Geografis.....	49
4.2. Keadaan Demografi	50
4.3. Struktur Organisasi	52
4.4. Profil Desa Sampel	53
4.5. Keadaan Umum Kecamatan Kubu	54
4.6. Struktur Pemerintahan Desa	55
4.7. Mata Pencaharian Penduduk.....	56
4.8. Struktur Organisasi Pemerintah	57
4.9. Struktur Pemerintahan Desa	66
4.10. Sosial Budaya	73

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Identitas Responden.....	75
5.2. Analisis Tugas Camat Sebagai Kepala Pemerintahan Dalam Melaksanakan Pembinaan dan Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Kecamatan Kubu	78
5.3. Rekapitulasi Jawaban Responden Dalam Setiap Indikator	107

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan	115
6.2 Saran	116

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Jenis Kelamin dan Kategori Desa Kecamatan Kubu	6
Tabel II.1	Operasional Indikator Variabel	37
Tabel II.2	Skala Pengukuran	39
Tabel III.1	Jumlah Populasi Dan Sampel Penelitian	46
Tabel IV.1	Jumlah Penduduk Kecamatan Kubu Berdasarkan Tingkat Pendidikan	51
Tabel IV. 2	Jumlah Masyarakat Desa Kecamatan Kubu Berdasarkan Agama yang Mereka Anut	52
Tabel IV.3	Jumlah Sarana Peribadatan di Desa Kecamatan Kubu	53
Tabel IV. 4	Jenis sarana Pendidikan di Desa Kecamatan Kubu	53
Tabel IV. 5	Sarana Kesehatan Di Kecamatan Kubu Tahun 2010.....	54
Tabel IV. 6	Distribusi Penduduk Menurut Mata Pencaharian Responden di Kecamatan Kubu Tahun 2010	55
Tabel IV.7	Tabel Mata Pencaharian Penduduk 3 Desa Kec.Kubu	56
Tabel V.1	Jenis Kelamin Responden.....	75
Tabel V.2	Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Umur	76
Tabel V.3	Jumlah Responden Berdsarkan Tingkat Pendidikan	77
Tabel V.4	Jumlah Responden Berdasarkan Masa Kerja	76
Tabel V.5	Jawaban Responden Mengenai Pelatihan Tentang Tertib Administrasi Desa	80
Table V.6	Jawaban Responden Mengenai Prosedur Kerja Tentang Administrasi Desa	83
Tabel V.7	Jawaban Responden Mengenai Camat Memberikan Pembinaan Dan Pengawasan Tentang Metode/Cara Kerja Administrasi	84
Tabel V.8	Jawaban Rsponden Mengenai Camat Memberikan Pembinaan Dan Pengawasan Tentang Administrasi Desa Terhadap Perangkat Desa	85

Tabel V.9	Jawaban Responden Mengenai Camat Memberikan Bimbingan Agar Bekerja Dengan Baik Dan Memberitahu Akibat Kesalahan Dalam Pekerjaan Administrasi Desa.....	87
Tabel V.10	Jawaban Responden Mengenai Pengarahan Langsung Yang Bersifat Motivasi Agar Dapat Bekerja Dengan Baik Dan Benar	89
Tabel V.11	Jawaban Responden Mengenai Fasilitas Yang Memadai Untuk Pelaksanaan Pemerintah Desa	90
Tabel V.12	Jawaban Responden Mengenai Memberikan Peluang Untuk Berkonsultasi Tentang Pelaksanaan Administrasi Desa.....	91
Tabel V.13	Jawaban Responden Mengenai Pembinaan Tentang Cara Pengambilan Keputusan Yang Baik Dan Benar.....	93
Tabel V.14	Jawaban Responden Mengenai Tentang Cara Pembuatan Perdes	94
Tabel V.15	Jawaban Responden Mengenai Tentang Mengkoreksi Kesalahan-Kesalahan Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Pekerjaan	95
Tabel V.16	Jawaban Responden Mengenai Tentang Memperbaiki Kesalahan-Kesalahan Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Pekerjaan	96
Tabel V.17	Jawaban Responden Mengenai Memberikan Pembinaan Tentang Pengetahuan Mengenai Adminitrasi Desa.....	98
Tabel V.18	Jawaban Responden Mengenai Perangkat Desa Diberi Pelatihan Tentang Tugas Dan Kewajiban	99
Tabel V.19	Jawaban Responden Mengenai Perangkat Desa Diberi Pengarahan Untuk Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Dan Keahlian	100
Tabel V.20	Jawaban Responden Mengenai Pengawasan Kepada Perangkat Desa Mengenai Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Administrasi Desa	101
Tabel V.21	Jawab Responden Mengenai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa	103
Tabel V.22	Jawaban Responden Mengenai Tentang Laporan Secara Tertulis	104
Tabel V.23	Jawaban Responden Mengenai Laporan Secara Lisan.....	105
Tabel V.24	Jawaban Responden Mengenai Tentang Kecepatan Dan Target Pelaksanaan Tugas	106

Tabel V.25	Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Adanya Pembinaan Dan Pengawasan Tertib Administrasi Desa Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir	108
Tabel V.26	Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Adanya Bimbingan Supervisi , Fasilitas, Dan Konsultasi Pelaksanaan Administrasi Desa Kec.Kubu Kabupaten Rokan Hilir	109
Tabel V.27	Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Adanya Melakukan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Kepala Desa Atau Kelurahan Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir	110
Tabel V.28	Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Adanya Melakukan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Perangkat Desa Atau Kelurahan Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir	111
Tabel V.29	Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Adanya Melaporkan Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Atau Kelurahan Di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir	112
Tabel V.30	Rekapitulasi Seluruh Indikator Variabel Penelitian Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir	114

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No.22 tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan peluang dan kesempatan bagi desa dalam memperdayakan desa dan masyarakat untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan pelayanan yang optimal.

Dengan adanya pembangunan berarti adanya usaha pemerintah untuk menuju kearah perbaikan secara bertahap dan berencana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mencapai kehidupan masyarakat sejahtera maka pearanan pemerintah baik Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah menuju ke indonesia sebagai Negara kesatuan telah menetapkan Pemerintahan Daerah sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan baik bidang Pemerintahan, Pembangunan maupun kemasyarakatan.

Pemerintahan Daerah meliputi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Dalam Pemerintahan Kabupaten terdapat Kecamatan, hal ini lebih lanjut ditegaskan dalam pasal 126 (1) dari UU No.32 tahun 2004 yang mengatakan”Kecamatan dibentuk diwilayah Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah”. Selanjutnya pada pasal 126 (2) dikatakan “kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagai kewenangan Bupati/Walikota untuk menangani sebagai urusan Otonomi Daerah. Lebih lanjut kedudukan Camat

dalam Pemerintahan ditegaskan lagi melalui pasal 14 (2) PP No. 19 tahun 2008 tentang kecamatan yang mengatakan camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/walikota melalui Sekretaris Daerah.

Melalui PP No. 19 Tahun 2008 pasal 21 tentang Kecamatan, Pemerintah menugaskan Camat sebagai Kepala Pemerintahan untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. Adapun kegiatan-kegiatan pembinaan tersebut meliputi:

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib Administrasi Pemerintahan Desa atau kelurahan.
- b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitas dan konsultasi pelaksanaan Administrasi Desa atau kelurahan.
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa atau lurah.
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Desa atau kelurahan.
- e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa atau kelurahan ditingkat kecamatan.
- f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa atau kelurahan ditingkat Kecamatan kepada Bupati atau Walikota.

Untuk menciptakan hal diatas maka diperlukan suatu konsep pembinaan terhadap aparatur Pemerintahan Desa tersebut. Agar dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya,

oleh karena itu diperlukan kemampuan dari para pemimpin pemerintah untuk dapat melaksanakan suatu bentuk pembinaan kepada Pemerintah Desa.

Adapun bentuk dari pembinaan tersebut dapat dilakukan melalui pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa, memberikan bimbingan, supervise, fasilitas dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa, kemudian dengan melakukan pengawasan terhadap kepala desa dan perangkat desa dan pengawasan dalam menyelenggarakan pemerintah desa atau kelurahan ditingkat kecamatan kepada bupati atau walikota.

Dengan adanya pembinaan ini diharapkan dapat menghasilkan mutu kerja yang baik dari Pemerintah Desa itu sendiri dan meningkatkan kemampuannya secara proposional dalam memberikan pelayanan yang lebih berkualitas kepada masyarakat sehingga terciptanya Pemerintah yang efektif dan berdaya guna dan berhasil guna.

Administrasi Desa sebagai alat penggerak Pemerintahan Desa sangat menentukan pengelolaan Pemerintah Desa. Administrasi Desa meliputi:

1. Administrasi umum yang terdiri dari buku keputusan desa, buku keputusan Kepala Desa, buku kekayaan desa, buku agenda, buku ekspedisi, buku aparat Desa, dan buku tanah desa.
2. Administrasi kependudukan meliputi : buku penduduk, buku penduduk sementara, buku perkembangan penduduk, buku kartu keluarga, buku tanda penduduk, buku jumlah penduduk.
3. Administrasi keuangan desa meliputi : Buku Anggaran Desa, buku kas umum, buku kas pembantu. (AW Widjaja, 2002:93).

Dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pemerintahan berkewajiban melakukan pencatatan data pada Buku Administrasi Umum. Pengisian buku administrasi umum dipertanggungjawabkan pelaksanaanya kepada sekretaris Desa.

Peningkatan dan pengembangan Pemerintah Desa diharapkan dapat berperan untuk melaksanakan tugas-tugas Administrasi yang dibebankan kepada Pemerintah Desa. Dalam struktur pemerintahan desa terdapat seperangkat aparat yang memiliki tugas untuk melaksanakan pengolahan Administrasi tersebut sebagai komponen penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Desa.

Untuk dapat memberikan hasil yang optimal didalam pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa maka diperlukan kemampuan yang memadai baik dari segi kemampuan aparat pelaksanaan itu sendiri maupun dari segi fasilitas pendukung, termasuk kondisi pekerjaan yang dilaksanakan, sehingga akan dapat diarahkan kepada adanya kesatuan tindakan.

Disamping kualitas aparat Pemerintahan Desa yang relatif rendah/terbatas, maka kondisi masyarakat di desa dipengaruhi pelaksanaan tugas-tugas dari Pemerintahan Desa. Namun dalam kenyataannya masih terdapat kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintah desa, yang antara lain dikarenakan lemah atau kurang baiknya pembinaan administrasi desa oleh pihak pemerintah.

Sebagaimana Yang Terdapat Di Kecamatan Kubu Bahwa Analisis Tugas Camat Sebagai Kepala Pemerintahan Dalam Melaksanakan Pembinaan Dan Menyelenggarakan Pemerintahan Desa dengan indikasi-indikasi ataupun fenomena-fenomena sebagai berikut:

1. Pembinaan yang diberikan Camat kepada Perangkat Desa belum cukup maksimal hal ini dapat dilihat belum berperan aktif dalam menjalankan fungsinya dalam menangani Administrasi Desa contoh :dalam menangani Pengolahan Administrasi Desa dalam membuat Ktp, Akte Kelahiran, kemudian Kk, dan buku tentang Tanah Desa dan Buku Keputusan Desa.
2. Adanya indikasi tidak terlihanya kegiatan ataupun program tata kerja dari Pemerintah Desa tersebut yang jelas yang dilaksanakan oleh Kepala Desa terutama berkaitan dengan Administrasi Desa, dan langsung dirasakan masyarakat yang belum mengerti akan fungsi dan wewenang serta tanggung jawab dalam menjalankan Perangkat Desa. Pentingnya peranan Camat disini mendapat penekanan karena di desa-desa yang ada di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir dengan jumlah penduduknya sekitar 23.161 orang yang terdiri dari 11.902 laki-laki an 11.259 perempuan yang tersebar di 15 Desa yang ada diKecamatan Kubu, beberapa desa masih belum berkembang sebagaimana yang diharapkan. Untuk mengetahui tingkat perkembangan atau kemajuan desa-desa diKecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat dari data berikut ini :

Tabel I.1 Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Kategori Desa Kecamatan Kubu

No	Nama Desa	Kategori Desa	Jenis Kelamin		Jumlah
			LK	PR	
1	Teluk Nilap	Swadaya	784	787	1571
2	Sungai Majo	Swakarya	1143	1025	2168
3	Rantau Panjang Kiri	Swadaya	864	841	1705
4	Sungai pinang	Swakarya	1043	1037	2080
5	Jojol	Swakarya	739	729	1468
6	Sungai panji-panji	Swadaya	518	471	989
7	Teluk merbau	Swakarya	450	447	897
8	Rantau panjang kanan	Swakarya	637	627	1264
9	Sungai kubu	Swakarya	915	829	1744
10	Tanjung leban	Swakarya	877	863	1740
11	Sungai segajah	Swakarya	1575	1417	2992
12	Teluk piyai	Swakarya	524	470	994
13	Pulau halang belakang	Swakarya	832	748	1580
14	Pulau halang	Swakarya	492	479	971
15	Sungai segajah makmur	Swadaya	509	489	998
	JUMLAH	-	11.902	11.259	23.161

Sumber : Kantor Camat Kecamatan Kubu 2010

Dari semua desa yang ada di wilayah Kecamatan Kubu ini, analisis tugas camat sebagai kepala pemerintahan dalam melaksanakan pembinaan bidang administrasi desa pemerintahan desa Camat sebagai Pembina Administrasi Desa sangat penting dalam memicu perkembangan Desa.

Lambatnya perkembangan Desa kec. Kubu selain dari aspek kecilnya PADes juga yang tidak kalah penting adalah belum tertibnya Pengolahan Administrasi Desa dan Pengolahan Administrasi Pemerintahannya belum berjalan

sebagaimana mestinya. Pengolahan Administrasi Pemerintahannya belum berjalan sebagaimana mestinya, misalnya buku tentang tanah desa, buku kekayaan, buku keputusan Desa, buku keputusan Kepala Desa yang selain belum terisi secara lengkap juga belum dimasukkan kedalam buku Administrasi umum.

Demikian juga seharusnya buku-buku anggaran Desa, buku kas umum, buku kas pembantu yang seharusnya diisi dan dilaporkan pada Camat setiap pertiga bulanya juga belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Fenomena yang terlihat tidak tertatannya Administrasi Pemerintahan Desa hampir disemua desa yang ada di Kecamatan Kubu ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang Kepala Desa dan perangkat desa diperoleh informasi,

“Bahwa mereka tidak terlalu mengerti tata cara pengisian buku Administrasi Keuangan Desa tersebut. Tidak diisinya buku-buku desa dan tidak dilaporkannya kegiatan Administrasi Desa ke Kecamatan secara berkala mengindikasikan belum tertatanya Administrasi Desa dengan baik”. (Wawancara: 2012)

Kegiatan yang dilakukan Camat dalam tahunan atau pun bulanan tentang Pembinaan Pemerintah Desa juga belum maksimal ,pembinaan yang dilakukan Camat terhadap administasi pemerintahan desa antara lain adalah dengan memberikan petunjuk dan arahan mengenai pengolahan administasi pemerintah desa, meningkatkan pengetahuan, keahlian/keterampilan personil di pemerintah desa, serta mengawasi penyelenggaraan administasi pemerintahan desa di bidang administasi seperti pembinaan tentang administrasi desa yaitu bidang administasi umum, administrasi kependudukan dan administasi keuangan, sedangkan untuk laporan rekapisasi desa yang ada dikecamatan kubu Kabupaten Rokan Hilir juga tidak terlaksana dengan baik. Dari hasil wawancara tersebut mereka hanya

mengatakan kalau kegiatan yang dilakukan camat untuk membina pemerintahan desa Camat hanya memberikan tugas/undangan/rekomendasi lainnya, Kalaupun memang ada hanya berbentuk rapat. Sedangkan untuk Rekapitaliasi hanya laporan tentang Beras Bulok, Seperti yang tergambar di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Kondisi ini menggambarkan pula bahwa Camat sebagai satuan pemerintahan yang ditujukan untuk diperkirakan belum menjalankan tugasnya secara optimal.

Berangkat dari fenomena diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul dengan menetapkan “Analisis Tugas Camat Sebagai Kepala Pemerintahan Dalam Melaksanakan Pembinaan Dan Menyelenggarakan Pemerintahan Desa.”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah **“Bagaimanakah Tugas Camat Sebagai Kepala Pemerintahan Dalam Melaksanakan Pembinaan Dan Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir?”**.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis Tugas Camat Sebagai Kepala Pemerintahan Dalam Melaksanakan Pembinaan Dan Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Bagi Akademik, sebagai wujud implementasi teori-teori yang didapat di bangku perkuliahan khususnya dibidang Administrasi Negara
- b. Bagi Pemerintahan Desa, sebagai informasi untuk Kepala Desa dan aparat Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas Pemerintahan Desa.
- c. Bagi pihak lain, sebagai bahan litelatur bagi kepentingan penelitian selanjutnya dalam penelitian yang sama.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dari penulisan ini, penulis membaginya ke dalam enam bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Berisikan beberapa pengertian yang menunjang terhadap penelitian ini, seperti teori yang melandasi penulisan ini yaitu pengertian kecamatan, pemerintah, Tugas Camat, Otonomi Daerah, pemeritah desa, pembinaan, Otonomui Desa , dan Administrasi Desa, kerangka pikiran, hipotesis, defenisi konsep, indikator variabel, dan teknik pengukuran.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Berisikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, lokasi dan waktu penelitian ,populasi dan sample, metode pengumpulan data, steknik pengumpulan data, dan analisa data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Terdidri dari status dan letak geografis dan struktur organisasi serta aktifitas organisasi.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas hasil dari penelitian tentang analisis tugas camat sebagai kepala pemerintah dalam melaksanakan pembinaan dan menyelenggarakan pemerintah desa Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan suatu bab penutup dan penulisan akan mengambil beberapa kesimpulan dan saran yang mungkin berguna untuk meningkatkan analisis tugas camat sebagai kepala pemerintahan dalam melaksanakan pembinaan dan menyelenggarakan pemerintahan desa.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Otonomi Daerah

a. Otonomi

Yaitu memberikan kemungkinan kepada pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah yang tingkatnya lebih atas untuk minta bantuan kepada pemerintah daerah ataupun pemerintahan daerah yang tingkatnya lebih rendah didalam menyelenggarakan tugas-tugas atau kepentingan-kepentingan yang tidak termasuk kedalam urusan rumah tangga daerah yang diminta bantuan tersebut (Ermaya Suradinata, 2006 : 42).

Dalam Penyelenggaraan otonomi daerah, ada dua produk hukum yang dapat dibuat oleh suatu daerah, yaitu:

1. Peraturan Daerah(Perda)
2. Peraturan Kepala Daerah.

Peraturan Daerah (Perda) adalah kewenangan membuat peraturan daerah (perda), merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD, untuk penyelenggaraan otonomi yang dimiliki oleh provinsi/kabupaten/kota, serta tugas pembantuan. Perda pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,

dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah . Perda yang dibuat oleh satu daerah, tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan baru mempunyai kekuatan mengikat setelah diundangkan dengan dimuat dalam lembaran daerah.

Dalam melaksanakan kebijakan pembangunan dan Otonomi Daerah yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah terus perlu dilakukan perkembangan wilayah pemerintahan dan pembangunan. Ini berarti diperlukan dinamisasi terus-menerus dengan alternatif-alternatif kebijakan yang dibutuhkan, pengembangan selanjutnya dapat didasarkan kepada panca konsep manajemen pemerintahan publik, yaitu:

1. Kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
2. Sinergi antara berbagai sub sistem-sub sisten manajemen pemerintahan publik.
3. Azas *cost-benefit* yang berimbang.
4. Abdi Negara yang ditranspormasikan menjadi abdi masyarakat.
5. Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pengambilan keputusan secara bertanggung jawab panca konsep manajemen publik tersebut berorientasi pada kepentingan masyarakat dan ada keterpaduan antara kebijakansanaan otonomi daereah (Ermaya Suradinata, 2006 : 45-45).

Ada beberapa hal yang mendasar dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut antara lain, sebagai pendorong masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa, dan kreatifitas, meningkatkan

pran serta, partisipasi masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Prinsip-Prinsip Pemberian Otonomi Daerah Menurut Deddy S (2002) adalah :

1. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilakukan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah.
2. Pelaksanaan Otonomi Daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
3. Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah Kabupaten dan Kota, sedangkan Otonomi Daerah provinsi merupakan Otonomi yang terbatas.
4. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus sesuai dengan konstitusi Negara sehingga tetap terjaga hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antara daerah.
5. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan karenanya dalam daerah Kabupaten dan Kota tidak ada lagi wilayah administrasi.
6. Demikian pula dikawasan-kawasan khusus yang dibina pemerintah atau pihak lain seperti badan otorita, kawasan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan pertambangan, kawasan pariwisata dan sebagainya berlaku ketentuan peraturan daerah otonomi.
7. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan peran dan fungsi legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislatif, fungsi pengawasan, fungsi anggaran atau penyelenggaraan pemerintah daerah.

8. Pelaksanaan atas dekonsentrasi diletakkan pada daerah Propinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu yang dilempahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah.
9. Pelaksanaan atas tugas membantu memungkinkan, tidak hanya dari pemerintah Kepala Daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah Kepala Desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta Sumber Daya Manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan.

2.2 Kecamatan

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, bukan sebagai kepala wilayah. Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah (Nurcholis, 2005:133).

Camat sebagai salah satu Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berperan sebagai pelayanan masyarakat. Berdasarkan pasal 1 ayat (a) UU No.43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian RI, PNS adalah setiap warga Negara RI telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut pasal 2 ayat (2) PNS terdiri dari:

- a. Pegawai Negeri Sipil Pusat
- b. Pegawai Negeri Daerah

c. Disamping Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksudkan dalam ayat:

1) Pejabat yang berwenang dalam mengangkat tidak tetap.

Dan dalam pasal 3 dijelaskan bahwa pegawai negeri sebagai aparatur Negara yang bertugas melayani masyarakat profesional, adil dan jujur dalam menyelenggarakan tugasnya serta bersikap netral dan menjamin kenetralannya tersebut.

Camat sebagai pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintah desa perlu memberi perhatian pada perangkat karena dengan pembinaan kekurangan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan aparat desa dapat diperbaiki. Menurut Nawawi pembinaan ini dilakukan dengan:

1. Memberikan, menjelaskan dan memperbaiki pemerintah agar pegawai melakukan kegiatan bekerja dengan menggunakan metode atau cara bekerja dan sarana yang tepat.
2. Memberi petunjuk tentang pelaksanaan suatu prosedur, penggunaan metode, penggunaan alat, menyusun rencana kerja melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan beban kerja masing-masing dan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan.
3. Melaksanakan pembinaan personil dengan memberikan kesempatan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, keahlian, kesejahteraan, pemberian motivasi, intrinsik dan ekstrinsik, pembinaan disiplin, moral dan semangat kerja, peningkatan tanggung jawab dan lain-lain. Misalnya memberikan kesempatan mengikuti kursus-kursus, penataran (in-service training), pendidikan dan latihan, memberikan penghargaan, ujian, hadiah dan lain-lain.

4. Memberikan kesempatan ikut berpartisipasi dengan menyumbangkan tenaga dan pikiran berdasarkan kreatifitas dan inisiatif masing-masing, baik mengenai struktur organisasi, kebijakan, prosedur kerja, perencanaan, pencatatan dan pelaporan serta upaya-upaya pembinaan personi, maupun dalam mewujudkan inovasi dalam menggunakan metode guna meningkatkan produktifitas dari segi kualitas dan kuantitasnya.
5. Memberikan koreksi terhadap personil yang keliru atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku, agar timbul kesadaran dari dalam dirinya sendiri motivasi dan usaha untuk memperbaikinya secara tidak dipaksa. Koreksi itu dimaksudkan untuk menimbulkan motivasi memperbaiki dan meningkatkan prestasi, yang memungkinkan perkembangan karier masing-masing dimasa depan (Nawawi.1994:111)

Pemerintahan Daerah meliputi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam Pemerintahan Kabupaten terdapat Kecamatan, hal ini lebih lanjut ditegaskan dalam pasal 126 (1) dari UU No.32 tahun 2004 yang mengatakan “Kecamatan dibentuk diwilayah Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah”. Selanjutnya pada pasal 126 (2) dikatakan “kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagai kewenangan Bupati/Walikota untuk menangani sebagai urusan Otonomi Daerah. Lebih lanjut kedudukan Camat dalam Pemerintahan ditegaskan lagi melalui pasal 14 (2) PP No. 19 tahun 2008 tentang kecamatan yang mengatakan camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/walikota melalui Sekretaris Daerah.

Melalui PP No. 19 Tahun 2008 pasal 21 tentang Kecamatan, Pemerintah menugaskan Camat sebagai Kepala Pemerintahan untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. Adapun kegiatan-kegiatan pembinaan tersebut meliputi:

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib Administrasi Pemerintahan Desa atau kelurahan.
- b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitas dan konsultasi pelaksanaan Administrasi Desa atau kelurahan.
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa atau lurah.
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Desa atau kelurahan.
- e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa atau kelurahan ditingkat kecamatan.
- f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa atau kelurahan ditingkat Kecamatan kepada Bupati atau Walikota.

Dijelaskan bahwa pegawai negeri sebagai aparatur Negara yang bertugas melayani masyarakat profesional, adil dan jujur dalam menyelenggarakan tugasnya serta bersikap netral dan menjamin kenetralannya tersebut.

Maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan desa : pemerintahan desa sebagai alat pemerintahan ialah satuan organisasi terendah pemerintah (RI) yang berdasarkan azas dekonsentrasi ditempatkan dibawah dan

bertanggung jawab langsung kepada pemerintah wilayah kecamatan yang bersangkutan (Ndraha taluziduhu,1991:15)

Dalam peraturan pemerintah No.72 tahun 2005 tentang desa pasal 98 ayat 2 disebutkan bahwa kabupaten/kota dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan. Dalam pasal 1 ayat 15 peraturan pemerintah No.72 tahun 2005 tentang desa disebutkan bahwa pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi pelaksanaan pemerintah desa, supervisi, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Selanjutnya disebutkan dalam pasal 102 bahwasanya pembinaan dan pengawasan Camat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan, meliputi:

- a. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- b. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- c. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- d. Memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa;
- e. Memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
- f. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa
- g. Memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- h. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;

- i. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- j. Memfasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- k. Memfasilitasi pelaksanaan masyarakat desa
- l. Memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- m. Memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan ke lembaga kemasyarakatan; dan
- n. Memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

Selanjutnya Namawi (1995:60) pembinaan dilakukan dengan memberikan contoh-contoh yang baik kepada bawahannya tentang bagaimana berbuat dan melaksanakan tugas-tugas yang sesuai dengan pekerjaannya, sehingga tugas tersebut dikerjakan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Sedangkan pendapat ahli lain mengatakan bahwa pembinaan untuk tercapainya hasil kerja yang baik diperlukan beberapa ketentuan, yaitu:

- a. Adanya bimbingan dari atasan
- b. Pemberian motivasi dari atasan kepada bawahan.
- c. Adanya kesempatan untuk mengembangkan karir, dalam hal ini adalah pemberian pendidikan dan latihan kerja.
- d. Memberikan penghargaan (Santoso S,1988:291).

2.3 Pengertian Pelaksanaan Tugas

Tugas adalah sebagai kewajiban untuk dilaksanakan, dimana keberhasilan tugas seorang kepala wilayah adalah sejauh mana dia berhasil mencapai tujuan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka melaksanakan kewajiban **Haw Widjaja** (2003:25) .

Pelaksanaan tugas adalah realisasi dari apa yang telah direncanakan atau ditetapkan sebelumnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. **W.J.S. Poerwadarminta** (1994:97)

Tugas adalah sesuatu yang wajib di kerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan yang merupakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang atau organisasi (**kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke III 2002:1215**)

Dalam pelaksanaan tugas tentu saja tidak berdiri dengan sendirinya. Pelaksanaan tugas tidak terletak pada sistematis pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab, dan hubungan kerja. Tetap faktor manusia harus memiliki kemampuan dan kesungguhan kerja dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diletakkan diatas pundaknya.

Tugas Pokok dan Fungsi Camat sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Camat mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan.
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- g. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan.
- h. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan atau kelurahan.

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas adalah seberapa banyak pekerjaan yang dapat dicapai dan diharapkan dari tiap-tiap pegawai, kelancaran suatu tugas atau pekerjaan pada suatu organisasi secara tepat dan baik harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan berjalan lancar
2. Tidak terjadinya penundaan

3. Pekerjaan diselesaikan tepat pada waktunya.

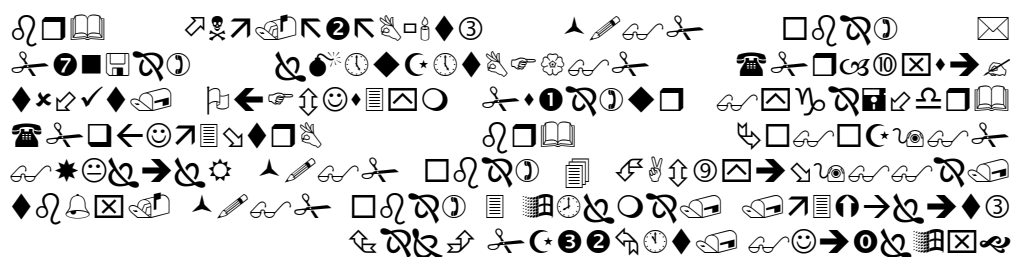
2.4 Pengertian Pemerintah

Pengertian pemerintah secara etimologi berarti “badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu negara” kemudian juga dapat diartikan “pemerintah” berarti perihal, cara perbuatan urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi. Ada empat dasar yang terkandung didalamnya yaitu sebagai berikut :

1. Ada dua pihak, yaitu pihak pemerintah yang disebut pemerintah dan pihak yang diperintah disebut masyarakat.
2. Pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan legitimasi untuk mengatur dan mengurus rakyatnya.
3. Pihak yang diperintah memiliki keharusan untuk taat kepada pemerintah yang sah.
4. Antara pihak yang memerintah dengan pihak yang diperintah terdapat hubungan timbal balik baik vertikal maupun horizontal.

Dalam mengelola pemerintah yang baik dan benar, pemerintah hendaknya jangan hanya sebagai penjaga malam yang memerintah ketertiban tetapi jangan lupa juga dengan ketentraman dan kesejahteraan masyarakat. Jadi, janganlah hanya mampu berkuasa tetapi juga mampu untuk melayani. Oleh karena itu disebut sebagai pemerintah yang baik dan benar atau dengan kata lain *Good Government* dan *Cleate Government*. (Inu Kencana, 2003 : 134)

Konsep pemerintah berarti konsep yang mengatur dan memimpin masyarakat. Pemimpin yang baik akan melahirkan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan terlepas dari pengaruh korupsi, kolusi dan nepotisme. Pemimpin memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masyarakat dan juga tanggung jawab kepada Allah SWT sebagai pemegang amanah. Hal ini sebagai mana yang difirmankan Allah SWT dalam surat An-Nisaa' ayat 58 yang berbunyi :



Artinya : *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pelajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”*. (An-Nisaa' : 58)

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kepemimpinan pemerintah yang baik akan mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah SWT, jika penyelenggaraan pemerintah dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan amanah yang dilimpahkan. Pemimpin merupakan Imam bagi masyarakat, untuk itu perlu adanya pemimpin yang memiliki profesionalitas dari orang-orang yang dipimpinnya, sehingga menjadikan suatu daerah tersebut menjadi daerah yang aman dan sejahtera.

Dijelaskan bahwa pegawai negeri sebagai aparatur Negara yang bertugas melayani masyarakat profesional, adil dan jujur dalam menyelenggarakan tugasnya serta bersikap netral dan menjamin kenetralannya tersebut.

Maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan desa : pemerintahan desa sebagai alat pemerintahan ialah satuan organisasi terendah pemerintah (RI) yang berdasarkan azas dekonsentrasi ditempatkan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada pemerintah wilayah kecamatan yang bersangkutan(Ndraha taluziduhu,1991:15)

Dalam Penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, wajib melibatkan semua aparatur pemerintahan yang terkait. Oleh karena itu dalam pencapaian tujuan tersebut perlu dilakukan pendekatan multifungsional. Artinya bahwa setiap persoalan harus ditinjau dari berbagai fungsi aparatur yang terkait, baik antara instansi ditingkat daerah.

Sehubungan dengan itu, baik dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan, kegiatan aparatur pemerintahan perlu dipadukan, diserasikan dan diselaraskan untuk mencegah timbulnya tumpang tindih, pembenturan, kesimpangsiuran dan atau kekacauan. Oleh karena itu, koordinasi, pemberdayaan dan Pembinaan Kepada Pemerintahan Desa harus dilakukan.

2.5 Pemerintah Daerah

Menurut sedarmayanti (2004:9) pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, yang memiliki tugas pokok yang mencakup:

1. Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan Umum
3. Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

4. Melaksanakan Ketertiban Dunia, Perdamaian Abadi dan Keadilan Sosial.

Terselenggaranya *good governance* merupakan persyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab ,serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.(Sedarmayanti 2004:10).

Menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak,wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah . sedangkan peraturan daerah selanjutnya disebut perda adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota.

Dari pengertian diatas, dapatlah diketahui bahwa pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah merupakan daerah yang diberikan hak Otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangga Daerah.

2.6 Otonomi Desa

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling konkrit.

Penyelenggaraan pemerintahan Desa menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan didukung Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 telah memberikan keluangan dan kesempatan bagi Desa dan memerdayakan masyarakat Desa. Masyarakat Desa dapat mewujudkan masyarakat yang mandiri (Otonomi Desa). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang pedoman penyelenggaraan pemerintahan Desa dan kelurahan ada beberapa pertimbangan, yaitu :

- a. Bahwa dalam rangka mendukung pemberdayaan masyarakat dan keberhasilan pembangunan Desa dan Kelurahan, perlu upaya penguatan, kelembagaan, peningkatan motivasi dan swadaya gotongroyong masyarakat di Desa dan Kelurahan.
- b. Bahwa untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan Desa dan Kelurahan, secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan.

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan peraturan Menteri Dalam Negeri tentang perlombaan Desa dan Kelurahan.

Ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437); dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438).

Otonomi Desa merupakan atonomi asli, bulat dan utuh serta bukan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh Desa tersebut (Haw Widjaja, 2003 : 165).

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintahan daerah dalam mewujudkan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab di era reformasi dan desentralisasi pemerintahan dalam melakukan penataan kewenangan, organisasi perangkat daerah, penataan relokasi personil, sebagai tindak lanjut Undang-undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-undang No. 25 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintahan No. 84 Tahun (HAW Widjaja, 2005 : 7-8).

2.7 Pemerintah Desa

Desa adalah satuan administrasi pemerintahan terendah dengan hak otonomi berbasis asal usul dan adat istiadat. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan desa harus tetap terintegrasi dalam subsistem administrasi daerah

dan sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. Untuk menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan desa tetap terintegrasi dalam subsistem administrasi daerah dan sistem pemerintahan nasional maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa. Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintahan kabupaten/kota kepada desa agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan tujuan, yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat. (Hanif Nurcholis, 2011:153-154).

Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggaraan pemerintah desa.

1. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa.

2. Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

3. Alokasi Dana Desa

Dana Alokasi Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

5. Pembinaan

Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervise, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam Undang-Undang Otonomi Daerah yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Agar dapat memahami Pemerintahan Desa secara menyeluruh, maka terlebih dahulu harus dipahami tentang Desa terutama ditinjau dari aspek ekonominya, hal ini disebabkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah memperbaiki kedudukan Desa sesuai dengan asal usulnya yang semula diatur secara seragam dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa pengaturan Desa akan tetap melalui peraturan daerah dengan kewajiban mengakui hak asal usul Desa tersebut.

Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Perangkat Desa, istilah Kepala Desa dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya Desa setempat.

2.7.1 Administrasi Desa

Administrasi berasal dari bahasa latin *Administrare*, yang berarti melayani , membantu dan memenuhi. Dari kata kerja itu terjadilah kata benda *Administratio*, yang dalam bahasa inggris adalah *Administration* dan menjadi administrasi dalam bahasa indonesia. Administrasi diartikan sebagai perbuatan penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. (Wijaya, 2002:87).

Administrasi sebagaimana yang dikemukakan (Siagian dalam Syafiie, 2003:5) adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kemudian menurut Ndraha (2003 : 5), yang dimaksud dengan Administrasi Pemerintahan adalah proses penjagaan (*keeping dan caring*) dan penyampaian (*forwarding dan delivering*) produk pemerintahan tertentu kepada konsumen dan memberdayakan konsumen untuk menggunakan produk tersebut dengan cara dan alat yang sesuai dengan kondisi konsumen segera mungkin sedemikian rupa sehingga konsumen menerimanya utuh dan sadar, dan memperoleh manfaat sebesar-besarnya.

Demi efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintahan desa harus di dukung dengan tata usaha yang benar.

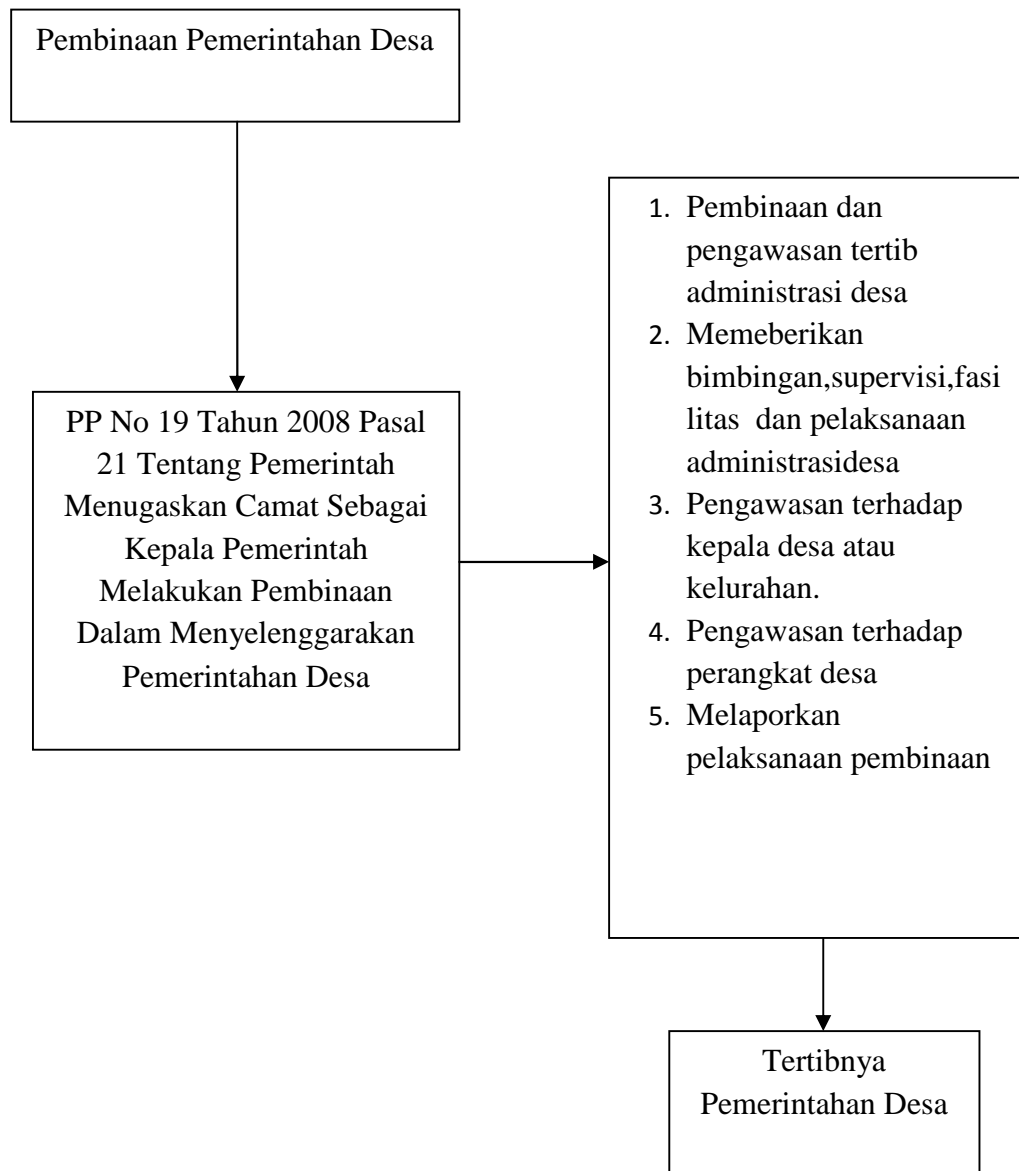
Tata usaha adalah mencatat semua proses penyelenggaraan pemerintahan desa yang disebut administrasi desa . Jadi, Administrasi Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi desa.

Administrasi desa sangat penting bagi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan pemerintahan desa. Pemerintahan desa akan berjalan dengan lancar manakala didukung oleh sistem tata usaha/administrasi yang benar, rapi, dan tertib. Sistem administrasi yang benar, rapi, dan tertib akan memberikan data dan informasi yang mudah dan sistimatis yang sangat berguna untuk pengambilan keputusan, pembuatan rencana, kontrol kegiatan, evaluasi, dan komunikasi dan informasi baik ke dalam maupun keluar organisasi.(Hanif Nurcholis,2011:135)

2.8 Kerangka Pikiran

Adapun kerangka pikiran untuk menjelaskan hubungan antara variabel dengan indikator penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar II.1 Kerangka Pikiran Analisis Tugas Camat Sebagai Kepala Pemerintahan Dalam Melaksanakan Pembinaan Dan Menyelenggarakan Pemerintah Desa Di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir



2.9 Defenisi Konsep

Defenisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial (Singarimbun, 2006:33). Adapun batasan definisi konsep tersebut adalah:

1. Otonomi Daerah

Yaitu memberikan kemungkinan kepada pemerintahan pusat atau spemerintahan daerah yang tingkatnya lebih atas untuk minta bantuan kepada pemerintah daerah ataupun pemerintahan daerah yang tingkatnya lebih rendah didalam menyelenggarakan tugas-tugas atau kepentingan-kepentingan yang tidak termasuk kedalam urusan rumah tangga daerah.

2. Kecamatan

Adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, bukan sebagai kepala wilayah. Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah.

3. Pelaksanaan Tugas

Tugas adalah sebagai kewajiban untuk dilaksanakan, dimana keberhasilan tugas seorang kepala wilayah adalah sejauh mana dia berhasil mencapai tujuan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka melaksanakan kewajiban.

4. Pemerintah secara etimologi berarti “badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu negara” kemudian juga dapat diartikan “pemerintah” berarti perihal, cara perbuatan urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi.

5. Pemerintah daerah

Pemerintah Daerah menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

6. Pemerintah Desa

Desa adalah satuan administrasi pemerintahan terendah dengan hak otonomi berbasis asal usul dan adat istiadat.

7. Administrasi

Administrasi desa sangat penting bagi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintahan desa akan berjalan dengan lancar manakala didukung oleh sistem tata usaha/administrasi yang benar, rapi, dan tertib.

2.10 Defenisi Operasional

Menurut Singarimbun (2006:46) definisi operasional adalah suatu cara untuk mengatur variable. Sehingga dengan pengukuran ini dapat diketahui indicator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur variabel. Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah pembinaan pemerintah desa.

Adapun pelaksanaan tugas camat membina penyelenggaraan pemerintah desa dapat dilihat berdasarkan PP No. 19 Tahun 2008 pasal 21 tentang Kecamatan, Pemerintah menugaskan Camat sebagai Kepala Pemerintahan untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. Adapun kegiatan-kegiatan pembinaan tersebut meliputi:

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib Administrasi Pemerintahan Desa atau kelurahan.
- b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitas dan konsultasi pelaksanaan Administrasi Desa atau kelurahan.
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa atau lurah.
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Desa atau kelurahan.
- e. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa atau kelurahan ditingkat Kecamatan kepada Bupati atau Walikota.

2.11 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, dan perumusan masalah diatas serta dihubungkan dengan teori-teori yang telah diuraikan, maka dapat ditarik suatu hipotesis bahwa : *Diduga Tugas Camat Sebagai Kepala Pemerintahan Dalam Melaksanakan Pembinaan Dan Menyelenggarakan Pemerintah Desa Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir belum terlaksana dengan baik*”.

2.12 Indikator Variabel

Untuk menganalisis tugas camat dalam membina dan menyelenggarakan pemerintah desa dapat dilihat berdasarkan PP No. 19 Tahun 2008 pasal 21 tentang Kecamatan, Pemerintah menugaskan Camat sebagai Kepala Pemerintahan untuk

melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. Adapun kegiatan-kegiatan pembinaan tersebut meliputi:

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib Administrasi Pemerintahan Desa atau kelurahan.
- b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitas dan konsultasi pelaksanaan Administrasi Desa atau kelurahan.
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa atau lurah.
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Desa atau kelurahan.
- e. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa atau kelurahan ditingkat Kecamatan kepada Bupati atau Walikota.

Adapun Operasional indikator variabel dalam penelitian ini dapat dilihat dalam table berikut ini :

Tabel II.1 Operasional Indikator Variabel

Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3
Tugas Camat sebagai kepala pemerintahan dalam melaksanakan pembinaan dan menyelenggarakan pemerintahan desa	1. Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa	a. Memberikan pelatihan tentang tertib administrasi.desa b. Memberikan prosedur kerja tentang administrasi desa. c. Memberikan metode/cara kerja administrasi desa. d. Memberikan Pengawasan tentang adm desa terhadap perangkat desa
	2. Memeberikan bimbingan,supervisi,fasilitas dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa	a. Memberikan bimbingan agar bekerja dengan baik dan memebritahu akibat dari kesalahan dalam pekerjaan tersebut. b. Memberikan pengarahan langsung yang bersifat motivasi agar dapat bekerja dengan baik dan optimal. c. Memberikan fasilitas yang memadai untuk pelaksanaan pemerintahan desa. d. Memberikan peluang untuk berkonsultasitentang pelaksanaan adm.desa

	<p>3. Melakukan pembinaan Pengawasan terhadap kepala desa atau kelurahan.</p>	<p>a. Memberikan pembinaan tentang cara pengambilan keputusan yang baik dan benar</p> <p>b. Memberikan pelatihan tentang cara pembuatan perdes</p> <p>c. Mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan</p> <p>d. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan.</p>
	<p>4. Melakukan pembinaan dan Pengawasan terhadap perangkat desa atau kelurahan.</p>	<p>a. Memberikan pembinaan tentang pengetahuan mengenai administrasi desa.</p> <p>b. Perangkat desa diberi pelatihan tentang tugas dan kewajibannya</p> <p>c. Perangkat desa diberikan pengarahan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan keahlian.</p> <p>d. Memberikan pengawasan kepada perangkat desa mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab adm.desa</p>

	5. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati/ walikota	a. Evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa b. Laporan secara tertulis c. Laporan secara lisan d. Kecepatan dan target pelaksanaan tugas
--	--	---

2.13 Teknik Pengukuran

Untuk mengetahui pelaksanaan tugas camat sebagai kepala pemerintah dalam melaksanakan pembinaan dan menyelenggarakan pemerintah desa Kecamatan Kubu maka penulis melakukan pengukuran dengan menggunakan *skala likert*. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena social. Dengan skala likert, maka variable yang akan diukur dijabarkan menjadi indicator variable dan indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang berupa pernyataan atau pertanyaan. Sugiyono (2009:107)

Jawaban dari setiap instrument yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negative, atau dari baik sampai kurang baik, yang dapat berupa kata-kata. Untuk keperluan peranan dalam penelitian ini, maka jawaban dari responden dalam kuesioner diberi skor :

Tabel II.2 Skala Pengukuran

No	Kategori	Skor
1	Baik	3
2	Cukup Baik	2
3	Kurang Baik	1

Kemudian untuk menganalisis masing-masing indicator variable penelitian terlebih dahulu harus diketahui nilai intervalnya dengan menggunakan formula:

Skor Tertinggi	:	Jumlah Sub Indikator x Jumlah Responden x Nilai Tertinggi
Skor Terendah	:	Jumlah Sub Indikator x Jumlah Responden x Nilai Terendah
Interval	:	$\frac{\text{Skor Tertinggi} - \text{Skor Terendah}}{\text{Skala}}$

Dari formula diatas, dapat diketahui bahwa:

$$\text{Skor Tertinggi} : 4 \times 18 \times 3 = 216$$

$$\text{Skor Terendah} : 4 \times 18 \times 1 = 72$$

$$\text{Interval} : \frac{216 - 72}{3} = 48$$

Dari hasil diatas, untuk mengetahui penilaian dari masing-masing indikator variabel tentang analisis tugas camat sebagai kepala pemerintah dalam melaksanakan pembinaan dan menyelenggarakan pemerintahan desa maka dapat dilihat sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi dengan 4 sub indicator yang dinilai, dengan 18 responden dengan skor tertinggi 216 dan skor terendah 72 dengan interval 48 dapat dinyatakan:

Baik : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner berada pada interval 168 – 216.

Cukup Baik : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner berada pada interval 120-167.

Kurang Baik : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner berada pada interval 72-119.

2. Memberikan bimbingan ,supervise, fasilitas dan konsultasi pelaksanaan administrasi pengukurannya dengan 4 sub indicator yang dinilai, dengan 18 responden dengan skor tertinggi 270 dan skor terendah 90 dengan interval 60 dapat dinyatakan:

Baik : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner berada pada interval 168 – 216.

Cukup Baik : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner berada pada interval 120 -167.

Kurang Baik : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner berada pada interval 72 -119.

3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa/kelurahan , pengukurannya dengan 4 sub indicator yang dinilai, dengan 18 responden dengan skor tertinggi 216 dan skor terendah 72 dengan interval 48 dapat dinyatakan:

Baik : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner berada pada interval 168-216.

Cukup Baik : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner berada pada interval 120-167.

Kurang Baik : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner berada pada interval 72-119.

4. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa atau kelurahan pengukurannya dengan 4 sub indikator yang dinilai, dengan 18 responden dengan skor tertinggi 216 dan skor terendah 72 dengan interval 48 dapat dinyatakan:

Baik : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner berada pada interval 168-216.

Cukup Baik : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner berada pada interval 120-167.

Kurang Baik : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner berada pada interval 72-119.

5. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan pengukurannya dengan 4 sub indikator yang dinilai, dengan 18 responden dengan skor tertinggi 216 dan skor terendah 72 dengan interval 48 dapat dinyatakan:

Baik : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner berada pada interval 168-216.

Cukup Baik : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner berada pada interval 120-167.

Kurang Baik : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner berada pada interval 72-119.

Kemudian untuk menganalisis tugas camat sebagai kepala pemerintah dalam melaksanakan pembinaan dan menyelenggarakan pemerintahan desa Kecamatan Kubu , terlebih dahulu harus diketahui nilai intervalnya dengan menggunakan formula:

Skor Rata-rata Tertinggi	: Jumlah Indikator x Jumlah Responden x Nilai Tertinggi
Skor Rata-rata Terendah	: Jumlah Indikator x Jumlah Responden x Nilai Terendah
Interval	: $\frac{\text{Skor Rata-rata Tertinggi} - \text{Skor Rata-rata Terendah}}{\text{Skala}}$

Dari formula diatas, dapat diketahui bahwa:

$$\text{Skor Rata-rata Tertinggi} : 5 \times 18 \times 3 = 270$$

$$\text{Skor Rata-rata Terendah} : 5 \times 18 \times 1 = 90$$

$$\text{Interval} : \frac{270 - 90}{3} = 60$$

Dari hasil diatas, untuk mengetahui penilaian variabel menganalisis tugas camat sebagai kepala pemerintah dalam melaksanakan pembinaan dan menyelenggarakan pemerintahan desa secara keseluruhan adalah dengan menjumlahkan seluruh hasil rekapitulasi setiap sub indicator variabel dan dibagi dengan jumlah indikator variabel penelitian.

Dengan demikian, maka dapat dinyatakan bahwa menganalisis tugas camat sebagai kepala pemerintah dalam melaksanakan pembinaan dan menyelenggarakan pemerintahan desa di Kecamatan Kubu, pengukurannya

dengan 5 indikator variabel yang dinilai dengan skor rata-rata tertinggi 270 dan skor rata-rata terendah 90 dengan nilai interval 60, dapat dinyatakan:

Baik : Apabila Jumlah Skor Rata-Rata Yang Diperoleh Dari Responden Berada Pada Interval 210-270.

Cukup Baik : Apabila Jumlah Skor Rata-Rata Yang Diperoleh Dari Responden Berada Pada Interval 150-209.

Kurang Baik : Apabila Jumlah Skor Rata-Rata Yang Diperoleh Dari Responden Berada Pada Interval 90-149.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Di lihat dari lingkup masalah dan tujuan yang akan dicapai, maka tipe penelitian ini adalah Survey Deskriptif, yaitu menggambarkan fakta-fakta yang ada untuk mengemukakan kondisi dari gejala-gejala secara lengkap tentang objek yang diteliti.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kecamatan Kubu karena penulis menemukan gejala Pelaksanaan Pembinaan Pemerintahan Desa yang dilakukan oleh Camat belum efektif. Kecamatan Kubu memiliki 15 Desa oleh karena itu, penulis membatasi lokasi hanya pada 3 desa yaitu Desa Sungai Segajah, Desa Teluk Nilap, Desa Rantau Panjang kiri terdapat di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, adapun alasan dipilih 3 desa ini adalah dengan mempertimbangan dimana Desa Sungai Segajah adalah Desa yang relatif lambat berkembang/desa ketinggalan, Desa Teluk Nilap adalah sebagai Desa yang maju, Sedangkan Desa Rantau Panjang Kiri adalah Desa yang berprestasi. Waktu penelitian dilakukan pada Awal Bulan Februari sampai dengan akhir Maret 2012.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi yang diartikan sebagai jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya diduga. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Camat, Sekretaris Camat, Seksi Pemerintahan Serta, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan, Kaur Perekonomian di 3 Desa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III. 1 Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel
1	Camat	1	1
2	Sekretaris Camat	1	1
3	Kasi Pemerintahan	1	1
4	Kepala Desa	15	3
5	Sekretaris Desa	15	3
6	Kaur Pembangunan	15	3
7	Kaur Pemerintahan	15	3
8	Kaur Perekonomian	15	3
	Jumlah	78	18

Sumber : Kantor Camat Kecamatan Kubu 2010

3.4 Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel yang digunakan untuk Camat. Sekretaris Camat, Kasi Pemerintahan menggunakan teknik sensus karena selain jumlahnya relatif kecil tapi mudah untuk ditemui. Sedangkan untuk Perangkat Desa (desa sampel) digunakan Teknik Purposive Sampling. Teknik Purposive Sampling yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, seperti yang dikemukakan diatas bahwa diantara 15 Desa yang ada di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, dengan mempertimbangkan maka diambil hanya 3 desa. Alasan memilih tiga desa

tersebut bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Camat Drs.

Ahmad Atin, yang mengatakan bahwa,

“Desa yang dikatakan berkembang, prestasi, dan masih rentan yaitu mempunyai kriteria bahwa dengan pertimbangan desa tersebut merupakan desa yang dari segi prestasi desa dalam mengadakan kegiatan yang berupa gotong royong untuk kenyamanan desa, dan dapat juga dilihat dari segi pendidikan, pendapatan masyarakat, pembangunan yang ada di desa tersebut, dan kepatuhannya terhadap peraturan pemerintahan desa tersebut. Dengan hal tersebut diatas berdasarkan atas pertimbangan tertentu, yaitu dengan mengambil 3 desa, dimana desa tersebut dengan pertimbangan desa yang relatif berkembang ,desa yang sudah maju, kemudian desa yang sudah berprestasi”.(Wawancara: 2012)

3.5 Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari responden yang merupakan sumber informasi untuk memperoleh jawaban yang relevan mengenai permasalahan di dalam penelitian ini yakni tentang Analisis Tugas Camat sebagai kepala pemerintahan dalam membina dan menyelenggarakan Pemerintahan Desa .

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari lembaga atau instansi yang berwenang sebagai data tidak langsung seperti data tentang keadaan geografis yang terdiri dari letak, batas wilayah dan luas wilayah; data demografis yang terdiri dari letak, batas wilayah dan luas wilayah; data demografis yang terdiri dari data kependudukan data kependudukan dan struktur organisasi pemerintah kecamatan dan desa.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

a. Quesioner

Yaitu teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan untuk mendapatkan data tentang pelaksanaan Tugas Camat dalam Membina Pemerintah Desa. Adapun yang menjadi quesioner adalah, Camat, Kepala Desa, Sekretari Desa, Kepala Urusan , Kepala Dusun. Kegunaan Quesioner adalah untuk mendapatkan bahan/data yang akurat dalam penelitian.

b. Wawancara (Interview)

Yaitu melakukan tanya jawab langsung kepada responden mengingat masih adanya informasi yang belum lengkap melalui teknik quesioner.

c. Observasi (Pengamatan Langsung)

Yaitu mengamati secara langsung objek yang diteliti, guna untuk lebih mengetahui sejauh mana Tugas Camat Membina Pemerintahan Desa.

3.7 Teknik Analisa Data

Setelah semua data yang dikumpulkan melalui metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini, selanjutnya data dikelompokkan dan diolah menurut jenisnya, setelah itu dianalisa secara *deskriptif*, yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan dilapangan dan hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel dan dilengkapi dengan uraian-uraian serta keterangan yang mendukung untuk dapat diambil kesimpulan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Keadaan Geografis di Kecamatan Kubu

Kecamatan Kubu merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir yang dilalui oleh jalur Provinsi. Kecamatan Kubu sebagai Kecamatan yang sudah lama yang berada Di kabupaten Rokan Hilir. Camat Kubu saat ini di jabat oleh Syamsul Kidul. S.Sos.

Secara umum keadaan topografisnya adalah berupa dataran meskipun ada beberapa daerah yang berbukit-bukit.

a. Luas wilayah

Kecamatan kubu terdiri dari 15 desa dan kecamatan ini memiliki luas wilayah adalah 1.061.06 km².

b. Batas wilayah

1. Sebelah utara berbatasan dengan selat malaka
2. Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan bangko pusako
3. Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan bagan sinembah/kecamatan pasir limau kapas
4. Sebelah timur berbatasan dengan kec. Perkaitan

Desa rantau panjang kiri, desa teluk nilap, desa sungai segajah, yang merupakan salah satu dari 15 desa yang berada di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

Untuk memasuki wilayah desa rantau panjang kiri, desa teluk nilap, desa sungai segajah, yang harus ditempuh yaitu jalan transformasi yang berupa air dan

jalan transportasi darat. Jika melalui transportasi air harus melewati sungai, yaitu sungai kubu. Yang mana sungai ini merupakan sungai yang terbesar di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

Dahulunya sungai ini dijadikan sebagai tempat menunjang kehidupan para nelayan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya karena sungai ini dikenal dengan hasil ikannya. Tetapi saat ini sangat sulit mencari warga desa yang berprofesi sebagai nelayan, karena disungai ini sudah sulit untuk mendapatkan ikan.

Sungai ini juga dijadikan jalur hilir Mudik bagi masyarakat setempat. Namun setelah tahun 1980-an terjadinya perkembangan yang pesat yang ditandai dengan adanya jalur-jalur transportasi darat yang dibuka. Dengan adanya jalan-jalan yang dibuka tersebut sehingga jalur transportasi air sangat jarang digunakan. Hal ini dipertimbangkan masyarakat setempat karena jarak waktu tempuh lewat transportasi darat lebih singkat dibandingkan dengan lewat transportasi air.

4.2 Penduduk

Penduduk kecamatan kubu pada umumnya dihuni oleh suku melayu, jawa, batak dan lainnya. Jumlah penduduk akhir 2010 adalah 23.161 jiwa (5.954KK) terdiri dari 11.902 jiwa laki-laki dan 11.259 jiwa perempuan.

Berikut ini adalah tabel tentang jumlah penduduk yang ada dikecamatan kubu menurut jenis kelamin .

Tabel IV.1 Tabel Jumlah Penduduk Desa Kec. Kubu Menurut Jenis Kelamin

No	Nama Desa	Jenis Kelamin		Jumlah
		LK	PR	
1	Teluk Nilap	784	787	1571
2	Sungai Majo	1143	1025	2168
3	Rantau Panjang Kiri	864	841	1705
4	Sungai pinang	1043	1037	2080
5	Jojol	739	729	1468
6	Sungai panji-panji	518	471	989
7	Teluk merbau	450	447	897
8	Rantau panjang kanan	637	627	1264
9	Sungai kubu	915	829	1744
10	Tanjung leban	877	863	1740
11	Sungai segajah	1575	1417	2992
12	Teluk piyai	524	470	994
13	Pulau halang belakang	832	748	1580
14	Pulau halang	492	479	971
15	Sungai segajah makmur	509	489	998
	JUMLAH	11.902	11.259	23.161

Sumber : Kantor Camat Kecamatan Kubu 2010

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa penduduk desa kecamatan kubu jumlah penduduknya pada akhir tahun 2010 adalah berjumlah 23.161 orang, dari jenis kelamin laki-laki adalah berjumlah 11.902 sedangkan perempuan adalah 11.259 .

4.3 Agama Penduduk

Mayoritas penduduk desa di kecamatan kubu adalah suku melayu dan jawa yang sangat kuat memeluk agama islam, meskipun beberapa tahun terakhir ada pendatang baru yang berasal dari orang keturunan tionghua, batak, yang memeluk agama Kristen dan hindu.

Berdasarkan komposisi penduduk yang ada di Desa Kecamatan Kubu kabupaten rokan hilir mayoritas penduduknya beragama islam , hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1V.2 Jumlah Masyarakat Desa Kecamatan Kubu Berdasarkan Agama Yang Mereka Anut

No	Agama	Jumlah (Orang)
1	Islam	22.756
2	Kristen	369
3	Budha	36
	Jumlah	23161

Sumber : Kantor Camat Kecamatan Kubu, 2010

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat desa kecamatan kubu beragama islam dengan jumlah 22.756 orang, kemudian berama Kristen berjumlah 369 orang dn beragama budha berjumlah 36 orang. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat desa Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir adalah beragama islam.

Berbicara mengenai agama atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat tidak terlepas dari sarana dan prasarana pibadatan yang ada di desa Kecamatan Kubu , adapun sarana peribadatan yang ada di desa kecamatan kubu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1V.3 Jumlah Sarana Pribadatan Di Desa Kecamatan Kubu

No	Sarana Pribadatan	Jumlah
1	Masjid	21
2	Musholla	17
3	Gereja	1
	Jumlah	39

Sumber : Data Monografit Kecamatan Kubu, 2010

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah tempat ibadah yang berda di desa yang ada Kecamatan Kubu terdiri dari 21 Masjid,17 Musholla, dan 1 Gereja. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat desa Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir mayoritas adalah agama islam.

4.4 Pendidikan

Perkembangan pendidikan jika dilihat dari pertumbuhan penduduk desa kecamatan kubu menunjukkan bahwa mereka sudah cukup baik,hal ini dapat dilihat dari tidak banyaknya jumlah penduduk yang buta huruf dalam artian banyak penduduk yang sudah bisa membaca dan menulis . Penduduk yang buta huruf atau tidak bisa membaca dan menulis adalah orang tua yang berumur 60 tahun, hal ini dikarenakan pada zaman dahulu belum banyak tempat pendidikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.4 Jenis Sarana Pendidikan Di Desa Kecamatan Kubu

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak (TK)	5 Unit
2	Sekolah Dasar (SD)	17 Unit
3	Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA)	9 Unit
4	Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTS)	8 Unit
5	Sekolah Menengah Atas (SMA)	3 Unit
6	Sekolah Perguruan Tinggi	1 Unit
	Jumlah	43

Sumber : Monografi Kantor Camat kecamatan kubu ,2010

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sarana pendidikan yang ada di kecamatan kubu cukup memadai dan ditambah lagi perguruan tinggi 1 unit. Itu dapat dilihat dengan adanya 5 unit Taman Kanak-Kanak, 17 Sekolah Dasar, 9 unit Madrasah Diniyah Awaliyah, 8 unit SMP, 3 unit SMA, dan 1 unit sekolah Perguruan Tinggi. Dan dapatlah diambil pemahaman bahwa tingkat pendidikan masyarakat desa kecamatan kubu sudah mulai kearah yang lebih baik dengan tidak banyaknya penduduk yang buta huruf karena tidak mengenyam pendidikan.

4.5 Kesehatan

Pelayanan masyarakat dibidang kesehatan di desa yang ada Di kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir sudah mengalami kemajuan , karena sudah adanya Puskesmas dan tempat Praktek Bidan, tempat Praktek Dokter, dan dapat membantu masyarakat dalam bidang pelayanan kesehatan seperti cek kesehatan, keluarga berencana, pemeriksaan kehamilan sampai proses persalinan , dan pemeriksaan kesehatan masyarakat lainnya. Sarana kesehatan di kecamatan kubu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.5 Sarana Kesehatan di Kecamatan Tahun 2010

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Puskesmas	1
2	Tempat Praktek Dokter	3
3	Tempat Praktek Bidan	13
4	Posyandu	37
Jumlah		54

Sumber : Monografi kecamatan kubu, 2010

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah sarana kesehatan di kecamatan kubu yang hanya memiliki 1 puskesmas sedangkan di kecamatan ini ada 17 Desa belum bisa mencukupi kebutuhan dan pelayanan kesehatan yang belum memadai.

4.6 Mata Pencaharian

Mata pencaharian adalah usaha yang dilakukan anggota keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup serta sekaligus juga ikut menentukan kelangsungan hidup manusia di masa akan datang. Mata pencaharian penduduk kecamatan kubu adalah pertanian, perkebunan kelapa sawit dan berdagang, sebagian lagi penduduk kubu juga bekerja sebagai PNS, Polri dan lainnya. Tipe pertanian yang dilakukan adalah menanam tanaman padi yang merupakan mata pencaharian pokok penduduk kecamatan kubu kabupaten rokan hilir. Dan pertanian lainnya yang berupa sawit, kelapa wija, kangkung, sayuran lainnya berupa kacang. Dlll. Tipe pertanian yang dilakukan adalah menanam palawija dan sayur-sayuran. Berikut tabel :

Tabel IV.6 Distribusi penduduk menurut Mata pencaharian Responden di kecamatan Kubu Tahun 2010

NO	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)
1	PNS	427
2	TNI/POLRI	53
3	Tani	1.757
4	Dagang	524
5	Lainnya	3.719
Jumlah		6.480

Sumber data : Monografi kecamatan kubu, 2010

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat bahwa rata-rata mata pencaharian penduduk di kecamatan kubu adalah bertani ,lahan pertanian yang ada dikecamatan kubu sangat luas, dapat dilihat dari mata pencaharian penduduk masyarakat di kecamatan kubu yang hanya bertani maka otomatis perkembangan masyarakat masih rendah.

4.7 Mata Pencaharian Penduduk

Kecamatan kubu mempunyai 15 desa, akan tetapi penulis membatasi lokasi penelitian hanya 3 desa karena jumlahnya terlalu banyak. Desa yang penulis jadikan sampel adalah desa Teluk Nilap, Rantau Panjang Kiri, dan Desa Sungai Segajah yang dikategorikan swadaya dan swakarya. Desa-desa ini salah satunya mempunyai penduduk yang cukup banyak . Jumlah penduduk perdesa dengan jumlah penduduk antar Desa bervariasi mulai dari desa yang penduduknya kurang dari 1000 orang sampai pada desa yang penduduknya kurang dari 3000 orang. Adanya kepadatan penduduk disalah satu desa, tepatnya di desa sungai segajah untuk ukuran penduduknya yang relative padat. Karena relative padat sudah waktunya untuk dimekarkan agar pelayanan pada masyarakat dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu.

Table IV.7 Tabel Mata Pencaharian Penduduk 3 (tiga) Desa Kec.Kubu

No	Nama Desa	Buruh	Pertanian	Perkebunan	PNS	Dagang	Lain nya
1	Teluk Nilap	116	59	25	22	15	50
2	Rantau Panjang kiri	68	30	19	29	37	45
3	Sungai Segajah	39	197	48	13	8	64
Jumlah		223	286	92	64	60	159

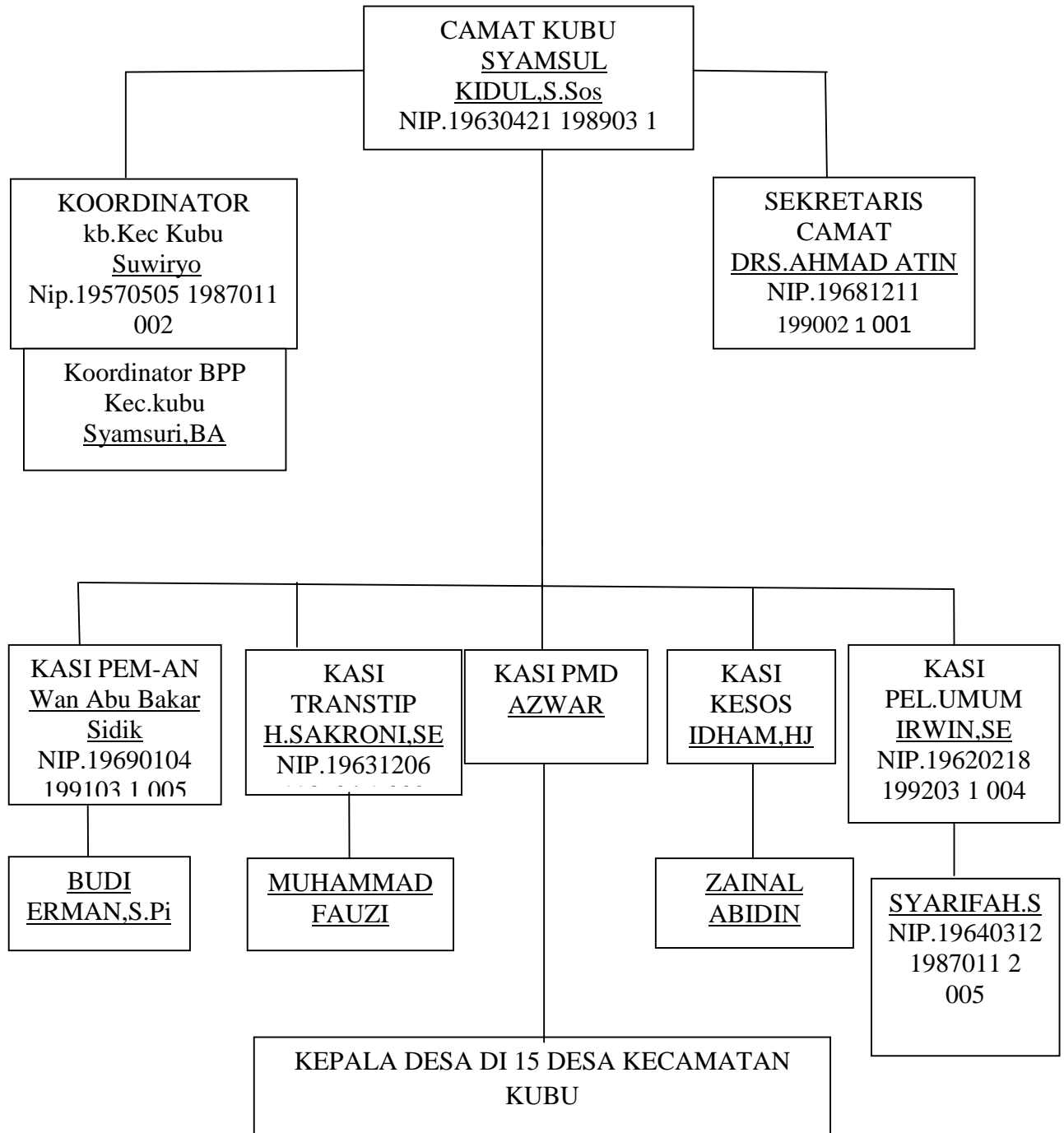
Sumber : Hasil Wawancara Pada Kepala Desa,2012

Tabel diatas menggambarkan mata pencaharian penduduk di desa sungai segajah, rantau panjang kiri dan desa teluk nilap sebagian besar adalah dibidang pertanian, buruh perusahaan pertamina dan sebagian kecil yang lain berdagang, PNS dan lain-lain.

4.8 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan bentuk kerjasama dan kerjasama tersebut berlangsung secara tertentu yang menyebabkan adanya bentuk, berdasarkan aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang tertentu pula. Setiap bentuk mesti ada konfigurasinya yang tertentu dan yang disebabkan oleh sesuatu didalamnya yang disebut dengan struktur.

Gambar IV.1 Struktur Organisasi di Kecamatan Kubu Adalah Sebagai Berikut:



Dari bagan diatas dapat dilihat bahwa bagan organisasi berbentuk lini staf. Pada organisasi ini disamping ada petugas lini (komando) yang langsung melakukan kegiatan pencapaian tujuan, adapula tenaga staf yang memberi bantuan kepada petugas lini untuk melancarkan pencapaian tujuan organisasi ini.

Tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan di atas berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 29 Tahun 2009 adalah:

1. Camat

Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, pada pasal 3 ayat 3 Camat memiliki tugas:

- a. Membina, mengkoordinasikan, dan menyelenggarakan program dan kegiatan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan masyarakat desa/kelurahan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan;
- g. Membina penyelenggaraan pemerintah Desa/Kelurahan;
- h. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;

- i. Membina dan melaksanakan kesekretariatan kecamatan;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat Camat

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam membina mengkoordinasikan dan mengendalikan di bidang administrasi ,perencanaan kegiatan ,monitoring,evaluasi dan pelaporan, urusan umum, kepegawaian ,dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan kegiatan teknis administrasi
- b. Perencanaan kegiatan program kecamatan
- c. Pengkoordinasi tugas administrasi
- d. Pembinaan perangkat kecamatan kelurahan dan kepenghuluan
- e. Pengevaluasi tugas pemerintah kecamatan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam bidang pemerintahan Umum. Meliputi pembinaan administrasi Desa/kelurahan, melaksanakan administrasi kependudukan dan catatan sipil pembinaan kehidupan politik dalam negeri.

Adapun fungsi seksi pemerintahan esuai dengan ayat (1) dalam pasal 6, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan kegiatan urusan pemeintahan
- b. Koordinasi dan sinkronisasi tugas urusan pemerintahan
- c. Pembinaan, evaluasi dan bimbingan urusan pemerintahan;
- d. Pemeriksaan pekerjaan bawahan;
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas

Seksi pemerintahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan seksi pemerintahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyelenggarakan fasilitas pemilihan Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- c. Menyelenggarakan lomba atau penilaian Desa/kelurahan tingkat kecamatan;
- d. Menyelenggarakan fasilitas kerjasama antar Desa /kelurahan dan penyelesaian prselisihan antar Desa/kelurahan;
- e. Manfasilitasi penataan Desa/kelurahan dan penyusunan peraturan desa;
- f. Melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan;
- g. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait;
- h. Memantau ,mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan seksi pemerintahan;
- i. Melaksanakan evaluasi dan memyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi pemerintahan ;

- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh Camat.

4. Seksi Pembangunan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Adapun tugas dari seksi pembangunan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten rokan hilir:

- 1) Seksi pembangunan Masyarakat Desa dan kelurahan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan penyusunan program dan pembinaan pembangunan di Bidang ekonomi pelaksanaan pembangunan fisik produk distribusi serta lingkungan hidup.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal 8, Seksi Pembangunan Masyarakat Desa dan kelurahan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknik di bidang pembangunan masyarakat Desa/kelurahan ;
 - b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pembangunan masyarakat Desa/kelurahan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan masyarakat Desa/kelurahan
 - d. Pelaksanaan tugas lain diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Seksi pembangunan masyarakat desa dan kelurahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan pembangunan masyarakat desa dan kelurahan;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan desa kelurahan di kecamatan;
- c. Merencanakan program kerja pembinaan perekonomian ,produksi dan distribusi di tingkat kecamatan
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintahan maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- e. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintahan maupun swasta;
- f. Melakukan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi verikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan tugas urusan ketentraman dan ketertiban kepada Camat berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibrikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pelayanan Umum

Berdasarkan peraturan daerah kabupaten rokan hilir, tugas dan seksi pelayanan umum adalah sebagai berikut:

1. Seksi pelayanan umum dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam membina, mengkoordinasi, dan melaksanakan tugas dibidang pelayanan umum;
2. Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah:
 - a. Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan pelayanan umum.
 - b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi pelayanan surat-surat keterangan pada bank, pendaftaran pembuatan KTP ,KK,dan surat keterangan lainnya yang diperlukan oleh masyarakat.
 - c. Penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana pelayanan umum dan perizinan.
 - d. Menginventarisir jenis pelayanan yang ada dan dibutuhkan oleh masyarakat untuk dijadikan acuan dalam rangka pelaksanaan pelayanan umum.
 - e. Menginventarisir segala permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan umum dan menyusun rencana kebijakan pemecahannya.
 - f. Menyusun time schedule dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat dengan mencantumkan persyaratan yang dibutuhkan, waktu

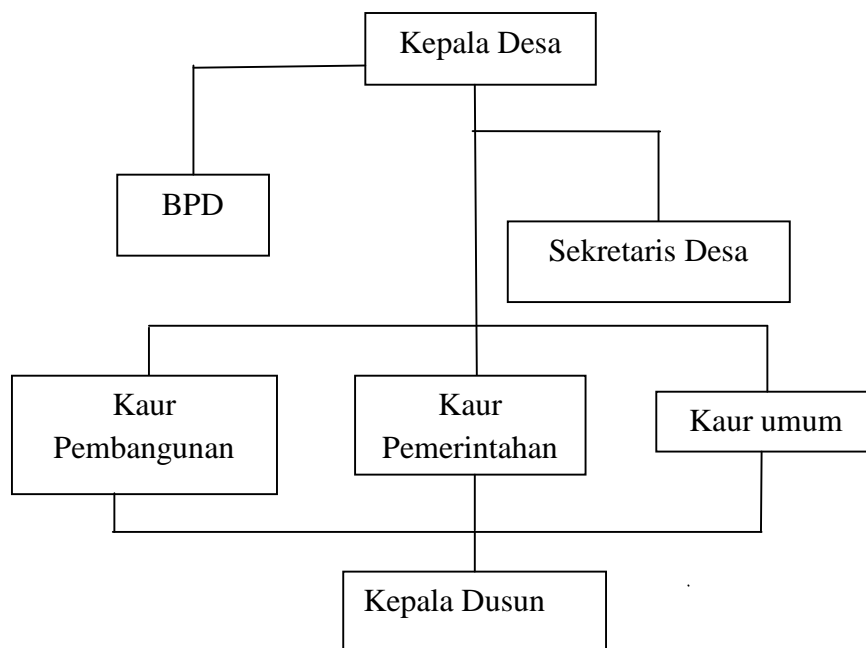
yang diperlukan untuk penyelesaian dan biaya yang dibutuhkan, untuk mewujudkan transportasi yang lebih baik.

- g. Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan petunjuk dan kebijakan pimpinan.

6. Pemerintah Desa

Pemerintahan desa dipimpin oleh seorang kepala desa dan didalam menjalankan tugas-tugas administrasi pemerintahan desa di bantu oleh perangkat desa. Dalam melayani masyarakat, kepala desa menjalin kerja sama dengan Kepala Dusun dan perangkat RT dan RW sebagai lembaga social yang membantu tugas-tugas kepala desa dalam menyebatani pelayanan kepada masyarakat. Adapun struktur pemerintah Desa di salah satu Desa yang saya lihat, berikut ini:

Gambar IV.2 Struktur disalah satu Desa

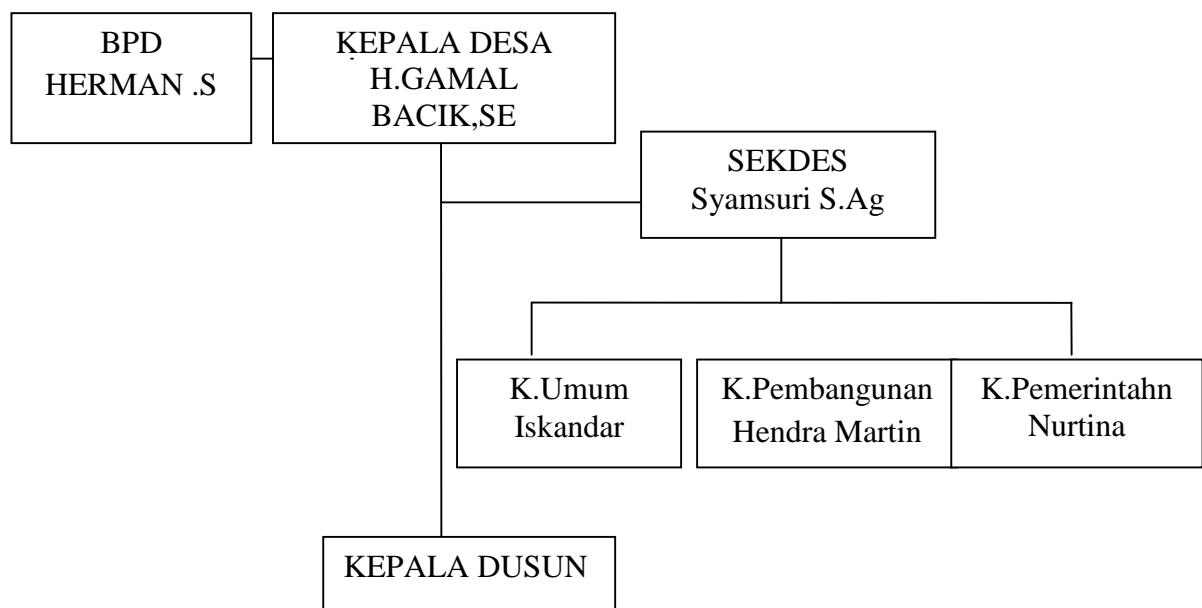


4.9 Struktur Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa terdiri dari pemerintahan desa dan BPD. Sedangkan pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa yang dimaksud terdiri dari sekretaris desa, pelaksana lapangan dan unsure kewilayahan. Pemerintahan desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan berdasarkan kebijakan yang diterapkan bersama BPD.

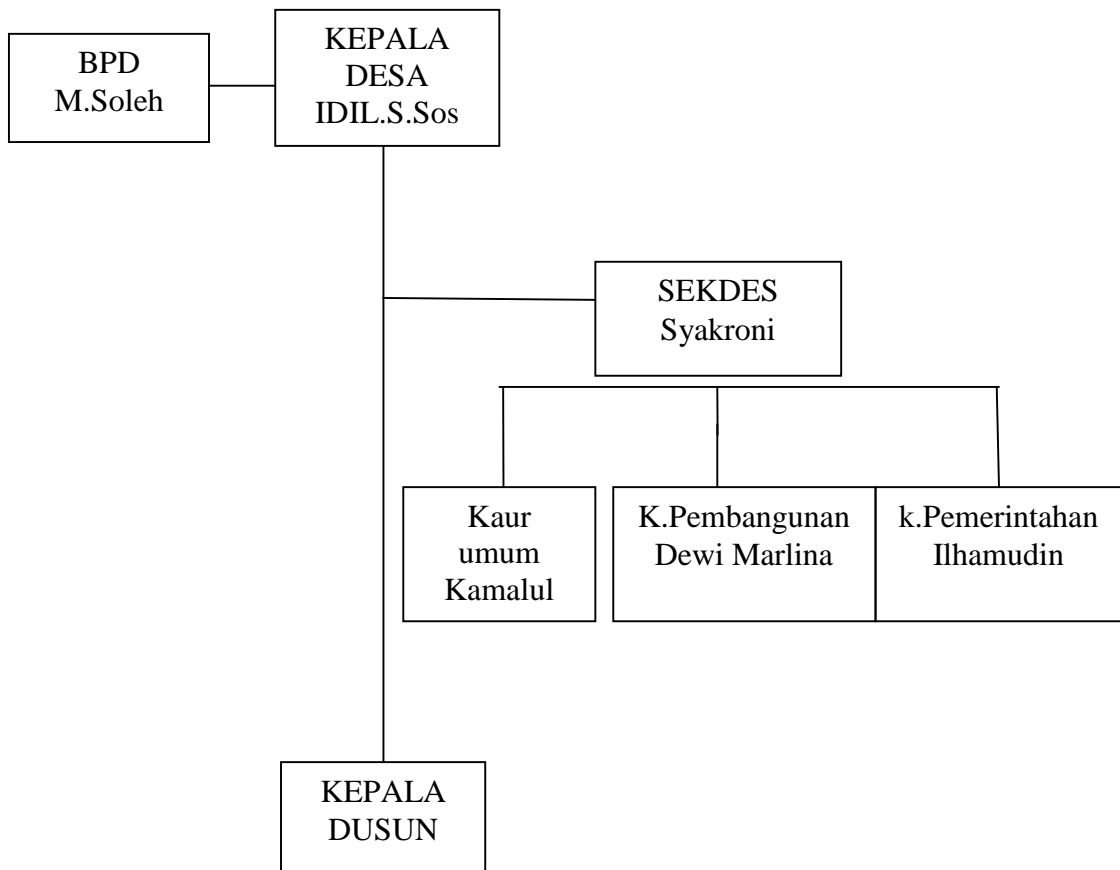
Adapun bagan organisasi pemerintahan teluk nilap adalah:

Gambar IV.3 Struktur organisasi Pemerintahan Desa



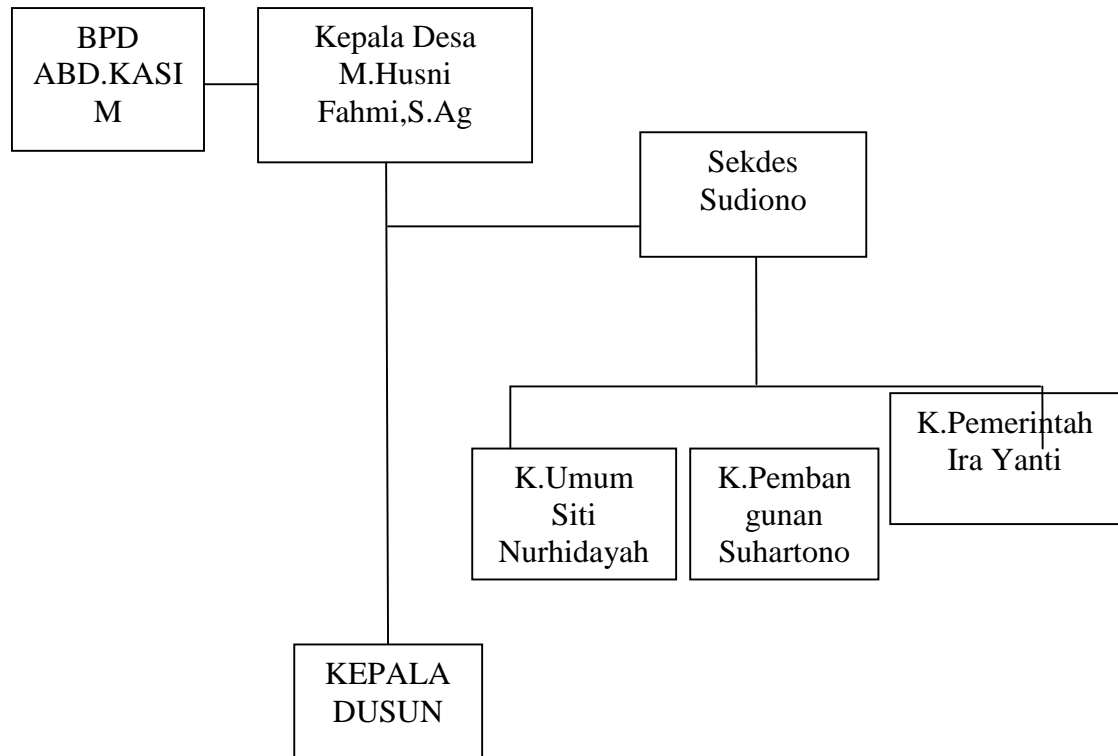
Sumber : Kantor Desa Teluk Nilap

Gambar IV.4 Struktur Organisasi Desa Rantau Panjang Kiri



Sumber : Kantor Desa Rantau Panjang Kiri

Gambar IV.5 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sungai Segajah



Sumber : Kantor Desa Sungai Segajah

Dari bagan di atas dilihat bahwa bagan organisasi berbentuk lini dan staf pada organisasi ini disamping ada petugas lini (komando) yang langsung melakukan kegiatan pencapaian tujuan, ada pula tenaga staf yang memberi bantuan kepada petugas lini untuk melancarkan pencapaian tujuan organisasi

Dari susunan Organisasi pemerintahan Desa dalam Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Pemerintahan Desa terdiri dari:

1. Kepala Desa
2. Perangkat Desa

Perangkat desa sebagaimana yang dimaksud terdiri dari:

1. Sekretaris desa
2. Kepala-kepala urusan

Kepala urusan terdiri dari:

- a. Kepala urusan pemerintahan
- b. Kepala urusan pembangunan
- c. Kepala urusan umum

3. Kepala dusun

Tugas dari kepala Dusun adalah:

- a. Membantu pelaksanaan tugas kaur
- b. Memeriksa hasil pekerjaan dari kaur
- c. Menjaga lingkungan sekitar desa

Tugas dan kewajiban Pemerintahan Desa adalah:

1. Membina kehidupan masyarakat
2. Membina perekonomian
3. Mendamaikan prselisihan masyarakat di Desa
4. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa dan menerapkan sebagai Peraturan Desa bersama BPD,

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:

1. Pelaksana Pembina masyarakat Desa
2. Pelaksana Pembina perekonomian Desa
3. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
4. Pelaksana musyawarah perselisihan masyarakat Desa

5. Penyusunan dan pengajuan Rancangan Peraturan Desa menerapkannya sebagai Peraturan Desa bersama BPD.

Susunan organisasi pemerintah Desa Kevamatan Kubu terdiri dari:

1. *Kepala Desa*

Berdasarkan peraturan Daerah No 29 Tahun 2009 Kabupaten Rokan Hilir dijelaskan tugas Kepala Desa sebagai berikut:

1. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.
2. Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
 - b. Mengajukan rencana peraturan daerah
 - c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
 - d. Menyusun Dan Mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
 - e. Membina Kehidupan masyarakat desa
 - f. Membina perekonomian desa
 - g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
 - h. Mewakili desanya sebagai didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjukan kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang-undangan

- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

2. *Sekretaris desa*

Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretaris Desa. Sekretaris desa mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan:
- b. Mengadakan kegiatan investaris (mencatat, mengawasi dan memelihara) kekayaan desa
- c. Melaksanakan administrasi kependudukan, pembangunan dan kemasyarakatan
- d. Merumuskan Program Kegiatan Kepala Desa
- e. Menyusun rancangan APB Desa
- f. Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasil rapat
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa
- h. Melaksanakan administrasi keuangan

3 *Kepala urusan pemerintahan*

Kepala urusan pemerintahan membantu sekretaris dengan tugas sebagai berikut:

- a. Kegiatan administrasi kependudukan dan catatan sipil
- b. Kegiatan administrasi pertanahan
- c. Pencatatan monografi desa

- d. Kegiatan ketentraman dan ketertiban serta pertanahan sipil
- e. Menyelenggarakan Buku Administrasi Peraturan Desa dan keputusan Desa
- f. Tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3 *Kepala Urusan Pembangunan*

Kepala urusan pembangunan membantu sekretaris desa dengan tugas sebagai berikut:

- a. Kegiatan administrasi pembangunan desa
- b. Pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan desa
- c. Menghimpun, menganalisa dan memelihara potensi desa
- d. Mencatat dan mempersiapkan bahan usulan kegiatan pembangunan desa , dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. *Kepala Urusan Umum*

Kepala urusan umum membantu Sekretaris Desa dengan tugas:

- a. Melaksanakan tata kearsipan pengendalian surat masuk dan surat keluar
- b. Mempersiapkan dan mencatat hasil rapat, persidangan dan naskah lainnya
- c. Memelihara, mendistribusikan dan menyimpan alat-alat tulis dan peralatan kantor
- d. Pelaksanaan ketertiban dan kebersihan kantor dan bangunan lain milik desa
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian aparat desa
- f. Pencatatan investarisasi kekayaan desa
- g. Mempersiapkan penerimaan tamu kedinasan

- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang tidak diurus oleh urusan lainnya.
- i. Tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan.

4.10 Sosial Budaya

Mengenai aspek social budaya yang dimiliki oleh masyarakat desa Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Cukup Banyak, dalam hal ini merupakan Khazanah budaya daerah jawa dibawa dan dikembangkan dari turun temurun oleh masyarakat desa Kecamatan Kubu. Adapun aspek sosial budaya yang sangat berharga diantaranya, Wayang Kulit, Jaran Kepang/Kuda Kepang, dan Perkumpulan Wirid Yasin.

Masyarakat desa yang ada Di Kecamatan Kubu telah lama membudayakan kerja sama dan persaudaraan seperti perkumpulan wirid yasin. Perkumpulan ini bertujuan untuk menghibur masyarakat yang mengalami musibah meninggal dunia dengan cara membaca Surat Yasin bersama-sama.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab hasil penelitian dan pembahasan ini akan memuat data-data yang diperoleh oleh penulis dari hasil penelitian di Kecamatan Kubu mengenai Analisis Tugas Camat Sebagai Kepala Pemerintahan Dalam Melaksanakan Pembinaan Dan Menyelenggarakan Pemerintahan Desa. Penyajian data tersebut diuraikan dalam bentuk deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara menyebarkan kuesioner ,wawancara langsung, dan mengambil refrensi dari buku-buku yang relevan dengan penelitian ini. Setiap jawaban dari pertanyaan dalam kuesioner akan didistribusikan dalam bentuk tabel frekuensi.

Hasil dari penelitian ini antara lain menjelaskan tentang:

1. Jawaban responden mengenai identitas responden.
2. Menjelaskan jawaban responden dari pertanyaan masing-masing sub indikator variabel yang disajikan dalam bentuk tabel.
3. Menjelaskan rekapitulasi jawaban responden dalam setiap indikator variabel.
4. Setelah menganalisis tugas camat sebagai kepala pemerintah dalam melaksanakan pembinaan dan menyelenggaraan pemerintah desa Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir dalam membina administrasi desa.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dari setiap jawaban kuesioner, di bawah ini akan disajikan tabel-tabel yang disertai jawaban responden yang kemudian diinterpretasikan sebagai berikut.

5.1 Identitas Responden

Untuk mengetahui lebih mudah tentang kondisi responden , penulis merasa perlu menjelaskan identitas responden . Oleh karena hal tersebut dapat mempengaruhi objektivitas dan validitas berbagai informasi penelitian yang diberikan para responden sebagai objek penelitian ,yaitu jenis kelamin,umur responden, tingkat pendidikan responden berdasarkan masa kerja.

1. Jenis Kelamin Responden

Adapun jenis kelamin responden dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel V.1 Jenis Kelamin Responden

No	Jenis kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Laki-laki	12	66.7%
2	Perempuan	6	33.3%
Jumlah		18	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian ,2012

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah sampel untuk responden sebanyak 18 orang, yang terdiri dari 12 orang(66.7%), dan perempuan 6 orang (33.3%). Jadi jumlah keseluruhan responden dijadikan sampel kepala desa dan Perangkat desa di tiga desa tersebut adalah 18 orang.

2. Tingkat Umur Responden

Dari hasil penelitian terhadap Kepala Desa ,Sekretaris Desa, Perangkat Desa dapat diketahui jumlah responden berdasarkan usia atau umur , yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.2 Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Umur

No	Tingkat Umur	Frekuensi	Persentase %
1	17-25 Tahun	3	17%
2	26-34 Tahun	8	44%
3	35-42 Tahun	7	39%
Jumlah		18	100

Sumber : Data Olahan Penelitian ,2012

Dari tabel V.2 diatas terlihat bahwa jumlah responden berdasarkan usia atau umur yang paling banyak adalah responden yang berumur 26-34 tahun yakni 8 orang atau 44 % ,responden yang berumur 35-42 tahun yakni 7 orang atau 39% dan responden yang berumur 17-25 tahun yakni 3 orang atau 17%.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa tingkat umur responden sudah cukup dewasa dalam memberikan tanggapan-tanggapannya terhadap pertanyaan dalam kuesioner penelitian ini ,sebab asumsi penulis adalah kedewasaan umur dapat memberikan isyarat terhadap kemampuan dari seseorang dalam menilai dan memutuskan suatu permasalahan dengan jalan pikir yang lebih matang dan lebih bijak, karena umur berhubungan dengan seberapa banyak pengalaman yang mereka peroleh.

3. Tingkat pendidikan Responden

Pendidikan sangat diperlukan dalam pembangunan, karena dengan pendidikanlah sumber daya manusianya akan berkualitas. Untuk mengetahui gambaran dan tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.3 Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1	SMP	2	11
2	SMA	8	44%
3	Diploma	3	17%
4	Sarjana	5	28%
Jumlah		18	100

Sumber : Data Olahan Penelitian ,2012

Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan responden sebagai besar adalah tamatan SMA yang berjumlah 8 orang atau 44% kemudian tamatan sarjana berjumlah 5 orang atau 28% sedangkan yang tamatan SMP berjumlah 2 orang atau 11% dan SD tidak ada. Dengan semakin baiknya tingkat pendidikan responden ,diharapkan jawaban-jawaban yang mereka berikan akan lebih rasional dan objektif.

4. Masa Kerja Responden

Masa kerja seseorang sangat berpengaruh pada tingkat pemahaman terhadap pekerjaannya. Artinya semakin lama seseorang bekerja, maka semakin banyak pengetahuannya pada bidang pekerjaannya. Bila dilihat dari data yang diperoleh dari responden, masa kerja relative lama yaitu 3 tahun. Untuk dapat mengetahui dengan jelas penelitian terhadap analisis tugas camat dalam membina pemerintahan desa dapat diketahui responden berdasarkan masa kerjanya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel V.4 berikut ini:

Tabel V.4 Jumlah Responden Berdasarkan Masa Kerja

No	Masa kerja	Frekuensi	Persentase (%)
1.	1-2 tahun	3	16,6%
2.	3-4 tahun	5	27,7%
3.	5-6 tahun	6	33,3%
4.	Diatas 7 tahun	4	22,2%
Jumlah		18	100

Sumber : Data Olahan Penelitian , 2012

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa masa kerja responden yang terbanyak adalah yang masa kerjanya 7 tahun keatas berjumlah 4 orang atau 22,2% kemudian reponden yang masa kerjanya 5-6 tahun berjumlah 6 orang atau 33,3%, responden yang masa kerjanya 3-4 tahun berjumlah 5 orang atau 27,7% dan responden yang masa kerjanya 1-2 tahun berjumlah 3 orang atau 16,6%.

5.2 Analisis Tugas Camat Sebagai Kepala Pemerintahan Dalam Melaksanakan Pembinaan dan Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, bukan sebagai kepala wilayah. Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah (Nurcholis, 2005:133).

Camat sebagai pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintah desa perlu memberi perhatian pada perangkat desa karena dengan pembinaan kekurangan pengetahuan, kemampnan dan keterampilan aparat desa dapat diperbaiki. Dalam PP No 19 tahun 2008 pasal 21 tentang kecamatan, pemerintah menugaskan camat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam menyelenggarakan pemerintah desa. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut adalah:

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib Administrasi Pemerintahan Desa atau kelurahan.
- b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitas dan konsultasi pelaksanaan Administrasi Desa atau kelurahan.
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa atau lurah.
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Desa atau kelurahan.
- e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa atau kelurahan ditingkat kecamatan.
- f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa atau kelurahan ditingkat Kecamatan kepada Bupati atau Walikota.

Untuk menciptakan hal diatas maka diperlukan suatu konsep pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur pemerintah desa tersebut. Agar dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang diembankan kepadanya, oleh karena itu diperlukan kemampuan dari pada para pemimpin pemerintah untuk dapat melaksanakan suatu bentuk pembinaan kepada pemerintahan desa.

Adapun hasil penelitian penulis mengenai tugas camat sebagai kepala pemerintahan dalam melaksanakan pembinaan dan menyelenggarakan pemerintah desa Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan indikator penelitian yaitu:

1. Melakukan Pembinaan Dan Pengawasan Tertib Administrasi Pemerintah Desa

Adanya pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa yang diberikan Camat kubu di kecamatan kubu kepada kepala desa atau perangkat desa yaitu :

a. Memberikan Pelatihan Tentang Tertib Administrasi Desa

Adapun tanggapan responden tentang tertib administrasi desa oleh Camat dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel V.5 Jawaban Responden Mengenai Pelatihan Tentang Tertib Administrasi Desa

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	4	22%
2	Cukup Baik	7	39%
3	Kurang Baik	7	39%
Jumlah		18	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian 2012

Bila dilihat dari indikator mengenai pelatihan tentang administrasi desa yang diberikan Camat Kubu ternyata 4 orang atau 22% yang jawabannya dikategorikan baik dan 7 orang atau 39% yang dikategorikan cukup baik, kemudian yang menyatakan kurang baik 7 orang atau 39% . Hal ini dapat dinyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang disampaikan oleh Camat mengenai pelatihan tentang tertib administrasi desa dalam kategori cukup baik.

Sehubungan dengan kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Camat pada pemerintah Desa di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir serta

pemahaman mereka tentang pelatihan tertib administrasi desa, dilihat dari penilaian yang diberikan oleh pemerintah desa sebagaimana data berikut ini:

Kegiatan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dalam kurun 3 tahun terakhir ini dilakukan Camat melalui :

Penataran/pelatihan yang dilakukan pada Perangkat Desa Di Kantor Camat sebanyak 2 kali tahun 2009 dan 2010 dengan materi:

- a. Pegenalan tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab Perangkat Pemerintahan Desa.
- b. Pembinaan mentalitas aparat pemerintahan dalam bekerja.
- c. System inventaris asset desa.
- d. Orientasi dan penyegaran pegawai terhadap tugas bidang :
 - Adm. Kependudukan
 - Adm.Umum
 - Adm.Keuangan

(Sumber : Sekretaris Kecamatan Kubu)

Selain melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa, Camat juga memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan.

Adapun alasan responden tentang adanya pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa yang disampaikan oleh Camat ,hal ini tidak sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 29 Tahun 2009 yang seharusnya pelatihan tersebut diadakan dalam jangka waktu 1 tahun sekali atau 1 tahun 2 kali

memberikan pelatihan tentang pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa yang disampaikan oleh Camat tentang apa saja yang harus mereka kerjakan.

Kegiatan yang dilakukan Camat dalam tahunan atau pun bulanan tentang Pembinaan Pemerintah Desa juga belum maksimal ,pembinaan yang dilakukan Camat terhadap administasi pemerintahan desa antara lain adalah dengan memberikan petunjuk dan arahan mengenai pengolahan adminitasi pemerintah desa , meningkatkan pengetahuan, keahlian/keterampilan personil di pemerintah desa, serta mengawasi penyelenggaraan administasi pemerintahan desa di bidang administasi seperti pembinaan tentang administrasi desa yaitu bidang administasi umum, administrasi kependudukan dan administasi keuangan,

Dari hasil tanggapan responden maka hal ini dapat dinyatakan bahwa memahami tentang pelatihan tertib administrasi desa dapat dikategorikan cukup baik Hal ini dikarenakan pembinaan dan pengawasan yang disampaikan oleh Camat kepada perangkat desa sebagian mereka masih banyak yang belum memahami tentang pelatihan tertib administrasi yang dilakukan oleh pihak kecamatan. Dan pelatihan tentang tertib administrasi desa menurut penulis adalah bagaimana cara mengerjakan suatu pekerjaan itu sesuai dengan peraturan dan prosedur berlaku menurut Peraturan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir Nomor 29 Tahun 2009.

b. Memberikan Prosedur Kerja Tentang Administrasi Desa.

Adapun tanggapan responden mengenai prosedur kerja tentang adminitrasi desa pada perangkat desa dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.6 Jawaban Responden Mengenai Prosedur Kerja Tentang Administrasi Desa

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	5	28%
2	Cukup Baik	9	50.0%
3	Kurang Baik	4	22%
Jumlah		18	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2012

Bila dilihat dari indikator pembinaan dan pengawasan dari aspek adanya prosedur kerja tentang administrasi desa yang diberikan Camat Kubu ternyata 5 orang atau 28% yang jawabannya dikategorikan baik dan 9 orang atau 50.0% yang dikategorikan cukup baik, kemudian yang menyatakan kurang baik 4 orang atau 22%.

Hasil tanggapan responden diatas menunjukkan bahwa dari aspek adanya prosedur kerja pemerintah desa dikategorikan cukup baik. Dalam hal ini harus lebih diperhatikan dari kesalahan yang mereka lakukan dalam menangani prosedur kerja Administrasi Pemerintahan Desa disini yang seharusnya buku – buku anggaran desa ,buku kas umum, buku kas pembantu yang seharusnya dilaporkan periga bulannya juga belum dilaksanakan sebagaimana mestinya hasil dari hasil wawancara kepada salah satu Perangkat Desa,

“Jarangnya pembinaan dari kecamatan yang memantau kinerja dari perangkat desa sehingga tugas tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, tugas administrasi desa tidak berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diinginkan, karna mereka hanya mengerjakan tugas tersebut jika sudah ditegur oleh atasan jika tidak maka tugas tersebut akan dibiarkan menumpuk, seperti buku adminstrasi kependudukan, dan administrasi keuangan, adminisrasi umum.”(Wawancara: 2012)

- c. Memberikan metode/cara kerja administrasi desa.

Adapun tanggapan responden mengenai Camat memberikan pembinaan dan pengawasan tentang metode/cara kerja administrasi desa:

Tabel V.7 Jawaban Responden Mengenai Camat Memberikan Pembinaan Dan Pengawasan Tentang Metode/Cara Kerja Administrasi Desa

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	3	17%
2	Cukup Baik	9	50%
3	Kurang Baik	6	33%
Jumlah		18	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2012

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa memberikan pembinaan dan pengawasan tentang metode/cara kerja administrasi, yang menyatakan baik 3 orang atau 17% dan 9 orang atau 50% yang dikategorikan cukup baik, kemudian yang menyatakan kurang baik 6 orang atau 33%.

Dari hasil tanggapan responden mengenai Camat memberikan pembinaan dan pengawasan tentang metode/cara kerja administrasi desa dikategorikan cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa dalam memberikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat desa yang disampaikan Camat sesuai dengan cara kerja administrasi desa. Namun, disamping itu Perangkat Desa dibagian tertentu harus bisa menyelesaikan tugas tersebut meskipun pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Camat belum secara optimal sesuai dengan yang dijadwalkan, yang seharusnya rata-rata sekali dalam 6 bulan, dan itu hanya dilakukan dalam 2 tahun sekali sehingga membutuhkan waktu yang lama. Hasil wawancara dengan salah

seorang perangkat desa yang penulis jadikan sampel yaitu desa rantau panjang kiri,

“Mengatakan bahwa 2 tahun belakangan ini camat tidak pernah memberikan pembinaan dan pengawasan kepada kami, jika ada suatu pekerjaan administrasi kependudukan ataupun data yang lain yang harus diserahkan kepada pihak kecamatan, maka pihak kecamatan hanya mengirimkan surat rekom yang mengharuskan kami melakukan suatu pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi desa”.(Wawancara: 2012)

d. Memberikan Pengawasan Tentang Adm Desa Terhadap Perangkat Desa

Adapun tanggapan responden mengenai Camat memberikan pembinaan dan pengawasan tentang administrasi desa terhadap perangkat desa:

Tabel V.8 Jawaban Responden Mengenai Camat Memberikan Pembinaan dan Pengawasan Tentang Administrasi Desa Terhadap Perangkat Desa

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	7	39%
2	Cukup Baik	9	50%
3	Kurang Baik	2	11%
Jumlah		18	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2012

Bila dilihat dari indikator pembinaan dan pengawasan dari aspek adanya administrasi terhadap perangkat desa yang diberikan Camat Kubu ternyata 7 orang atau 39% yang jawabannya dikategorikan baik dan 9 orang atau 50.0% yang dikategorikan cukup baik, kemudian yang menyatakan kurang baik 2 orang atau 11%.

Hasil tanggapan responden diatas menunjukkan bahwa dari aspek adanya pembinaan dan pengawasan administrasi desa terhadap perangkat desa

dikategorikan cukup baik. Demikian juga seharusnya buku-buku anggaran Desa, buku kas umum, buku kas pembantu yang seharusnya diisi dan dilaporkan pada Camat setiap pertiga bulanya juga belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Fenomena yang terlihat tidak tertatannya Administrasi Pemerintahan Desa hampir disemua desa yang ada di Kecamatan Kubu ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orang” Kepala Desa dan Perangkat Desa “diperoleh informasi

“Bahwa mereka tidak terlalu mengerti tata cara pengisian buku Administrasi Keuangan Desa tersebut. Tidak diisinya buku-buku desa dan tidak dilaporkannya kegiatan Administrasi Desa ke Kecamatan secara berkala mengindikasikan belum tertatannya Administrasi Desa dengan baik”.(Wawancara: 2012)

Kegiatan yang dilakukan Camat dalam tahunan atau pun bulanan tentang Pembinaan Administrasi Desa juga belum ada, sedangkan untuk laporan rekapitalisasi desa yang ada dikecamatan kubu Kabupaten Rokan Hilir juga tidak terlaksana dengan baik. Dari hasil wawancara tersebut mereka hanya mengatakan kalau kegiatan yang dilakukan camat untuk membina pemerintahan desa Camat hanya memberikan tugas/undangan/rekomendasi lainnya, Kalaupun memang ada hanya berbentuk rapat.

2. Memberikan bimbingan, supervise, fasilitas, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa atau kelurahan.

Bimbingan diberikan untuk membantu individu memahami dan menggunakan secara luas kesempatan pendidikan, jabatan, dan pribadi yang mereka miliki atau yang dapat mereka kembangkan dan sebagai satu bentuk

bantuan yang sistematik dimana seorang atau kelompok dibantu untuk dapat memperoleh penyesuaian yang baik terhadap pekerjaan dan terhadap kehidupan.

Supervisi adalah salah satu bentuk pengawasan atasan yaitu camat selaku yang mengawasi dan perangkat desa selaku bawahan yang diawasi, supervise ini penting dilakukan guna untuk tercapainya tujuan organisasi, apalagi perangkat desa adalah bawahan yang terkadang memiliki kekurangan dari segi pengalaman atau bahkan pengetahuan sehingga camat selaku menjalankan fungsi pengawasan dalam aspek supervise perlu memberikan pengarahan atau konsultasi mengenai administrasi pemerintah desa. Adapun sub indikator dari bimbingan, supervise, fasilitas dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa antara lain:

- a. Memberikan bimbingan agar bekerja dengan baik dan memberitahu akibat dari kesalahan dalam pekerjaan tersebut.

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai bimbingan agar bekerja dengan baik memberitahu akibat kesalahan dalam pekerjaan administrasi desa dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.9 Jawaban Responden Mengenai Camat Memberikan Bimbingan Agar Bekerja Dengan Baik Dan Memberitahu Akibat Kesalahan Dalam Pekerjaan Administrasi Desa

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	3	17%
2	Cukup Baik	8	44%
3	Kurang Baik	7	39%
Jumlah		18	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2012

Bila dilihat dari indikator memberikan bimbingan, supervise, fasilitas , dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dari aspek adanya memberi yang diberikan Camat Kubu ternyata 3orang atau 17% yang jawabannya dikategorikan baik dan 8 orang atau 44% yang dikategorikan cukup baik, kemudian yang menyatakan kurang baik 7orang atau 39%.

Hasil tanggapan responden diatas menunjukkan bahwa yang menyatakan melakuka bimbingan agar bekerja denga baik dan memberitahu akibat kesalahan dalam pekerjaan administrasi desa cukup baik. Dengan alasan responden bahwa mereka yang menangkap isi dari bimbingan yang dilakukan camat, sebagian perangkat desa tidak menghadiri acara tersebut saat melakukan bimbingan, sehingga banyaknya perangkat desa tidak mengerti akan tugas dan fungsinya sebagai aparat pemerintah desa.

Namun ,disisi lain menurut pengamatan penulis dilapangan menunjukkan bahwa belum terlihatnya adanya pemerintah desa yang menjalankan tugas administrasi tersebut sesuai dengan bidang pekerjaannya.

“Hasil wawancara dengan salah satu perangkat desa pada tgl 9 february 2012 pelaksanaan bimbingan,suprvisi,dan konsultasi tersebut hanya didiskusikan kepada kepala desa bukan pada perangkat desa sehingga sebagian besar mereka mengatakan mereka tidak bisa memahami hasil dari bimbingan administrasi desa tersebut sehingga tugas administasi desa tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak kecamatan”.(Wawancara: 2012)

- b. Memberikan pengarahan langsung yang bersifat motivasi agar dapat bekerja dengan baik dan optimal.

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pengarahan langsung yang bersifat motivasi agar dapat bekerja dengan baik dan benar dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.10 Jawaban Responden Mengenai Pengarahan Langsung Yang Bersifat Motivasi Agar Dapat Bekerja Dengan Baik Dan Benar

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	4	22.2%
2	Cukup Baik	8	44.4%
3	Kurang Baik	6	33.3%
Jumlah		18	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2012

Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 18 orang responden yang pernah bimbingan oleh camat kepada pemerintah desa ternyata penilaian responden relatif bervariasi.

Bila dilihat dari indikator bimbingan dari aspek pengarah langsung yang bersifat motivasi yang jawabannya baik , 4 orang atau 22.2% dan 8 orang atau 44.4% yang dikategorikan cukup baik, kemudian yang menyatakan kurang baik 6 orang atau 33.3%.

Hasil tanggapan responden diatas menunjukkan bahwa pengarah langsung yang bersifat motivasi dalam kategori cukup baik. Dengan alasan responden bahwa kepala desa/perangkat desa diberikan bimbingan oleh camat dalam bentuk pengarah, penataran. Dan dalam hal ini bahwa camat memberikan dukungan atau penilaian dari suatu pekerjaan yang dilakukan pemerintah desa langsung yang bersifat memotivasi agar perangkat desa bias mengerjakan tugas tersebut dengan baik dan benar. hasil wawancara penulis pada tanggal 9 februari 2012 Camat mengatakan,

“Bahwa dalam melakukan pembinaan, supervise, dalam hal ini camat berusaha memotivasi semangat kerja para perangkat desa terutama bagi perangkat desa yang bekerja dengan baik dapat di promosikan sesuai dengan jabatannya atau memberikan suatu nilai plus terhadap kepala desa/perangkat

desa yang benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya sebaik-baiknya”(Wawancara: 2012)

- c. Memberikan fasilitas yang memadai untuk pelaksanaan pemerintahan desa.

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai fasilitas yang memadai untuk pelaksanaan pemerintahan desa dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.11 Jawaban Responden Mengenai Fasilitas Yang Memadai Untuk Pelaksanaan Pemerintahan Desa

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	3	17%
2	Cukup Baik	11	61%
3	Kurang Baik	4	22%
Jumlah		18	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2012

Bila dilihat dari indikator bimbingan, supervise, dari aspek mengenai adanya fasilitas yang memadai untuk pelaksanaan pemerintah desa yang jawabannya baik 3 orang atau 17% dan 11 orang atau 61% yang dikategorikan cukup baik, kemudian yang menyatakan kurang baik 4 orang atau 22%.

Dari hasil tanggapan responden mengenai adanya fasilitas yang memadai untuk pelaksanaan pemerintah desa dalam kategori cukup baik. Hal ini sebagian besar mereka mengatakan bahwa fasilitas yang ada dipemerintahan desa masih dikatakan kurang, seperti tentang adanya computer hanya ada 3 komputer dan lainnya berupa mesin ketikan. Namun, jika untuk memberikan hasil yang optimal dalam pelaksanaan pemerintah desa maka diperlukan kemampuan yang memadai baik dari segi kemampuan aparat pelaksanaan itu sendiri maupun dari fasilitas

pendukung, termasuk kondisi pekerjaan yang dilaksanakan, sehingga akan dapat diarahkan kepada adanya kesatuan tindakan.

d. Memberikan Peluang Untuk Berkonsultasi Tentang Pelaksanaan Adm.Des

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai peluang untuk berkonsultasi tentang pelaksanaan administrasi desa dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel V.12 Jawaban Responden Mengenai Memberikan Peluang Untuk Berkonsultasi Tentang Pelaksanaan Administrasi Desa

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	5	28%
2	Cukup Baik	8	44%
3	Kurang Baik	5	28%
Jumlah		18	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian ,2012

Bila dilihat dari indikator bimbingan, supervisi, dari aspek mengenai peluang untuk berkonsultasi tentang pelaksanaan administrasi desa yang menyatakan baik 5 orang atau 28% dan 8 orang atau 44% yang dikategorikan cukup baik, kemudian yang menyatakan kurang baik 5 orang atau 28%.

Dari hasil tanggapan responden mengenai pemerintah Desa yang memberikan peluang untuk berkonsultasi tentang pelaksanaan administrasi desa dalam kategori cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa bisa bertanya dan bisa mengasi pendapat pada saat diskusi dilaksanakan, seperti administrasi kependudukan, administrasi keuangan desa, buku keputusan kepala desa, dan administrasi yang berkaitan dengan pemerintahan desa. Namun, disisi lain bahwa tidak semua perangkat desa yang mau bertanya pada saat diadakan diskusi dengan Camat, mereka hanya bertanya pada saat tugas tersebut akan

dikerjakan, apabila mereka tidak bisa memahami tugas tersebut maka mereka bertanya pada kepala desa dan kaur-kaur yang memahami tentang tugas yang mereka lakukan.

3. Melakukan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Kepala Desa Atau Lurah

Pembinaan diberikan untuk membantu individu memahami dan menggunakan secara luas kesempatan pendidikan, jabatan, dan pribadi yang mereka miliki atau dapat mereka kembangkan dan sebagai satu bentuk untuk dapat memperoleh penyesuaian yang baik terhadap pekerjaan dan terhadap kehidupan.

Camat sebagai pemimpin kecamatan, dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dituntut melakukan pembinaan dan pengawasan ditujukan tentang bagaimana mengambil keputusan dengan baik dan benar kemudian memberikan pelatihan dan mengoreksi kesalahan dalam pelaksanaan tugas tersebut.

Sedangkan kepala desa adalah merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Adapun sub indikator dari pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa atau lurah antara lain yaitu:

- a. Memberikan pembinaan tentang cara pengambilan keputusan yang baik dan benar

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pembinaan tentang cara pengambilan keputusan yang baik dan benar dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.13 Jawaban Responden Mengenai Pembinaan Tentang Cara Pengambilan Keputusan Yang Baik Dan Benar

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	2	11%
2	Cukup Baik	9	50%
3	Kurang Baik	7	39%
Jumlah		18	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2012

Bila dilihat dari indikator pembinaan dan pengawasan dari aspek adanya pembinaan mengenai tentang cara pengambilan keputusan yang baik dan benar yang menyatakan baik 2 orang atau 11% yang jawabannya dikategorikan baik dan 9 orang atau 50 % yang dikategorikan cukup baik, kemudian yang menyatakan kurang baik 7orang atau 39%.

Dari hasil tanggapan responden mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa tentang cara pengambilan keputusan yang baik dan benar dalam kategori cukup baik. Adapun alasan responden mengatakan cukup baik yaitu bahwa perangkat desa melakukan pembinaan tentang cara pengambilan keputusan yang baik dan benar tersebut hanya pada saat tertentu, seharusnya sebagai kepala pemerintah harus bisa mengambil suatu keputusan yang baik agar suatu pekerjaan yang ada dipemerintah desa bisa berjalan dengan benar sesuai dengan tujuan yang diinginkan, seperti yang terjadi bahwa pembinaan tersebut tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, yang seharusnya sebulan sekali tetapi pembinaan tersebut hanya dilakukan pada saat perangkat desa tidak bisa melakukan suatu pekerjaan yang berkaitan dengan administrasi pemerintah desa tersebut.

b. Memberikan Pelatihan Tentang Cara Pembuatan Perdes

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pelatihan tentang cara pembuatan perdes dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.14 Jawaban Responden Mengenai Tentang Cara Pembuatan Perdes

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	3	17%
2	Cukup Baik	10	56%
3	Kurang Baik	5	28%
Jumlah		18	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2012

Bila dilihat dari indikator pembinaan dan pengawasan dari aspek adanya pembinaan mengenai tentang cara pembuatan perdes yang menyatakan baik 3 orang atau 17% dan 10 orang atau 56 % yang dikategorikan cukup baik, kemudian yang menyatakan kurang baik 5 orang atau 28%.

Adapun alasan responden mengatakan cukup baik mengenai pelatihan tentang cara pembuatan perdes dalam hal ini dikategorikan cukup baik. Adapun alasan responden mengatakan cukup baik dalam hal ini pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dalam membuat peraturan desa seperti administrasi desa, kependudukan dimana kependudukan ini yaitu mendata penduduk , keuangan , dan tertib penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun dalam hal ini pemerintah desa harus bisa menyusun program pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh pihak kecamatan dan melakukan konsultasi dengan atasan koordinasi dengan sekretaris baik langsung maupun tidak langsung .

c. Mengkoreksi Kesalahan-Kesalahan Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Pekerjaan

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.15 Jawaban Responden Mengenai Tentang Mengkoreksi kesalahan-Kesalahan Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Pekerjaan

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	4	22%
2	Cukup Baik	7	39%
3	Kurang Baik	7	39%
Jumlah		18	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2012

Bila dilihat dari indikator pembinaan dan pengawasan dari aspek adanya mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan yang menyatakan baik 4 orang atau 22% dan 7 orang atau 39 % yang dikategorikan cukup baik, kemudian yang menyatakan kurang baik 7 orang atau 39%.

Adapun alasan responden mengatakan cukup baik mengenai mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam melakukan pekerjaan dalam hal ini dikategorikan cukup baik. Adapun alasan responden mengatakan cukup baik yaitu pembinaan tersebut yang dibina adalah kepala desa, jika terjadi suatu kesalahan maka sebelum dilaporkan kepihak kecamatan terlebih dahulu mengkoreksi dari suatu peraturan mengenai administrasi pemerintahan desa. Namun dalam hal ini menurut penulis diharapkan bahwa kepala desa harus bisa memberikan

pengarahan kepada perangkat desa dan membagi tugas tersebut sesuai dengan bidang dan tugasnya agar tidak terjadi suatu kesalahan dalam pekerjaan.

- d. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan.

Untuk mengetahui tanggapan responden memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.16 Jawaban Responden Mengenai Tentang Memperbaiki kesalahan-Kesalahan Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Pekerjaan

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	3	16.7%
2	Cukup Baik	12	66.7%
3	Kurang Baik	3	16.7%
Jumlah		18	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2012

Bila dilihat dari indikator pembinaan dan pengawasan dari aspek adanya tentang memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan yang menyatakan baik 3 orang atau 16.7% dan 12 orang atau 66.7 % yang dikategorikan cukup baik, kemudian yang menyatakan kurang baik 3 orang atau 16.7%.

Adapun alasan responden mengatakan cukup baik mengenai memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam pekerjaan dalam hal ini dikategorikan cukup baik. Adapun alasan responden mengatakan cukup baik dengan adanya memperbaiki kesalahan yang terjadi dalam melakukan pekerjaan, hal ini kepala desa yang

dibina oleh pihak kecamatan, pembinaan tersebut dilakukan pihak kecamatan terkadang hanya berbentuk rapat atau surat rekom/arahan dari camat mengenai tugas yang harus dikerjakan. Namun jika terjadi suatu kesalahan maka kepala desa harus bisa mengatasi dengan benar agar suatu pekerjaan tersebut bisa sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

4. Melakukan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Perangkat Desa atau Kelurahan

Pembinaan diberikan untuk membantu individu memahami dan menggunakan secara luas kesempatan pendidikan, jabatan, dan pribadi yang mereka miliki atau dapat mereka kembangkan dan sebagai satu bentuk untuk dapat memperoleh penyesuaian yang baik terhadap pekerjaan dan terhadap kehidupan.

Camat sebagai pemimpin kecamatan, dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dituntut melakukan pembinaan dan pengawasan ditujukan tentang bagaimana mengambil keputusan dengan baik dan benar kemudian memberikan pembinaan, pengawasan, mengenai administrasi desa, tentang tugas dan tanggung jawab. Sedangkan perangkat desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya. Salah satu perangkat desa adalah Sekretaris Desa, yang diisi dari Pegawai Negeri Sipil. Adapun sub indikator dari pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa atau lurah antara lain yaitu:

- a. Memberikan Pembinaan Tentang Pengetahuan Mengenai Administrasi

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pembinaan tentang pengetahuan mengenai administrasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.17 Jawaban Responden Mengenai Memberikan Pembinaan Tentang Pengetahuan Mengenai Administrasi Desa

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	8	44%
2	Cukup Baik	3	17%
3	Kurang Baik	7	39%
Jumlah		18	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian , 2012

Bila dilihat dari indikator pembinaan dan pengawasan dari aspek adanya memeberikan pembinaan tentang pengetahuan administrasi desa yang menyatakan baik 8 orang atau 44% dan 3 orang atau 17 % yang dikategorikan cukup baik, kemudian yang menyatakan kurang baik 7 orang atau 39%.

Adapun alasan responden mengatakan bahwa memberikan pembinaan tentang pengetahuan mengenai administrasi desa dikategorikan baik. Dengan adanya pembinaan yang diberikan camat kepada perangkat desa maka perangkat desa bisa memahami isi dari pembinaan tentang pengetahuan camat tersebut guna untuk mempermudah mengerjakan tugas-tugas perangkat desa yang diberikan oleh camat sesuai dengan permasalahan yang diberi pembinaan kepada seluruh perangkat desa, menurut responden pembinaan tersebut tidak sesuai dengan yang dijadwalkan. Namun, dengan adanya pembinaan tentang pengetahuan mengenai administrasi ada juga sebagian perangkat desa yang bertanya dalam pembinaan tersebut tentang bagaimana cara mengisi buku pemerintahan desa dan apa saja yang harus dipahami dalam menjalankan tugas sebagai kepala desa (perangkat desa).

b. Perangkat Desa Diberi Pelatihan Tentang Tugas Dan Kewajibannya

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai perangkat desa diberi pelatihan tentang tugas dan kewajibannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.18 Jawaban Responden Mengenai Perangkat Desa Diberi Pelatihan Tentang Tugas Dan Kewajibannya

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	2	11%
2	Cukup Baik	7	39%
3	Kurang Baik	9	50%
Jumlah		18	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2012

Bila dilihat dari indikator Pelatihan dari aspek adanya pelatihan tentang tugas dan kewajibannya ternyata 2 orang atau 11% yang jawabannya dikategorikan baik dan 7 orang atau 39% yang dikategorikan cukup baik, kemudian yang menyatakan kurang baik 9 orang atau 50%. Dalam hal ini pelatihan tentang tugas dan kewajibannya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dikategorikan kurang baik.

Dalam hal ini responden beralasan bahwa pelatihan tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, karna pelatihan tersebut dilaksanakan apabila perangkat desa sudah tidak bisa lagi mengerjakan tugas tersebut dan hanya pada moment-moment tertentu sehingga tugas perangkat desa tidak bekerja maksimal sesuai dengan yang diinginkan.

Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan yang diberikan camat kepada perangkat desa tidak sesuai yang dijadwalkan, namun menurut penulis agar

pemerintah desa dapat sesuai dengan rencana kerja dan menghasilkan kerja yang baik, maka camat perlu memberikan pelatihan tentang tugas dan kewajiban perangkatnya dengan memberikan pelatihan sesuai dengan yang dijadwalkan , dengan demikian keahlian atau skill dari pemerintah desa tersebut dapat ditingkatkan.

c. Perangkat Desa Diberi Pengarahan Untuk Meningkatkan Pengetahuan,Keterampilan Dan Keahlian

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai perangkat desa diberi pengarahan untuk meningkatkan pengetahuan,keterampilan dan keahlian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.19 Jawaban Responden Mengenai Perangkat Desa Diberi Pengarahan Untuk Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Dan Keahlian

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	4	22%
2	Cukup Baik	9	50%
3	Kurang Baik	5	28%
Jumlah		18	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian ,2012

Bila dilihat dari indikator pembinaan dan pengawasan dari aspek adanya pengarahan untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan dan keahlian ternyata 4 orang atau 22% yang jawabannya dikategorikan baik dan 9 orang atau 50% yang dikategorikan cukup baik, kemudian yang menyatakan kurang baik 5 orang atau 28%. Dalam hal pembinaan tersebut dikategorikan cukup baik.

Adapun alasan responden mengatakan cukup baik mengenai perangkat desa diberi pembinaan meningkatkan pengetahuan tersebut benar dilaksanakan oleh

Camat sehingga dapat membantu pekerjaan perangkat desa dalam menyelesaikan kerja yang diberikan oleh camat. Dengan adanya pembinaan tersebut dapat membantu perangkat desa mengetahui bagaimana tehnik dalam mengerjakan pembukuan administrasi dan perangkat desa juga mendapatkan pembekalan dari hasil diskusi tersebut khususnya dibidang administrasi pemerintahan desa. berikut hasil wawancara penulis pada salah seorang kepala desa pada tgl 9 februari 2012, sebagai berikut:

“Secara umum maka dapat dikatakan bahwa telah adanya pembinaan yang dilakukan camat sesuai dengan bidang kerja masing-masing untuk menambah pengetahuan dengan melakukan pelatihan kepada perangkat desa yang mempunyai pendidikan rendah. Agar pemerintah desa dapat mengerjakan tugas tersebut sesuai dengan yang diinginkan camat maka camat perlu meningkatkan pengetahuan perangkatnya dengan memberikan pelatihan dan keahlian dibidang masing-masing kerja administrasi tersebut sesuai dengan skill yang dimilikinya”. (Wawancara: 2012)

- d. Memberikan pengawasan kepada perangkat desa mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab administrasi desa

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang memberikan pengawasan kepada perangkat desa mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab administrasi desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.20 Jawaban Responden Mengenai Pengawasan Kepada Perangkat Desa Mengenai Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Administrasi Desa

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	6	16.7%
2	Cukup Baik	7	66.7%
3	Kurang Baik	5	16.7%
Jumlah		18	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2012

Bila dilihat dari indikator pembinaan dan pengawasan dari aspek adanya pengawasan kepada perangkat desa mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab administrasi desa ternyata 6 orang atau 16.7% yang jawabannya dikategorikan baik dan 7 orang atau 66.7% yang dikategorikan cukup baik, kemudian yang menyatakan kurang baik 5 orang atau 16.7%. Dalam hal pembinaan tersebut dikategorikan cukup baik.

Adapun alasan responden mengatakan cukup baik mengenai pengawasan kepada perangkat desa mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab administrasi desa dalam menangani administrasi yang ada di pemerintah desa perangkat desa harus bisa melaksanakan tugas tersebut dengan benar agar administrasi tersebut bisa terarah dan sesuai dengan yang diinginkan . Namun, perangkat desa juga harus bisa menyelesaikan tugas tersebut dengan adanya pengawasan dari pihak kecamatan mengenai administrasi kependudukan, administrasi umum, administrasi keuangan. Hasil wawancara dengan perangkat desa ,

“Camat mempunyai peranan yang sangat penting, karena dalam hirarki pemerintahan kecamatan merupakan salah satu lembaga supra desa, yang mana salah satu tugasnya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa/kelurahan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan”.(Wawancara: 2012)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, selain menjalankan perannya sebagai pembina dan pengawas pemerintahan desa, Camat juga melaksanakan berbagai urusan administrasi yang ada di pemerintahan desa.

5. Melaporkan Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa Atau Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Kepada Bupati Walikota

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa dan laporan pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan pemerintah desa mengenai administrasi ,kemudian mengenai pembinaan pegawai agar tugas tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan target yang diinginkan. Adapun sub indicator dari pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa atau lurah antara lain yaitu:

a. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.21 Jawaban Responden Mengenai Tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	6	33%
2	Cukup Baik	8	44%
3	Kurang Baik	4	22%
Jumlah		18	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian ,2012

Bila dilihat dari indikator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dari aspek adanya evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang menyatakan baik 6 orang atau 33% dan 8 orang atau 44 % yang dikategorikan cukup baik, kemudian yang menyatakan kurang baik 4 orang atau 22%.

Adapun alasan responden mengatakan cukup baik mengenai evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa dalam hal ini dikategorikan cukup baik. Adapun alasan responden mengatakan cukup baik dengan adanya pengawasan dan penyelenggaraan pemerintah desa setelah Jalannya suatu proses pemerintahan sangat membutuhkan adanya monitoring dan evaluasi. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban, dengan adanya evaluasi dapat dijadikan tolak ukur guna memperbaiki kinerja di masa mendatang. Dilaterbelakangi tujuan tersebut, Pemerintah Kecamatan kubu Kabupaten Rokan Hilir berinisiatif menggelar kegiatan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelatihan peningkatan SDM bagi aparat pemerintah yang berada di desa.

Camat juga berkewajiban melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan pada tingkat kecamatan, agar dapat mengetahui sampai sejauh mana tugas-tugas pemerintahan dalam urusan administrasi , pelayanan dan pembangunan terhadap masyarakat yang telah dilaksanakan.

b. Laporan secara tertulis

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang laporan secara tertulis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.22 Jawaban Responden Mengenai Tentang Laporan Secara Tertulis

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	3	17%
2	Cukup Baik	8	39%
3	Kurang Baik	7	44%
Jumlah		18	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian ,2012

Bila dilihat dari indikator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dari aspek adanya laporan secara tertulis yang menyatakan baik 3 orang atau 17% dan 8 orang atau 39 % yang dikategorikan cukup baik, kemudian yang menyatakan kurang baik 7 orang atau 44%.

Adapun alasan responden mengatakan cukup baik mengenai laporan secara tertulis mengenai pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa dalam hal ini dikategorikan cukup baik. Adapun alasan responden mengatakan cukup baik yaitu dengan adanya pembinaan dan pengawasan tentang pemerintah desa ditingkat kecamatan dalam hal ini laporan tertulis mengenai tentang administrasi kependudukan seperti buku penduduk, buku kartu keluarga, administrasi umum seperti buku keputusan desa, buku ekspedisi, buku tentang tanah desa, dan administrasi keuangan, setelah data tersebut terlaksana dengan baik maka pemerintah desa harus melaporkan setiap pertiga bulannya kepada pihak kecamatan.

c. Laporan Secara Lisan

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang laporan secara lisan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.23 Jawaban Responden Mengenai Tentang Laporan Secara Lisan

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	3	17%
2	Cukup Baik	11	61%
3	Kurang Baik	4	22%
Jumlah		18	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2012

Bila dilihat dari indikator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dari aspek adanya laporan secara tertulis yang menyatakan baik 3 orang atau 17% dan 11 orang atau 61 % yang dikategorikan cukup baik, kemudian yang menyatakan kurang baik 4 orang atau 22%.

Adapun alasan responden mengatakan cukup baik mengenai laporan secara lisan mengenai pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa dalam hal ini dikategorikan cukup baik. Adapun alasan responden mengatakan cukup baik dengan adanya laporan secara tulisan mengenai administrasi pemerintahan desa tersebut maka pihak kecamatan harus lebih memperhatikan jika masih ada terlihat adanya indikasi ataupun masalah dalam laporan tulisan tersebut maka bisa diperjelas dengan lisan, agar laporan tersebut tugas kepada atasan tersebut bisa sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

d. Kecepatan dan Target Pelaksanaan Tugas

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang kecepatan dan target pelaksanaan tugas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.24 Jawaban Responden Mengenai Tentang Kecepatan Dan Target Pelaksanaan Tugas

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	6	33%
2	Cukup Baik	9	50%
3	Kurang Baik	3	17%
Jumlah		18	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2012

Bila dilihat dari indikator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dari aspek adanya kecepatan dan target pelaksanaan tugas yang menyatakan baik 6 orang atau 33% dan 9 orang atau 50 % yang dikategorikan cukup baik, kemudian yang menyatakan kurang baik 3 orang atau 17%.

Dalam penyelenggaraan pembangunan pemerintah desa dalam mencapai target kurang baik dalam mencapai tugas tersebut. Namun, disisi lain menurut pengamatan penulis dilapangan menunjukkan bahwa target pelaksanaan pembangunan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak kecamatan dan masyarakat desa. menginventarisir permasalahan, hasil pembangunan, peningkatan partisipasi masyarakat, swadaya dan gotong royong masyarakat dengan menginventarisir data dari desa/kelurahan agar di ketahui tingkat perkembangan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan.

5.3 Rekapitulasi Jawaban Responden Dalam Setiap Indikator Variabel

Adapun hasil rekapitulasi dari jawaban responden pada Pemerintah Desa Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, dapat dilihat dalam tabel rekapitulasi berikut ini:

1. Mengenai Adanya Pembinaan Dan Pengawasan Tertib Administrasi Desa

Tabel V.25 Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Adanya Pembinaan Dan Pengawasan Tertib Administrasi Desa kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir

No	Indikator	Jawaban 18 Responden		
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik
1	Memberikan pelatihan tentang tertib administrasi desa	4	7	7
2	Memberikan prosedur kerja tentang administrasi desa	5	9	4
3	Memberikan metode/cara kerja administrasi desa	3	9	6
4	Memberikan pengawasan tentang administrasi desa terhadap perangkat desa	7	9	2
Skor		19(3)	34(2)	19(1)
Jumlah		57	68	19
Jumlah Skor		144		
Interval skor		120-167(Cukup Baik)		

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2012

Dari tabel diatas,dapat diketahui bahwa 4 sub indikator yang diteliti dari pembinaan dan pengawasan tertib administasi desa tanggapan responden yang menyatakan Baik berjumlah 57 ,kemudian yang menyatakan Cukup berjumlah 68, dan yang menyatakan Kurang Baik berjumlah 19 .

Kemudian bedasarkan penjumlahan dari 4 sub indikator yang diteliti, maka dapat diketahui bahwa indikator pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dalam menyelenggarakan tugas camat sebagai kepala pemerintah dalam melaksanakan pembinaan pemerintahan desa kecamatan kubu mendapat jumlah skor 144 dan dinyatakan dalam kategori “Cukup Baik”.

2. Memberikan Bimbingan Supervisi, Fasilitas Dan Konsultasi Pelaksanaan Administrasi Desa

Tabel V.26 Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Adanya Bimbingan Supervisi, Fasilitas Dan Konsultasi Pelaksanaan Administrasi Desa kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir

No	Indikator	Jawaban 18 Responden		
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik
1	Memberikan bimbingan agar bekerja dengan baik dan memberitahu akibat dari kesalahan dalam pekerjaan tersebut	3	8	7
2	Memberikan pengarahan langsung yang bersifat motivasi agar dapat bekerja dengan baik dan optimal	4	8	6
3	Memberikan fasilitas yang memadai untuk pelaksanaan pemerintah desa	3	11	4
4	Memberikan peluang untuk berkonsultasi tentang pelaksanaan administrasi desa	5	8	5
Skor		15(3)	35(2)	22(1)
Jumlah		45	70	22
Jumlah Skor		137		
Interval Skor		120-167 (Cukup Baik)		

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2012

Dari tabel diatas,dapat diketahui bahwa 4 sub indikator yang diteliti dari indikator bimbingan ,supervisi, fasilitas dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa, tanggapan responden yang menyatakan Baik berjumlah 45 ,kemudian yang menyatakan Cukup Baik berjumlah 70, dan yang menyatakan Kurang Baik berjumlah 22 .

Kemudian bedasarkan penjumlahan dari 4 sub indikator yang diteliti, maka dapat diketahui bahwa indikator memberikan bimbingan ,supervisi, fasilitas dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa menyelenggarakan tugas camat sebagai

kepala pemerintah dalam melaksanakan pembinaan pemerintahan desa kecamatan kubu mendapat jumlah skor 137 dinyatakan dalam kategori “Cukup Baik”,

3. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Kepala Desa Atau Kelurahan

Tabel V.27 Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Adanya Melakukan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Kepala Desa Atau Kelurahan Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir

No	Indikator	Jawaban 18 Responden		
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik
1	Memberikan pembinaan tentang cara pengambilan keputusan yang baik dan benar.	2	9	7
2	Memberikan pelatihan tentang cara pembuatan perdes.	3	10	5
3	Mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan .	4	7	7
4	Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan.	3	12	3
Skor		12(3)	38(2)	22(1)
Jumlah		36	76	22
Jumlah Skor		134		
Interval Skor		120-167 (Cukup Baik)		

Sumber: Data Olahan Penelitian. 2012

Dari tabel diatas,dapat diketahui bahwa 4 sub indikator yang diteliti dari indikator melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa , tanggapan responden yang menyatakan Baik berjumlah 36 ,kemudian yang menyatakan Cukup Baik berjumlah 76, dan yang menyatakan kurang baik berjumlah 22 .

Kemudian berdasarkan penjumlahan dari 4 sub indikator yang diteliti, maka dapat diketahui bahwa indikator melakukan pembinaan pengawasan terhadap kepala desa dalam menyelenggarakan tugas camat sebagai kepala pemerintah dalam melaksanakan pembinaan pemerintahan desa kecamatan kubu mendapat jumlah skor 134 dan dinyatakan dalam kategori “Cukup Baik”.

4. Melakukan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Perangkat Desa Atau Kelurahan

Tabel V.28 Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Adanya Melakukan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Perangkat Desa Atau Kelurahan Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir

No	Indikator	Jawaban 18 Responden		
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik
1	Memberikan pembinaan tentang pengetahuan mengenai administrasi desa	8	3	7
2	Perangkat desa diberi pelatihan tentang tugas dan kewajibannya.	2	7	9
3	perangkat desa diberikan pengarahan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan keahlian.	4	9	5
4	Memberikan pengawasan kepada perangkat desa mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab administrasi desa	6	7	5
Skor		20(3)	26(2)	26(1)
Jumlah		60	52	26
Jumlah Skor		138		
Interval Skor		120-167 (Cukup Baik)		

Sumber: Data Olahan Penelitian. 2012

Dari tabel diatas,dapat diketahui bahwa 4 sub indikator yang diteliti dari indikator pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa tanggapan responden yang menyatakan Baik berjumlah 60 ,kemudian yang menyatakan Cukup Baik berjumlah 52, dan yang menyatakan kurang baik berjumlah 26 .

Kemudian berdasarkan penjumlahan dari 4 sub indikator yang diteliti, maka dapat diketahui bahwa indikator melakukan pembinaan pengawasan terhadap perangkat desa dalam menyelenggarakan tugas camat sebagai kepala pemerintah dalam melaksanakan pembinaan pemerintahan desa kecamatan kubu mendapat jumlah skor 138 dan dinyatakan dalam kategori “Cukup Baik”,

5. Melaporkan Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Atau Kelurahan Ditingkat Kecamatan Kepada Bupati/Walikota

Tabel V.29 Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Adanya Melaporkan Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Atau Kelurahan Di Tingkat Kecamatan kepada Bupati/ Walikota Kabupaten Rokan Hilir

No	Indikator	Jawaban 18 Responden		
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik
1	Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa	6	8	4
2	Laporan secara tertulis	3	8	7
3	Laporan secara lisan	3	11	4
4	Kecepatan dan target pelaksanaan tugas	6	9	3
Skor		18(3)	36(2)	18(1)
Jumlah		54	72	18
Jumlah Skor		144		
Interval Skor		120-167 (Cukup Baik)		

Sumber: Data Olahan Penelitian. 2012

Dari tabel diatas,dapat diketahui bahwa 4 sub indikator yang diteliti dari indikator melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawsan penyelenggaraan pemerintah desa, tanggapan responden yang menyatakan Baik berjumlah 54, kemudian yang menyatakan Cukup Baik berjumlah 72, dan yang menyatakan kurang baik berjumlah 18.

Kemudian bedasarkan penjumlahan dari 4 sub indikator yang diteliti, maka dapat diketahui bahwa indikator melakukan pembinaan pengawasan terhadap perangkat desa dalam menyelenggarakan tugas camat sebagai kepala pemerintah dalam melaksanakan pembinaan pemerintahan desa kecamatan kubu mendapat jumlah skor 144 dan dinyatakan dalam kategori “Cukup Baik”,

Kemudian untuk mengetahui secara keseluruhan hasil dari analisis tugas camat sebagai kepala pemerintah dalam melaksanakan pembinaan dan menyelenggaraan pemerintah desa Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel V.30 Rekapitulasi Seluruh Indikator Variabel Penelitian Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir

No	Sub Variabel	Jawaban Responden		
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik
1	Pembinaan dan Pengawasan tertib administrasi desa	57	68	19
2	Memberikan bimbingan , supervisi,fasilitas dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa	45	70	22
3	Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa atau kelurahan	36	76	22
4	Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa atau kelurahan.	60	52	26
5	Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawsan penyelenggaraan pemerintah desa atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota	54	72	18
Skor		252	338	107
Jumlah skor : Jumlah Sub Variabel		697 : 5		
Jumlah Skor Rata-rata		139.4		
Kategori		150-209(Cukup Baik)		

Sumber: Data Olahan Penelitian. 2012

Dari tabel diatas,dapat diketahui bahwa dari 5 indikator yang diteliti , tanggapan responden yang menyatakan Baik jumlah skornya adalah 252 ,kemudian yang menyatakan Cukup Baik jumlah skornya adalah 338 dan yang menyatakan Kurang Baik jumlah skornya adalah 107 .

Dengan demikian secara umum dapat diketahui bahwa analisis tugas camat sebagai kepala pemerintah dalam melaksanakan pembinaan dan menyelenggaraan pemerintah desa kecamatan kubu mendapat skor rata-rata 139.4 dan dinyatakan dalam kategori “Cukup Baik”.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian penulis dengan judul Analisis Tugas Camat sebagai kepala pemerintah dalam melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintah desa Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, penulis mengambil kesimpulan bahwa tugas camat adalah sebagai kewajiban untuk dilaksanakan, dimana keberhasilan tugas seorang kepala pemerintah adalah sejauh mana dia berhasil mencapai tujuan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka melaksanakan kewajiban untuk membina pemerintah desa .

Adapun analisis tugas camat sebagai kepala pemerintahan dalam melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat berdasarkan Melalui PP No. 19 Tahun 2008 pasal 21 tentang Kecamatan, Pemerintah menugaskan Camat sebagai Kepala Pemerintahan untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Dengan demikian secara umum dapat diketahui bahwa analisis tugas camat sebagai kepala pemerintah dalam melaksanakan pembinaan dan menyelenggarakan pemerintahan desa kecamatan kubu mendapat skor rata-rata 139,4 dan dinyatakan dalam kategori “ Cukup Baik”.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang telah dikemukakan di atas , maka kiranya penulis dapat memberikan saran sebagai pertimbangan dan mungkin dapat berguna bagi pihak kecamatan maupun pemerintah desa yang ada dikecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

Hendaknya dalam melakukan bimbingan ,supervisi , fasilitas dan konsultasi pihak Kecamatan harus bisa memberikan bimbingan kepada pemerintah desa dengan cara memberikan pengarahan langsung yang bersifat memotivasi agar pemerintah desa tersebut bisa melakukan tugasnya dengan optimal. Pihak kecamatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa berupa pembinaan tentang cara pembuatan peraturan desa dengan baik, mengkoordinasi tugas desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Secara umum,melakukan pembinaan tentang pemerintah desa tentang bagaimana cara melakukan administrasi tentang desa yang berupa administasi umum, administrasi kependudukan dan keuangan, bisa terlaksana sesuai yang diinginkan oleh pihak kecamatan , dengan cara memberikan pengetahuan terhadap perangkatnya, dan dengan cara melaporkan administrasi tersebut sesuai dengan peraturan dari pihak kecamatan, dan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan tersebut agar bisa berjalan dengan baik tentang pelaksanaan pemerintahan desa agar bisa melayani dan mengkoordinasi tugas desa tersebut maka pihak kecamatan harus melakukan pembinaan terhadap pemerintah desa agar efektif dan sesuai dengan tujuan.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Otonomi Daerah

a. Otonomi

Yaitu memberikan kemungkinan kepada pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah yang tingkatnya lebih atas untuk minta bantuan kepada pemerintah daerah ataupun pemerintahan daerah yang tingkatnya lebih rendah didalam menyelenggarakan tugas-tugas atau kepentingan-kepentingan yang tidak termasuk kedalam urusan rumah tangga daerah yang diminta bantuan tersebut (Ermaya Suradinata, 2006 : 42).

Dalam Penyelenggaraan otonomi daerah, ada dua produk hukum yang dapat dibuat oleh suatu daerah, yaitu:

1. Peraturan Daerah(Perda)
2. Peraturan Kepala Daerah.

Peraturan Daerah (Perda) adalah kewenangan membuat peraturan daerah (perda), merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD, untuk penyelenggaraan otonomi yang dimiliki oleh provinsi/kabupaten/kota, serta tugas pembantuan. Perda pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,

dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah . Perda yang dibuat oleh satu daerah, tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan baru mempunyai kekuatan mengikat setelah diundangkan dengan dimuat dalam lembaran daerah.

Dalam melaksanakan kebijakan pembangunan dan Otonomi Daerah yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah terus perlu dilakukan perkembangan wilayah pemerintahan dan pembangunan. Ini berarti diperlukan dinamisasi terus-menerus dengan alternatif-alternatif kebijakan yang dibutuhkan, pengembangan selanjutnya dapat didasarkan kepada panca konsep manajemen pemerintahan publik, yaitu:

1. Kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
2. Sinergi antara berbagai sub sistem-sub sisten manajemen pemerintahan publik.
3. Azas *cost-benefit* yang berimbang.
4. Abdi Negara yang ditranspormasikan menjadi abdi masyarakat.
5. Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pengambilan keputusan secara bertanggung jawab panca konsep manajemen publik tersebut berorientasi pada kepentingan masyarakat dan ada keterpaduan antara kebijakansanaan otonomi daereah (Ermaya Suradinata, 2006 : 45-45).

Ada beberapa hal yang mendasar dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut antara lain, sebagai pendorong masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa, dan kreatifitas, meningkatkan

pran serta, partisipasi masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Prinsip-Prinsip Pemberian Otonomi Daerah Menurut Deddy S (2002) adalah :

1. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilakukan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah.
2. Pelaksanaan Otonomi Daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
3. Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah Kabupaten dan Kota, sedangkan Otonomi Daerah provinsi merupakan Otonomi yang terbatas.
4. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus sesuai dengan konstitusi Negara sehingga tetap terjaga hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antara daerah.
5. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan karenanya dalam daerah Kabupaten dan Kota tidak ada lagi wilayah administrasi.
6. Demikian pula dikawasan-kawasan khusus yang dibina pemerintah atau pihak lain seperti badan otorita, kawasan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan pertambangan, kawasan pariwisata dan sebagainya berlaku ketentuan peraturan daerah otonomi.
7. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan peran dan fungsi legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislatif, fungsi pengawasan, fungsi anggaran atau penyelenggaraan pemerintah daerah.

8. Pelaksanaan atas dekonsentrasi diletakkan pada daerah Propinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu yang dilempahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah.
9. Pelaksanaan atas tugas membantu memungkinkan, tidak hanya dari pemerintah Kepala Daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah Kepala Desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta Sumber Daya Manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan.

2.2 Kecamatan

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, bukan sebagai kepala wilayah. Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah (Nurcholis, 2005:133).

Camat sebagai salah satu Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berperan sebagai pelayanan masyarakat. Berdasarkan pasal 1 ayat (a) UU No.43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian RI, PNS adalah setiap warga Negara RI telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut pasal 2 ayat (2) PNS terdiri dari:

- a. Pegawai Negeri Sipil Pusat
- b. Pegawai Negeri Daerah

c. Disamping Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksudkan dalam ayat:

1) Pejabat yang berwenang dalam mengangkat tidak tetap.

Dan dalam pasal 3 dijelaskan bahwa pegawai negeri sebagai aparatur Negara yang bertugas melayani masyarakat profesional, adil dan jujur dalam menyelenggarakan tugasnya serta bersikap netral dan menjamin kenetralannya tersebut.

Camat sebagai pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintah desa perlu memberi perhatian pada perangkat karena dengan pembinaan kekurangan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan aparat desa dapat diperbaiki. Menurut Nawawi pembinaan ini dilakukan dengan:

1. Memberikan, menjelaskan dan memperbaiki pemerintah agar pegawai melakukan kegiatan bekerja dengan menggunakan metode atau cara bekerja dan sarana yang tepat.
2. Memberi petunjuk tentang pelaksanaan suatu prosedur, penggunaan metode, penggunaan alat, menyusun rencana kerja melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan beban kerja masing-masing dan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan.
3. Melaksanakan pembinaan personil dengan memberikan kesempatan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, keahlian, kesejahteraan, pemberian motivasi, intrinsik dan ekstrinsik, pembinaan disiplin, moral dan semangat kerja, peningkatan tanggung jawab dan lain-lain. Misalnya memberikan kesempatan mengikuti kursus-kursus, penataran (in-service training), pendidikan dan latihan, memberikan penghargaan, ujian, hadiah dan lain-lain.

4. Memberikan kesempatan ikut berpartisipasi dengan menyumbangkan tenaga dan pikiran berdasarkan kreatifitas dan inisiatif masing-masing, baik mengenai struktur organisasi, kebijakan, prosedur kerja, perencanaan, pencatatan dan pelaporan serta upaya-upaya pembinaan personi, maupun dalam mewujudkan inovasi dalam menggunakan metode guna meningkatkan produktifitas dari segi kualitas dan kuantitasnya.
5. Memberikan koreksi terhadap personil yang keliru atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku, agar timbul kesadaran dari dalam dirinya sendiri motivasi dan usaha untuk memperbaikinya secara tidak dipaksa. Koreksi itu dimaksudkan untuk menimbulkan motivasi memperbaiki dan meningkatkan prestasi, yang memungkinkan perkembangan karier masing-masing dimasa depan (Nawawi.1994:111)

Pemerintahan Daerah meliputi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam Pemerintahan Kabupaten terdapat Kecamatan, hal ini lebih lanjut ditegaskan dalam pasal 126 (1) dari UU No.32 tahun 2004 yang mengatakan “Kecamatan dibentuk diwilayah Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah”. Selanjutnya pada pasal 126 (2) dikatakan “kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagai kewenangan Bupati/Walikota untuk menangani sebagai urusan Otonomi Daerah. Lebih lanjut kedudukan Camat dalam Pemerintahan ditegaskan lagi melalui pasal 14 (2) PP No. 19 tahun 2008 tentang kecamatan yang mengatakan camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/walikota melalui Sekretaris Daerah.

Melalui PP No. 19 Tahun 2008 pasal 21 tentang Kecamatan, Pemerintah menugaskan Camat sebagai Kepala Pemerintahan untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. Adapun kegiatan-kegiatan pembinaan tersebut meliputi:

1. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib Administrasi Pemerintahan Desa atau kelurahan.
2. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitas dan konsultasi pelaksanaan Administrasi Desa atau kelurahan.
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa atau lurah.
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Desa atau kelurahan.
5. Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa atau kelurahan ditingkat kecamatan.
6. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa atau kelurahan ditingkat Kecamatan kepada Bupati atau Walikota.

Dijelaskan bahwa pegawai negeri sebagai aparatur Negara yang bertugas melayani masyarakat profesional, adil dan jujur dalam menyelenggarakan tugasnya serta bersikap netral dan menjamin kenetralannya tersebut.

Maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan desa : pemerintahan desa sebagai alat pemerintahan ialah satuan organisasi terendah pemerintah (RI) yang berdasarkan azas dekonsentrasi ditempatkan dibawah dan

bertanggung jawab langsung kepada pemerintah wilayah kecamatan yang bersangkutan(Ndraha taluziduhu,1991:15)

Dalam peraturan pemerintah No.72 tahun 2005 tentang desa pasal 98 ayat 2 disebutkan bahwa kabupaten/kota dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan. Dalam pasal 1 ayat 15 peraturan pemerintah No.72 tahun 2005 tentang desa disebutkan bahwa pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian,pengembangan,bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi pelaksanaan pemerintah desa,supervisi, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Selanjutnya disebutkan dalam pasal 102 bahwasanya pembinaan dan pengawasan Camat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan, meliputi:

- a. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- b. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- c. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- d. Memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa;
- e. Memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
- f. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa
- g. Memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- h. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;

- i. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- j. Memfasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- k. Memfasilitasi pelaksanaan masyarakat desa
- l. Memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- m. Memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan ke lembaga kemasyarakatan; dan
- n. Memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

Selanjutnya Namawi (1995:60) pembinaan dilakukan dengan memberikan contoh-contoh yang baik kepada bawahannya tentang bagaimana berbuat dan melaksanakan tugas-tugas yang sesuai dengan pekerjaannya, sehingga tugas tersebut dikerjakan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Sedangkan pendapat ahli lain mengatakan bahwa pembinaan untuk tercapainya hasil kerja yang baik diperlukan beberapa ketentuan, yaitu:

- a. Adanya bimbingan dari atasan
- b. Pemberian motivasi dari atasan kepada bawahan.
- c. Adanya kesempatan untuk mengembangkan karir, dalam hal ini adalah pemberian pendidikan dan latihan kerja.
- d. Memberikan penghargaan (Santoso S,1988:291).

2.3 Pengertian Pelaksanaan Tugas

Tugas adalah sebagai kewajiban untuk dilaksanakan, dimana keberhasilan tugas seorang kepala wilayah adalah sejauh mana dia berhasil mencapai tujuan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka melaksanakan kewajiban.**Haw Widjaja (2003:25) .**

Pelaksanaan tugas adalah realisasi dari apa yang telah direncanakan atau ditetapkan sebelumnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. W.J.S. Poerwadarminta (1994:97)

Tugas adalah sesuatu yang wajib di kerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan yang merupakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang atau organisasi (**kamus Besat Bahasa Indonesia Edisi Ke III 2002:1215**)

Dalam pelaksanaan tugas tentu saja tidak berdiri dengan sendirinya. Pelaksanaan tugas tidak terletak pada sistematis pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab, dan hubungan kerja. Tetap faktor manusia harus memiliki kemampuan dan kesungguhan kerja dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diletakkan diatas pundaknya.

Tugas Pokok dan Fungsi Camat sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Camat mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan.
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- g. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan.
- h. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan atau kelurahan.

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas adalah seberapa banyak pekerjaan yang dapat dicapai dan diharapkan dari tiap-tiap pegawai, kelancaran suatu tugas atau pekerjaan pada suatu organisasi secara tepat dan baik harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan berjalan lancar
2. Tidak terjadinya penundaan

3. Pekerjaan diselesaikan tepat pada waktunya.

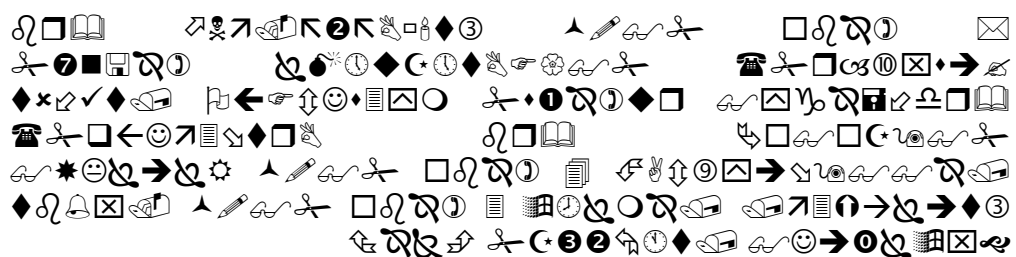
2.4 Pengertian Pemerintah

Pengertian pemerintah secara etimologi berarti “badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu negara” kemudian juga dapat diartikan “pemerintah” berarti perihal, cara perbuatan urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi. Ada empat dasar yang terkandung didalamnya yaitu sebagai berikut :

1. Ada dua pihak, yaitu pihak pemerintah yang disebut pemerintah dan pihak yang diperintah disebut masyarakat.
2. Pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan legitimasi untuk mengatur dan mengurus rakyatnya.
3. Pihak yang diperintah memiliki keharusan untuk taat kepada pemerintah yang sah.
4. Antara pihak yang memerintah dengan pihak yang diperintah terdapat hubungan timbal balik baik vertikal maupun horizontal.

Dalam mengelola pemerintah yang baik dan benar, pemerintah hendaknya jangan hanya sebagai penjaga malam yang memerintah ketertiban tetapi jangan lupa juga dengan ketentraman dan kesejahteraan masyarakat. Jadi, janganlah hanya mampu berkuasa tetapi juga mampu untuk melayani. Oleh karena itu disebut sebagai pemerintah yang baik dan benar atau dengan kata lain *Good Government* dan *Cleate Government*. (Inu Kencana, 2003 : 134)

Konsep pemerintah berarti konsep yang mengatur dan memimpin masyarakat. Pemimpin yang baik akan melahirkan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan terlepas dari pengaruh korupsi, kolusi dan nepotisme. Pemimpin memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masyarakat dan juga tanggung jawab kepada Allah SWT sebagai pemegang amanah. Hal ini sebagai mana yang difirmankan Allah SWT dalam surat An-Nisaa' ayat 58 yang berbunyi :



Artinya : *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pelajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”*. (An-Nisaa' : 58)

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kepemimpinan pemerintah yang baik akan mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah SWT, jika penyelenggaraan pemerintah dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan amanah yang dilimpahkan. Pemimpin merupakan Imam bagi masyarakat, untuk itu perlu adanya pemimpin yang memiliki profesionalitas dari orang-orang yang dipimpinnya, sehingga menjadikan suatu daerah tersebut menjadi daerah yang aman dan sejahtera.

Dijelaskan bahwa pegawai negeri sebagai aparatur Negara yang bertugas melayani masyarakat profesional, adil dan jujur dalam menyelenggarakan tugasnya serta bersikap netral dan menjamin kenetralannya tersebut.

Maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan desa : pemerintahan desa sebagai alat pemerintahan ialah satuan organisasi terendah pemerintah (RI) yang berdasarkan azas dekonsentrasi ditempatkan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada pemerintah wilayah kecamatan yang bersangkutan(Ndraha taluziduhu,1991:15)

Dalam Penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, wajib melibatkan semua aparatur pemerintahan yang terkait. Oleh karena itu dalam pencapaian tujuan tersebut perlu dilakukan pendekatan multifungsional. Artinya bahwa setiap persoalan harus ditinjau dari berbagai fungsi aparatur yang terkait, baik antara instansi ditingkat daerah.

Sehubungan dengan itu, baik dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan, kegiatan aparatur pemerintahan perlu dipadukan, diserasikan dan diselaraskan untuk mencegah timbulnya tumpang tindih, pembenturan, kesimpangsiuran dan atau kekacauan. Oleh karena itu, koordinasi, pemberdayaan dan Pembinaan Kepada Pemerintahan Desa harus dilakukan.

2.5 Pemerintah Daerah

Menurut sedarmayanti (2004:9) pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, yang memiliki tugas pokok yang mencakup:

1. Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan Umum
3. Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

4. Melaksanakan Ketertiban Dunia, Perdamaian Abadi dan Keadilan Sosial.

Terselenggaranya *good governance* merupakan persyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab ,serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.(Sedarmayanti 2004:10).

Menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak,wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah . sedangkan peraturan daerah selanjutnya disebut perda adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota.

Dari pengertian diatas, dapatlah diketahui bahwa pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah merupakan daerah yang diberikan hak Otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangga Daerah.

2.6 Otonomi Desa

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling konkrit.

Penyelenggaraan pemerintahan Desa menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan didukung Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 telah memberikan keluangan dan kesempatan bagi Desa dan memerdayakan masyarakat Desa. Masyarakat Desa dapat mewujudkan masyarakat yang mandiri (Otonomi Desa). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang pedoman penyelenggaraan pemerintahan Desa dan kelurahan ada beberapa pertimbangan, yaitu :

- a. Bahwa dalam rangka mendukung pemberdayaan masyarakat dan keberhasilan pembangunan Desa dan Kelurahan, perlu upaya penguatan, kelembagaan, peningkatan motivasi dan swadaya gotongroyong masyarakat di Desa dan Kelurahan.
- b. Bahwa untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan Desa dan Kelurahan, secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan.

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan peraturan Menteri Dalam Negeri tentang perlombaan Desa dan Kelurahan.

Ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437); dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang pertimabangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438).

Otonomi Desa merupakan atonomi asli, bulat dan utuh serta bukan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh Desa tersebut (Haw Widjaja, 2003 : 165).

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintahan daerah dalam mewujudkan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab di era reformasi dan desentralisasi pemerintahan dalam melakukan penataan kewengan, organisasi perangkat daerah, penataan relokasi personil, sebagai tindak lanjut Undang-undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-undang No. 25 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintahan No. 84 Tahun (HAW Widjaja, 2005 : 7-8).

2.7 Pemerintah Desa

Desa adalah satuan administrasi pemerintahan terendah dengan hak otonomi berbasis asal usul dan adat istiadat. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan desa harus tetap terintegrasi dalam subsistem administrasi daerah

dan sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. Untuk menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan desa tetap terintegrasi dalam subsistem administrasi daerah dan sistem pemerintahan nasional maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa. Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintahan kabupaten/kota kepada desa agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan tujuan, yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat. (Hanif Nurcholis, 2011:153-154).

Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggaraan pemerintah desa.

1. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa.

2. Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

3. Alokasi Dana Desa

Dana Alokasi Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

5. Pembinaan

Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervise, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam Undang-Undang Otonomi Daerah yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Agar dapat memahami Pemerintahan Desa secara menyeluruh, maka terlebih dahulu harus dipahami tentang Desa terutama ditinjau dari aspek ekonominya, hal ini disebabkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah memperbaiki kedudukan Desa sesuai dengan asal usulnya yang semula diatur secara seragam dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa pengaturan Desa akan tetap melalui peraturan daerah dengan kewajiban mengakui hak asal usul Desa tersebut.

Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Perangkat Desa, istilah Kepala Desa dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya Desa setempat.

2.7.1 Administrasi Desa

Administrasi berasal dari bahasa latin *Administrare*, yang berarti melayani , membantu dan memenuhi. Dari kata kerja itu terjadilah kata benda *Administratio*, yang dalam bahasa inggris adalah *Administration* dan menjadi administrasi dalam bahasa indonesia. Administrasi diartikan sebagai perbuatan penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. (Wijaya, 2002:87).

Administrasi sebagaimana yang dikemukakan (Siagian dalam Syafiie, 2003:5) adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kemudian menurut Ndraha (2003 : 5), yang dimaksud dengan Administrasi Pemerintahan adalah proses penjagaan (*keeping dan caring*) dan penyampaian (*forwarding dan delivering*) produk pemerintahan tertentu kepada konsumen dan memberdayakan konsumen untuk menggunakan produk tersebut dengan cara dan alat yang sesuai dengan kondisi konsumen segera mungkin sedemikian rupa sehingga konsumen menerimanya utuh dan sadar, dan memperoleh manfaat sebesar-besarnya.

Demi efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintahan desa harus di dukung dengan tata usaha yang benar.

Tata usaha adalah mencatat semua proses penyelenggaraan pemerintahan desa yang disebut administrasi desa . Jadi, Administrasi Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi desa.

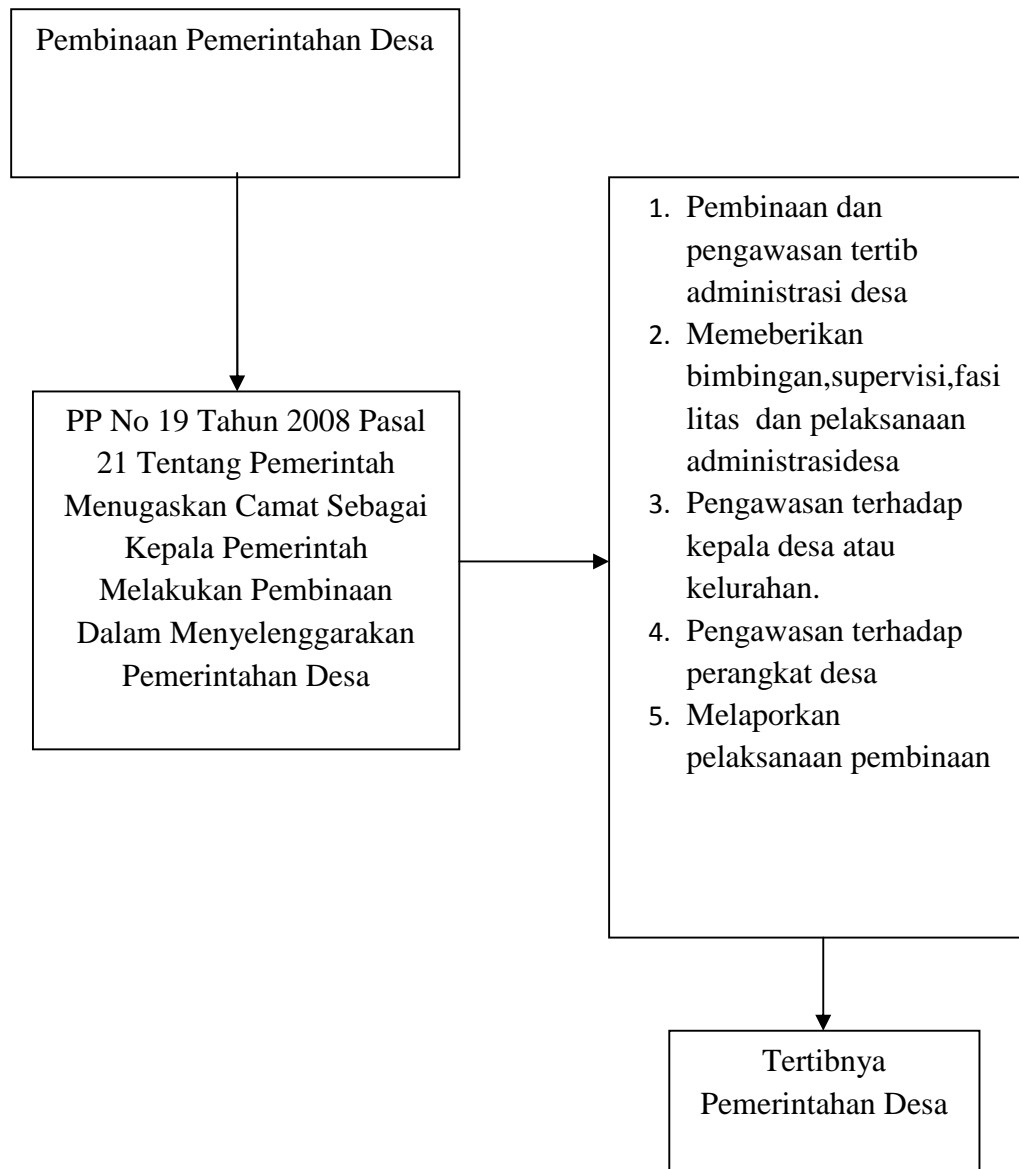
Administrasi desa sangat penting bagi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan pemerintahan desa. Pemerintahan desa akan berjalan dengan lancar manakala didukung oleh sistem tata usaha/administrasi yang benar, rapi, dan tertib. Sistem administrasi yang benar, rapi, dan tertib akan memberikan data dan informasi yang mudah dan sistimatis yang sangat berguna untuk pengambilan keputusan, pembuatan rencana, kontrol kegiatan, evaluasi, dan komunikasi dan informasi baik ke dalam maupun keluar organisasi.(Hanif Nurcholis,2011:135)

2.8 Kerangka Pikiran

Adapun kerangka pikiran untuk menjelaskan hubungan antara variabel dengan indikator penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar : II.1

**Kerangka Pikiran Analisis Tugas Camat Sebagai Kepala Pemerintahan
Dalam Melaksanakan Pembinaan Dan Menyelenggarakan Pemerintah Desa
Di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir**



2.9 Defenisi Konsep

Defenisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial (Singarimbun, 2006:33). Adapun batasan definisi konsep tersebut adalah:

1. Otonomi Daerah

Yaitu memberikan kemungkinan kepada pemerintahan pusat atau spemerintahan daerah yang tingkatnya lebih atas untuk minta bantuan kepada pemerintah daerah ataupun pemerintahan daerah yang tingkatnya lebih rendah didalam menyelenggarakan tugas-tugas atau kepentingan-kepentingan yang tidak termasuk kedalam urusan rumah tangga daerah.

2. Kecamatan

Adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, bukan sebagai kepala wilayah. Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah.

3. Pelaksanaan Tugas

Tugas adalah sebagai kewajiban untuk dilaksanakan, dimana keberhasilan tugas seorang kepala wilayah adalah sejauh mana dia berhasil mencapai tujuan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka melaksanakan kewajiban.

4. Pemerintah secara etimologi berarti “badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu negara” kemudian juga dapat diartikan “pemerintah” berarti perihal, cara perbuatan urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi.

5. Pemerintah daerah

Pemerintah Daerah menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

6. Pemerintah Desa

Desa adalah satuan administrasi pemerintahan terendah dengan hak otonomi berbasis asal usul dan adat istiadat.

7. Administrasi

Administrasi desa sangat penting bagi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintahan desa akan berjalan dengan lancar manakala didukung oleh sistem tata usaha/administrasi yang benar, rapi, dan tertib.

2.10 Defenisi Operasional

Menurut Singarimbun (2006:46) definisi operasional adalah suatu cara untuk mengatur variable. Sehingga dengan pengukuran ini dapat diketahui indicator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur variabel. Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah pembinaan pemerintah desa.

Adapun pelaksanaan tugas camat membina penyelenggaraan pemerintah desa dapat dilihat berdasarkan PP No. 19 Tahun 2008 pasal 21 tentang Kecamatan, Pemerintah menugaskan Camat sebagai Kepala Pemerintahan untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. Adapun kegiatan-kegiatan pembinaan tersebut meliputi:

1. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib Administrasi Pemerintahan Desa atau kelurahan.
2. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitas dan konsultasi pelaksanaan Administrasi Desa atau kelurahan.
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa atau lurah.
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Desa atau kelurahan.
5. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa atau kelurahan ditingkat Kecamatan kepada Bupati atau Walikota.

2.11 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, dan perumusan masalah diatas serta dihubungkan dengan teori-teori yang telah diuraikan, maka dapat ditarik suatu hipotesis bahwa : *Diduga Tugas Camat Sebagai Kepala Pemerintahan Dalam Melaksanakan Pembinaan Dan Menyelenggarakan Pemerintah Desa Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir belum terlaksana dengan baik*”.

2.12 Indikator Variabel

Untuk menganalisis tugas camat dalam membina dan menyelenggarakan pemerintah desa dapat dilihat berdasarkan PP No. 19 Tahun 2008 pasal 21 tentang Kecamatan, Pemerintah menugaskan Camat sebagai Kepala Pemerintahan untuk

melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. Adapun kegiatan-kegiatan pembinaan tersebut meliputi:

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib Administrasi Pemerintahan Desa atau kelurahan.
- b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitas dan konsultasi pelaksanaan Administrasi Desa atau kelurahan.
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa atau lurah.
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Desa atau kelurahan.
- e. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa atau kelurahan ditingkat Kecamatan kepada Bupati atau Walikota.

Adapun Operasional indikator variabel dalam penelitian ini dapat dilihat dalam table berikut ini :

Tabel II.1
Operasional Indikator Variabel

Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3
Tugas Camat sebagai kepala pemerintahan dalam melaksanakan pembinaan dan menyelenggarakan pemerintahan desa	1. Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa	a. Memberikan pelatihan tentang tertib administrasi.desa b. Memberikan prosedur kerja tentang administrasi desa. c. Memberikan metode/cara kerja administrasi desa. d. Memberikan Pengawasan tentang adm desa terhadap perangkat desa
	2. Memeberikan bimbingan,supervisi,fasilitas dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa	a. Memberikan bimbingan agar bekerja dengan baik dan memebritahu akibat dari kesalahan dalam pekerjaan tersebut. b. Memberikan pengarahan langsung yang bersifat motivasi agar dapat bekerja dengan baik dan optimal. c. Memberikan fasilitas yang memadai untuk pelaksanaan pemerintahan desa. d. Memberikan peluang untuk berkonsultasitentang pelaksanaan adm.desa

	<p>3. Melakukan pembinaan Pengawasan terhadap kepala desa atau kelurahan.</p>	<p>a. Memberikan pembinaan tentang cara pengambilan keputusan yang baik dan benar</p> <p>b. Memberikan pelatihan tentang cara pembuatan perdes</p> <p>c. Mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan</p> <p>d. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan.</p>
	<p>4. Melakukan pembinaan dan Pengawasan terhadap perangkat desa atau kelurahan.</p>	<p>a. Memberikan pembinaan tentang pengetahuan mengenai adminitrasi desa.</p> <p>b. Perangkat desa diberi pelatihan tentang tugas dan kewajibannya</p> <p>c. Perangkat desa diberikan pengarahan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan keahlian.</p> <p>d. Memberikan pengawasan kepada perangkat desa mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab adm.desa</p>

	5. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati/ walikota	a. Evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa b. Laporan secara tertulis c. Laporan secara lisan d. Kecepatan dan target pelaksanaan tugas
--	--	---

a. Teknik Pengukuran

Untuk mengetahui pelaksanaan peranan camat dalam membina perangkat desa dalam penataan administrasi di Kecamatan Kubu maka penulis melakukan pengukuran dengan menggunakan *skala likert*. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena social. Dengan skala likert, maka variable yang akan diukur dijabarkan menjadi indicator variable dan indicator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang berupa pernyataan atau pertanyaan. Sugiyono (2009:107)

Jawaban dari setiap instrument yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negative, atau dari baik sampai kurang baik, yang dapat berupa kata-kata. Untuk keperluan peranan dalam penelitian ini, maka jawaban dari responden dalam kuesioner diberi skor :

No	Kategori	Skor
1	Baik	3
2	Cukup Baik	2
3	Kurang Baik	1

Kemudian untuk menganalisis masing-masing indicator variable penelitian terlebih dahulu harus diketahui nilai intervalnya dengan menggunakan formula:

Skor Tertinggi	:	Jumlah Sub Indikator x Jumlah Responden x Nilai Tertinggi
Skor Terendah	:	Jumlah Sub Indikator x Jumlah Responden x Nilai Terendah
Interval	:	$\frac{\text{Skor Tertinggi} - \text{Skor Terendah}}{\text{Skala}}$

Dari formula diatas, dapat diketahui bahwa:

Skor Tertinggi : $4 \times 18 \times 3 = 216$

Skor Terendah : $4 \times 18 \times 1 = 72$

Interval : $\frac{216 - 72}{3} = 48$

Dari hasil diatas, untuk mengetahui penilaian dari masing-masing indikator variabel tentang analisis tugas camat sebagai kepala pemerintah dalam melaksanakan pembinaan dan menyelenggarakan pemerintahan desa maka dapat dilihat sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi dengan 4 sub indicator yang dinilai, dengan 18 responden dengan skor tertinggi 216 dan skor terendah 72 dengan interval 48 dapat dinyatakan:

Baik : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner berada pada interval 168 – 216.

Cukup Baik : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner berada pada interval 120-167.

Kurang Baik : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner berada pada interval 72-119.

2. Memberikan bimbingan ,supervise, fasilitas dan konsultasi pelaksanaan administrasi pengukurannya dengan 4 sub indicator yang dinilai, dengan 18 responden dengan skor tertinggi 270 dan skor terendah 90 dengan interval 60 dapat dinyatakan:

Baik : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner berada pada interval 168 – 216.

Cukup Baik : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner berada pada interval 120 -167.

Kurang Baik : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner berada pada interval 72 -119.

3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa/kelurahan , pengukurannya dengan 4 sub indicator yang dinilai, dengan 18 responden dengan skor tertinggi 216 dan skor terendah 72 dengan interval 48 dapat dinyatakan:

Baik : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner berada pada interval 168-216.

Cukup Baik : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner berada pada interval 120-167.

Kurang Baik : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner berada pada interval 72-119.

4. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa atau kelurahan pengukurannya dengan 4 sub indikator yang dinilai, dengan 18 responden dengan skor tertinggi 216 dan skor terendah 72 dengan interval 48 dapat dinyatakan:

Baik : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner berada pada interval 168-216.

Cukup Baik : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner berada pada interval 120-167.

Kurang Baik : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner berada pada interval 72-119.

5. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan pengukurannya dengan 4 sub indikator yang dinilai, dengan 18 responden dengan skor tertinggi 216 dan skor terendah 72 dengan interval 48 dapat dinyatakan:

Baik : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner berada pada interval 168-216.

Cukup Baik : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner berada pada interval 120-167.

Kurang Baik : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner berada pada interval 72-119.

Kemudian untuk menganalisis tugas camat sebagai kepala pemerintah dalam melaksanakan pembinaan dan menyelenggarakan pemerintahan desa Kecamatan

Kubu , terlebih dahulu harus diketahui nilai intervalnya dengan menggunakan formula:

Skor Rata-rata Tertinggi	: Jumlah Indikator x Jumlah Responden x Nilai Tertinggi
Skor Rata-rata Terendah	: Jumlah Indikator x Jumlah Responden x Nilai Terendah
Interval	: $\frac{\text{Skor Rata-rata Tertinggi} - \text{Skor Rata-rata Terendah}}{\text{Skala}}$

Dari formula diatas, dapat diketahui bahwa:

Skor Rata-rata Tertinggi : $5 \times 18 \times 3 = 270$

Skor Rata-rata Terendah : $5 \times 18 \times 1 = 90$

Interval :
$$\frac{270 - 90}{3} = 60$$

Dari hasil diatas, untuk mengetahui penilaian variable menganalisis tugas camat sebagai kepala pemerintah dalam melaksanakan pembinaan dan menyelenggarakan pemerintahan desa secara keseluruhan adalah dengan menjumlahkan seluruh hasil rekapitulasi setiap sub indicator variable dan dibagi dengan jumlah indikator variable penelitian.

Dengan demikian, maka dapat dinyatakan bahwa menganalisis tugas camat sebagai kepala pemerintah dalam melaksanakan pembinaan dan menyelenggarakan pemerintahan desa di Kecamatan Kubu, pengukurannya dengan 5 indikator variabel yang dinilai dengan skor rata-rata tertinggi 270 dan skor rata-rata terendah 90 dengan nilai interval 60, dapat dinyatakan:

- Baik : Apabila Jumlah Skor Rata-Rata Yang Diperoleh Dari Responden Berada Pada Interval 210-270.
- Cukup Baik : Apabila Jumlah Skor Rata-Rata Yang Diperoleh Dari Responden Berada Pada Interval 150-209.
- Kurang Baik : Apabila Jumlah Skor Rata-Rata Yang Diperoleh Dari Responden Berada Pada Interval 90-149.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Di lihat dari lingkup masalah dan tujuan yang akan dicapai, maka tipe penelitian ini adalah Survey Deskriptif, yaitu menggambarkan fakta-fakta yang ada untuk mengemukakan kondisi dari gejala-gejala secara lengkap tentang objek yang diteliti.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kecamatan Kubu karena penulis menemukan gejala Pelaksanaan Pembinaan Pemerintahan Desa yang dilakukan oleh Camat belum efektif. Kecamatan Kubu memiliki 15 Desa oleh karena itu, penulis membatasi lokasi hanya pada 3 desa yaitu Desa Sungai Segajah, Desa Teluk Nilap, Desa Rantau Panjang kiri terdapat di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, adapun alasan dipilih 3 desa ini adalah dengan mempertimbangan dimana Desa Sungai Segajah adalah Desa yang relatif lambat berkembang/desa ketinggalan, Desa Teluk Nilap adalah sebagai Desa yang maju, Sedangkan Desa Rantau Panjang Kiri adalah Desa yang berprestasi. Waktu penelitian dilakukan pada Awal Bulan Februari sampai dengan pertengahan April 2012.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi yang diartikan sebagai jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya diduga. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Camat, Sekretaris Camat, Seksi Pemerintahan Serta, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan, Kaur Perekonomian di 3 Desa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III 1
Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel
1	Camat	1	1
2	Sekretaris Camat	1	1
3	Kasi Pemerintahan	1	1
4	Kepala Desa	15	3
5	Sekretaris Desa	15	3
6	Kaur Pembangunan	15	3
7	Kaur Pemerintahan	15	3
8	Kaur Perekonomian	15	3
	Jumlah	78	18

Sumber : Kantor Camat Kecamatan Kubu 2010

3.4 Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel yang digunakan untuk Camat, Sekretaris Camat, Kasi Pemerintahan menggunakan teknik sensus karena selain jumlahnya relatif kecil tapi mudah untuk ditemui. Sedangkan untuk Perangkat Desa (desa sampel) digunakan Teknik Purposive Sampling. Teknik Purposive Sampling yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, seperti yang dikemukakan diatas bahwa diantara 15 Desa yang ada di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, dengan mempertimbangkan maka diambil hanya 3 desa. Alasan memilih tiga desa

tersebut bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Camat Drs. Ahmad Atin, yang mengatakan bahwa,

“Desa yang dikatakan berkembang, prestasi, dan masih rentan yaitu mempunyai kriteria bahwa dengan pertimbangan desa tersebut merupakan desa yang dari segi prestasi desa dalam mengadakan kegiatan yang berupa gotong royong untuk kenyamanan desa, dan dapat juga dilihat dari segi pendidikan, pendapatan masyarakat, pembangunan yang ada di desa tersebut, dan kepatuhannya terhadap peraturan pemerintahan desa tersebut. Dengan hal tersebut diatas berdasarkan atas pertimbangan tertentu, yaitu dengan mengambil 3 desa, dimana desa tersebut dengan pertimbangan desa yang relatif berkembang ,desa yang sudah maju, kemudian desa yang sudah berprestasi (Sugiyono, 2007 : 96)”.

3.5 Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari responden yang merupakan sumber informasi untuk memperoleh jawaban yang relevan mengenai permasalahan di dalam penelitian ini yakni tentang Analisis Tugas Camat sebagai kepala pemerintahan dalam membina dan menyelenggarakan Pemerintahan Desa .

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari lembaga atau instansi yang berwenang sebagai data tidak langsung seperti data tentang keadaan geografis yang terdiri dari letak, batas wilayah dan luas wilayah ; data demografis yang terdiri dari letak, batas wilayah dan luas wilayah ;data demografis yang terdiri dari data kependudukan data kependudukan dan struktur organisasi pemerintah kecamatan dan desa.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

a. Quesioner

Yaitu teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan untuk mendapatkan data tentang pelaksanaan Tugas Camat dalam Membina Pemerintah Desa. Adapun yang menjadi quesioner adalah, Camat, Kepala Desa, Sekretari Desa, Kepala Urusan , Kepala Dusun. Kegunaan Quesioner adalah untuk mendapatkan bahan/data yang akurat dalam penelitian.

b. Wawancara (Interview)

Yaitu melakukan tanya jawab langsung kepada responden mengingat masih adanya informasi yang belum lengkap melalui teknik quesioner.

c. Observasi (Pengamatan Langsung)

Yaitu mengamati secara langsung objek yang diteliti, guna untuk lebih mengetahui sejauh mana Tugas Camat Membina Pemerintahan Desa.

3.7 Teknik Analisa Data

Setelah semua data yang dikumpulkan melalui metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini, selanjutnya data dikelompokkan dan diolah menurut jenisnya, setelah itu dianalisa secara *deskriptif*, yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan dilapangan dan hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel dan dilengkapi dengan uraian-uraian serta keterangan yang mendukung untuk dapat diambil kesimpulan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Keadaan Geografis di Kecamatan Kubu

Kecamatan Kubu merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir yang dilalui oleh jalur Provinsi. Kecamatan Kubu sebagai Kecamatan yang sudah lama yang berada Di kabupaten Rokan Hilir. Camat Kubu saat ini di jabat oleh Syamsul Kidul. S.Sos.

Secara umum keadaan topografisnya adalah berupa dataran meskipun ada beberapa daerah yang berbukit-bukit.

a. Luas wilayah

Kecamatan kubu terdiri dari 15 desa dan kecamatan ini memiliki luas wilayah adalah 1.061.06 km².

b. Batas wilayah

1. Sebelah utara berbatasan dengan selat malaka
2. Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan bangko pusako
3. Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan bagan sinembah/kecamatan pasir limau kapas
4. Sebelah timur berbatasan dengan kec. Perkaitan

Desa rantau panjang kiri, desa teluk nilap, desa sungai segajah, yang merupakan salah satu dari 15 desa yang berada di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

Untuk memasuki wilayah desa rantau panjang kiri, desa teluk nilap, desa sungai segajah, yang harus ditempuh yaitu jalan transformasi yang berupa air dan

jalan transportasi darat. Jika melalui transportasi air harus melewati sungai, yaitu sungai kubu. Yang mana sungai ini merupakan sungai yang terbesar di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

Dahulunya sungai ini dijadikan sebagai tempat menunjang kehidupan para nelayan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya karena sungai ini dikenal dengan hasil ikannya. Tetapi saat ini sangat sulit mencari warga desa yang berprofesi sebagai nelayan, karena disungai ini sudah sulit untuk mendapatkan ikan.

Sungai ini juga dijadikan jalur hilir Mudik bagi masyarakat setempat. Namun setelah tahun 1980-an terjadinya perkembangan yang pesat yang ditandai dengan adanya jalur-jalur transportasi darat yang dibuka. Dengan adanya jalan-jalan yang dibuka tersebut sehingga jalur transportasi air sangat jarang digunakan. Hal ini dipertimbangkan masyarakat setempat karena jarak waktu tempuh lewat transportasi darat lebih singkat dibandingkan dengan lewat transportasi air.

4.2 Penduduk

Penduduk kecamatan kubu pada umumnya dihuni oleh suku melayu, jawa, batak dan lainnya. Jumlah penduduk akhir 2010 adalah 23.161 jiwa (5.954KK) terdiri dari 11.902 jiwa laki-laki dan 11.259 jiwa perempuan.

Berikut ini adalah tabel tentang jumlah penduduk yang ada dikecamatan kubu menurut jenis kelamin .

Tabel IV.1
Tabel Jumlah Penduduk Desa Kec. Kubu Menurut Jenis Kelamin

No	Nama Desa	Jenis Kelamin		Jumlah
		LK	PR	
1	Teluk Nilap	784	787	1571
2	Sungai Majo	1143	1025	2168
3	Rantau Panjang Kiri	864	841	1705
4	Sungai pinang	1043	1037	2080
5	Jojol	739	729	1468
6	Sungai panji-panji	518	471	989
7	Teluk merbau	450	447	897
8	Rantau panjang kanan	637	627	1264
9	Sungai kubu	915	829	1744
10	Tanjung leban	877	863	1740
11	Sungai segajah	1575	1417	2992
12	Teluk piyai	524	470	994
13	Pulau halang belakang	832	748	1580
14	Pulau halang	492	479	971
15	Sungai segajah makmur	509	489	998
	JUMLAH	11.902	11.259	23.161

Sumber : Kantor Camat Kecamatan Kubu 2010

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa penduduk desa kecamatan kubu jumlah penduduknya pada akhir tahun 2010 adalah berjumlah 23.161 orang, dari jenis kelamin laki-laki adalah berjumlah 11.902 sedangkan perempuan adalah 11.259 .

4.3 Agama Penduduk

Mayoritas penduduk desa di kecamatan kubu adalah suku melayu dan jawa yang sangat kuat memeluk agama islam, meskipun beberapa tahun terakhir ada

pendatang baru yang berasal dari orang keturunan tionghua, batak, yang memeluk agama Kristen dan hindu.

Berdasarkan komposisi penduduk yang ada di Desa Kecamatan Kubu kabupaten rokan hilir mayoritas penduduknya beragama islam , hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1V.2
Jumlah Masyarakat Desa Kecamatan Kubu Berdasarkan Agama Yang Mereka Anut

No	Agama	Jumlah (Orang)
1	Islam	22.756
2	Kristen	369
3	Budha	36
	Jumlah	23161

Sumber : Kantor Camat Kecamatan Kubu, 2010

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat desa kecamatan kubu beragama islam dengan jumlah 22.756 orang, kemudian berama Kristen berjumlah 369 orang dn beragama budha berjumlah 36 orang. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat desa Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir adalah beragama islam.

Berbicara mengenai agama atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat tidak terlepas dari sarana dan prasarana pribadatan yang ada di desa Kecamatan Kubu , adapun sarana peribadatan yang ada di desa kecamatan kubu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1V.3
Jumlah Sarana Pribadatan Di Desa Kecamatan Kubu

No	Sarana Pribadatan	Jumlah
1	Masjid	21
2	Musholla	17
3	Gereja	1
	Jumlah	39

Sumber : Data Monografit Kecamatan Kubu, 2010

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah tempat ibadah yang berda di desa yang ada Kecamatan Kubu terdiri dari 21 Masjid,17 Musholla, dan 1 Gereja. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat desa Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir mayoritas adalah agama islam.

4.4 Pendidikan

Perkembangan pendidikan jika dilihat dari pertumbuhan penduduk desa kecamatan kubu menunjukkan bahwa mereka sudah cukup baik,hal ini dapat dilihat dari tidak banyaknya jumlah penduduk yang buta huruf dalam artian banyak penduduk yang sudah bisa membaca dan menulis . Penduduk yang buta huruf atau tidak bisa membaca dan menulis adalah orang tua yang berumur 60 tahun, hal ini dikarenakan pada zaman dahulu belum banyak tempat pendidikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.4
Jenis Sarana Pendidikan Di Desa Kecamatan Kubu

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak (TK)	5 Unit
2	Sekolah Dasar (SD)	17 Unit
3	Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA)	9 Unit
4	Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTS)	8 Unit
5	Sekolah Menengah Atas (SMA)	3 Unit
6	Sekolah Perguruan Tinggi	1 Unit
Jumlah		43

Sumber : Monografi Kantor Camat kecamatan kubu ,2010

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sarana pendidikan yang ada di kecamatan kubu cukup memadai dan ditambah lagi perguruan tinggi 1 unit. Itu dapat dilihat dengan adanya 5 unit Taman Kanak-Kanak, 17 Sekolah Dasar, 9 unit Madrasah Diniyah Awaliyah, 8 unit SMP, 3 unit SMA, dan 1 unit sekolah Perguruan Tinggi. Dan dapatlah diambil pemahaman bahwa tingkat pendidikan masyarakat desa kecamatan kubu sudah mulai kearah yang lebih baik dengan tidak banyaknya penduduk yang buta huruf karena tidak mengenyam pendidikan.

4.5 Kesehatan

Pelayanan masyarakat dibidang kesehatan di desa yang ada Di kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir sudah mengalami kemajuan , karena sudah adanya Puskesmas dan tempat Praktek Bidan, tempat Praktek Dokter, dan dapat membantu masyarakat dalam bidang pelayanan kesehatan seperti cek kesehatan, keluarga berencana, pemeriksaan kehamilan sampai proses persalinan , dan pemeriksaan kesehatan masyarakat lainnya.

Sarana kesehatan dikecamatan kubu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.5
Sarana Kesehatan di Kecamatan Tahun 2010

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Puskesmas	1
2	Tempat Praktek Dokter	3
3	Tempat Praktek Bidan	13
4	Posyandu	37
Jumlah		54

Sumber : Monografi kecamatan kubu, 2010

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah sarana kesehatan di kecamatan kubu yang hanya memiliki 1 puskesmas sedangkan di kecamatan ini ada 17 Desa belum bisa mencukupi kebutuhan dan pelayanan kesehatan yang belum memadai.

4.6 Mata Pencaharian

Mata pencaharian adalah usaha yang dilakukan anggota keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup serta sekaligus juga ikut menentukan kelangsungan hidup manusia di masa akan datang. Mata pencaharian penduduk kecamatan kubu adalah pertanian, perkebunan kelapa sawit dan berdagang ,sebagian lagi penduduk kubu juga bekerja sebagai PNS,Polri dan lainnya. Tipe pertanian yang dilakukan adalah menanam tanaman padi yang merupakan mata pencaharian pokok penduduk kecamatan kubu kabupaten rokan hilir. Dan pertanian lainnya yang berupa sawit, kelapa wija,kangkung, sayuran lainnya berupa kacang. Dlll. Tipe pertanian yang dilakukan adalah menanam palawija dan sayur-sayuran. Berikut tabel :

Tabel IV.6
Distribusi penduduk menurut Mata pencaharian Responden di
kecamatan Kubu Tahun 2010

NO	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)
1	PNS	427
2	TNI/POLRI	53
3	Tani	1.757
4	Dagang	524
5	Lainnya	3.719
Jumlah		6.480

Sumber data :Monografi kecamatan kubu,2010

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat bahwa rata-rata mata pencaharian penduduk di kecamatan kubu adalah bertani ,lahan pertanian yang ada dikecamatan kubu sangat luas, dapat dilihat dari mata pencaharian penduduk masyarakat di kecamatan kubu yang hanya bertani maka otomatis perkembangan masyarakat masih rendah.

4.7 Mata Pencaharian Penduduk

Kecamatan kubu mempunyai 15 desa, akan tetapi penulis membatasi lokasi penelitian hanya 3 desa karena jumlahnya terlalu banyak. Desa yang penulis jadikan sampel adalah desa Teluk Nilap, Rantau Panjang Kiri, dan Desa Sungai Segajah yang dikategorikan swadaya dan swakarya. Desa-desa ini salah satunya mempunyai penduduk yang cukup banyak . Jumlah penduduk perdesa dengan jumlah penduduk antar Desa bervariasi mulai dari desa yang penduduknya kurang dari 1000 orang sampai pada desa yang penduduknya kurang dari 3000 orang.

Adanya kepadatan penduduk disalah satu desa, tepatnya di desa sungai segajah untuk ukuran penduduknya yang relative padat. Karena relative padat sudah waktunya untuk dimekarkan agar pelayanan pada masyarakat dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu.

Table IV.7

Tabel Mata Pencaharian Penduduk 3 (tiga) Desa Kec.Kubu

No	Nama Desa	Buruh	Pertanian	Perkebunan	PNS	Dagang	Lain nya
1	Teluk Nilap	116	59	25	22	15	50
2	Rantau	68	30	19	29	37	45
3	Panjang kiri Sungai Segajah	39	197	48	13	8	64
Jumlah		223	286	92	64	60	159

Sumber : Hasil Wawancara Pada Kepala Desa,2012

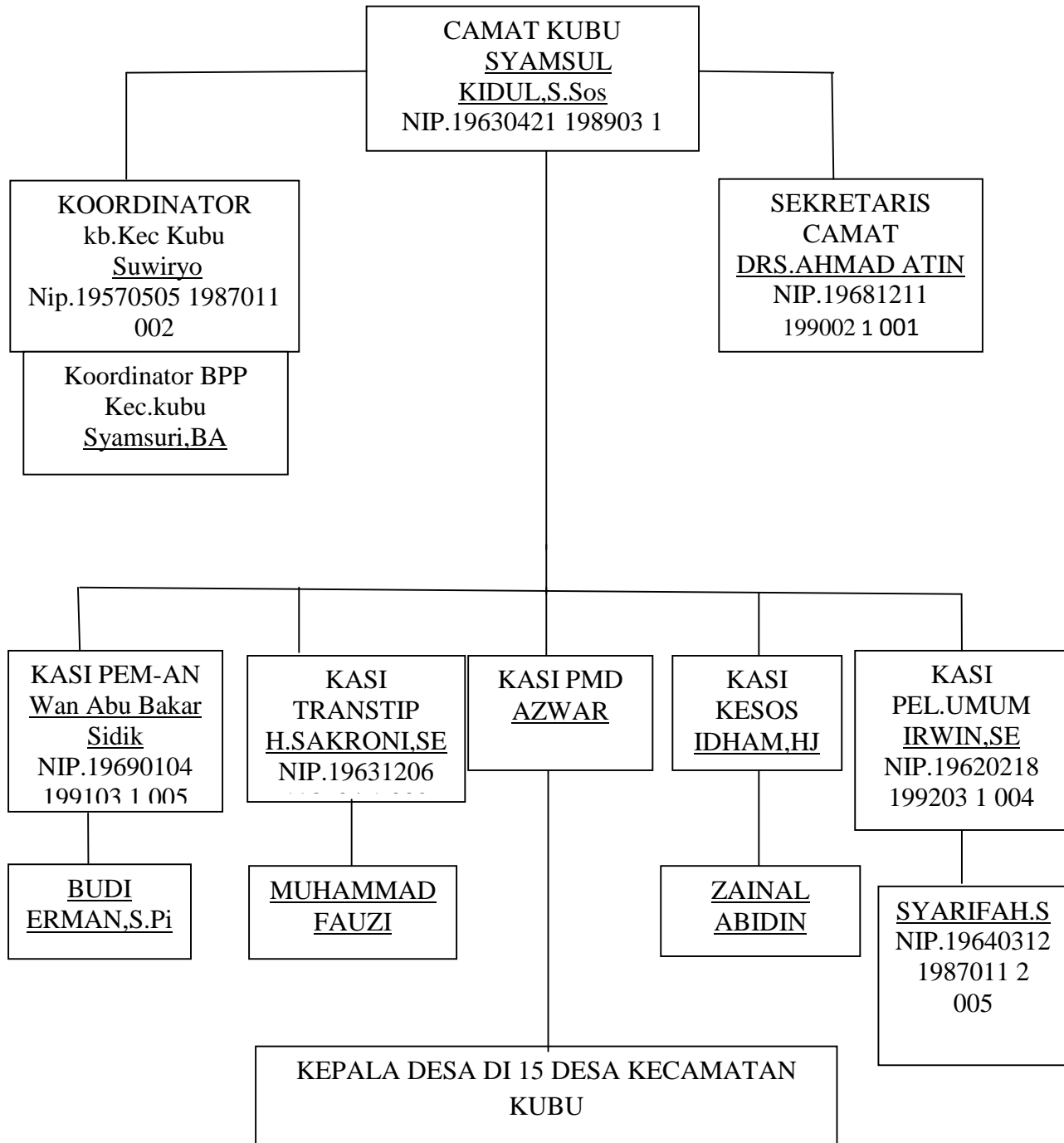
Tabel diatas menggambarkan mata pencaharian penduduk di desa sungai segajah, rantau panjang kiri dan desa teluk nilap sebagian besar adalah dibidang pertanian,buruh perusahaan pertamina dan sebagian kecil yang lain berdagang, PNS dan lain-lain.

4.8 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan bentuk kerjasama dan kerjasama tersebut berlangsung secara tertentu yang menyebabkan adanya bentuk,berdasarkan aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang tertentiu pula. Setiap bentuk mesti ada konfigurasinya yang tertentu dan yang disebabkan oleh sesuatu didalamnya yang disebut dengan struktur.

Gambar IV.1

Struktur Organisasi di Kecamatan Kubu Adalah Sebagai Berikut:



Dari bagan diatas dapat dilihat bahwa bagan organisasi berbentuk lini staf. Pada organisasi ini disamping ada petugas lini (komando) yang langsung melakukan kegiatan pencapaian tujuan, adapula tenaga staf yang memberi bantuan kepada petugas lini untuk melancarkan pencapaian tujuan organisasi ini.

Tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan di atas berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 29 Tahun 2009 adalah:

1. Camat

Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, pada pasal 3 ayat 3 Camat memiliki tugas:

- a. Membina, mengkoordinasikan, dan menyelenggarakan program dan kegiatan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan masyarakat desa/kelurahan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan;
- g. Membina penyelenggaraan pemerintah Desa/Kelurahan;
- h. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;

- i. Membina dan melaksanakan kesekretariatan kecamatan;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat Camat

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam membina mengkoordinasikan dan mengendalikan di bidang administrasi ,perencanaan kegiatan ,monitoring,evaluasi dan pelaporan, urusan umum, kepegawaian ,dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan kegiatan teknis administrasi
- b. Perencanaan kegiatan program kecamatan
- c. Pengkoordinasi tugas administrasi
- d. Pembinaan perangkat kecamatan kelurahan dan kepenghuluan
- e. Pengevaluasi tugas pemerintah kecamatan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam bidang pemerintahan Umum. Meliputi pembinaan administrasi Desa/kelurahan, melaksanakan administrasi kependudukan dan catatan sipil pembinaan kehidupan politik dalam negeri.

Adapun fungsi seksi pemerintahan sesuai dengan ayat (1) dalam pasal 6, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan kegiatan urusan pemerintahan
- b. Koordinasi dan sinkronisasi tugas urusan pemerintahan
- c. Pembinaan, evaluasi dan bimbingan urusan pemerintahan;
- d. Pemeriksaan pekerjaan bawahan;
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas

Seksi pemerintahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan seksi pemerintahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyelenggarakan fasilitas pemilihan Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- c. Menyelenggarakan lomba atau penilaian Desa/kelurahan tingkat kecamatan;
- d. Menyelenggarakan fasilitas kerjasama antar Desa /kelurahan dan penyelesaian perselisihan antar Desa/kelurahan;
- e. Memfasilitasi penataan Desa/kelurahan dan penyusunan peraturan desa;
- f. Melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan;
- g. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait;
- h. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan seksi pemerintahan;
- i. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi pemerintahan ;

- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh Camat.

4. Seksi Pembangunan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Adapun tugas dari seksi pembangunan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten rokan hilir:

- 1) Seksi pembangunan Masyarakat Desa dan kelurahan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan penyusunan program dan pembinaan pembangunan di Bidang ekonomi pelaksanaan pembangunan fisik produk distribusi serta lingkungan hidup.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal 8, Seksi Pembangunan Masyarakat Desa dan kelurahan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknik di bidang pembangunan masyarakat Desa/kelurahan ;
 - b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pembangunan masyarakat Desa/kelurahan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan masyarakat Desa/kelurahan
 - d. Pelaksanaan tugas lain diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Seksi pembangunan masyarakat desa dan kelurahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan pembangunan masyarakat desa dan kelurahan;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan desa kelurahan di kecamatan;
- c. Merencanakan program kerja pembinaan perekonomian ,produksi dan distribusi di tingkat kecamatan
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintahan maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- e. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintahan maupun swasta;
- f. Melakukan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi verikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan tugas urusan ketentraman dan ketertiban kepada Camat berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibrikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4 Seksi Pelayanan Umum

Berdasarkan peraturan daerah kabupaten rokan hilir, tugas dan seksi pelayanan umum adalah sebagai berikut:

1. Seksi pelayanan umum dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam membina, mengkoordinasi, dan melaksanakan tugas dibidang pelayanan umum;
2. Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah:
 - a. Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan pelayanan umum.
 - b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi pelayanan surat-surat keterangan pada bank, pendaftaran pembuatan KTP ,KK,dan surat keterangan lainnya yang diperlukan oleh masyarakat.
 - c. Penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana pelayanan umum dan perizinan.
 - d. Menginventarisir jenis pelayanan yang ada dan dibutuhkan oleh masyarakat untuk dijadikan acuan dalam rangka pelaksanaan pelayanan umum.
 - e. Menginventarisir segala permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan umum dan menyusun rencana kebijakan pemecahannya.
 - f. Menyusun time schedule dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat dengan mencantumkan persyaratan yang dibutuhkan, waktu

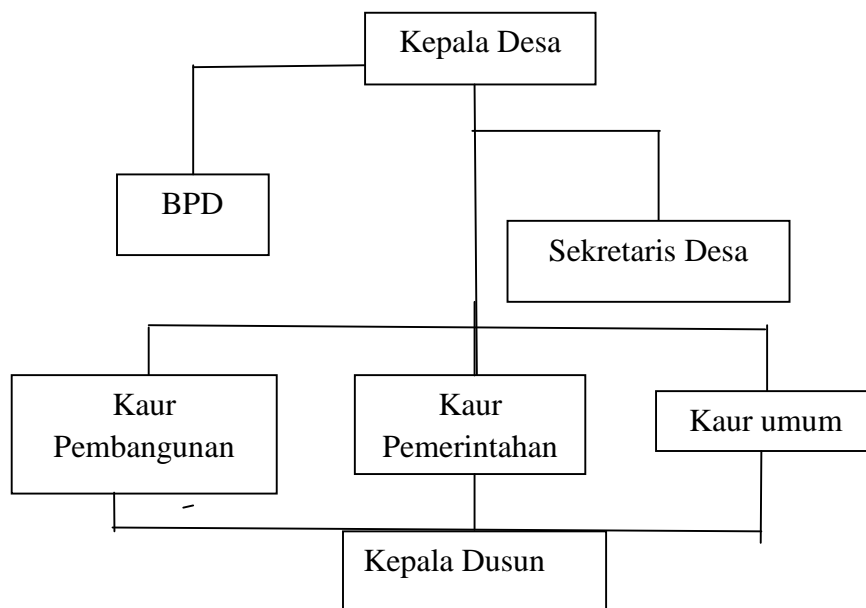
yang diperlukan untuk penyelesaian dan biaya yang dibutuhkan, untuk mewujudkan transportasi yang lebih baik.

- g. Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan petunjuk dan kebijakan pimpinan.

5 Pemerintah Desa

Pemerintahan desa dipimpin oleh seorang kepala desa dan didalam menjalankan tugas-tugas administrasi pemerintahan desa di bantu oleh perangkat desa. Dalam melayani masyarakat, kepala desa menjalin kerja sama dengan Kepala Dusun dan perangkat RT dan RW sebagai lembaga social yang membantu tugas-tugas kepala desa dalam menyebatani pelayanan kepada masyarakat. Adapun struktur pemerintah Desa di salah satu Desa yang saya lihat, berikut ini:

Gambar IV.2
Struktur disalah satu Desa

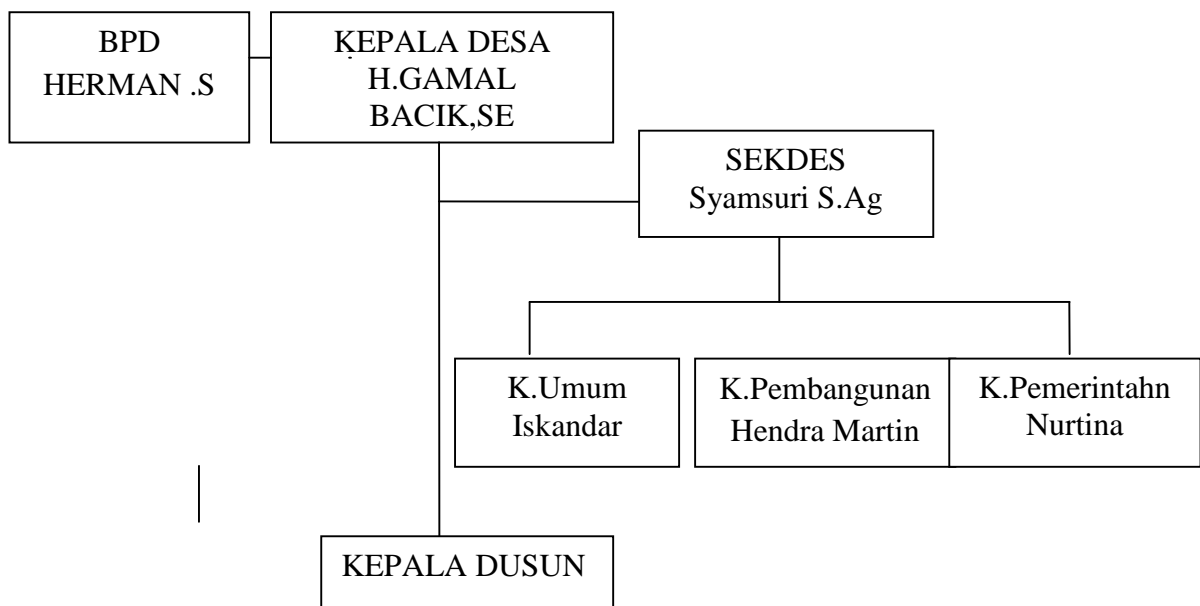


4.9 Struktur Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa terdiri dari pemerintahan desa dan BPD. Sedangkan pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa yang dimaksud terdiri dari sekretaris desa, pelaksana lapangan dan unsure kewilayahan. Pemerintahan desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan berdasarkan kebijakan yang diterapkan bersama BPD.

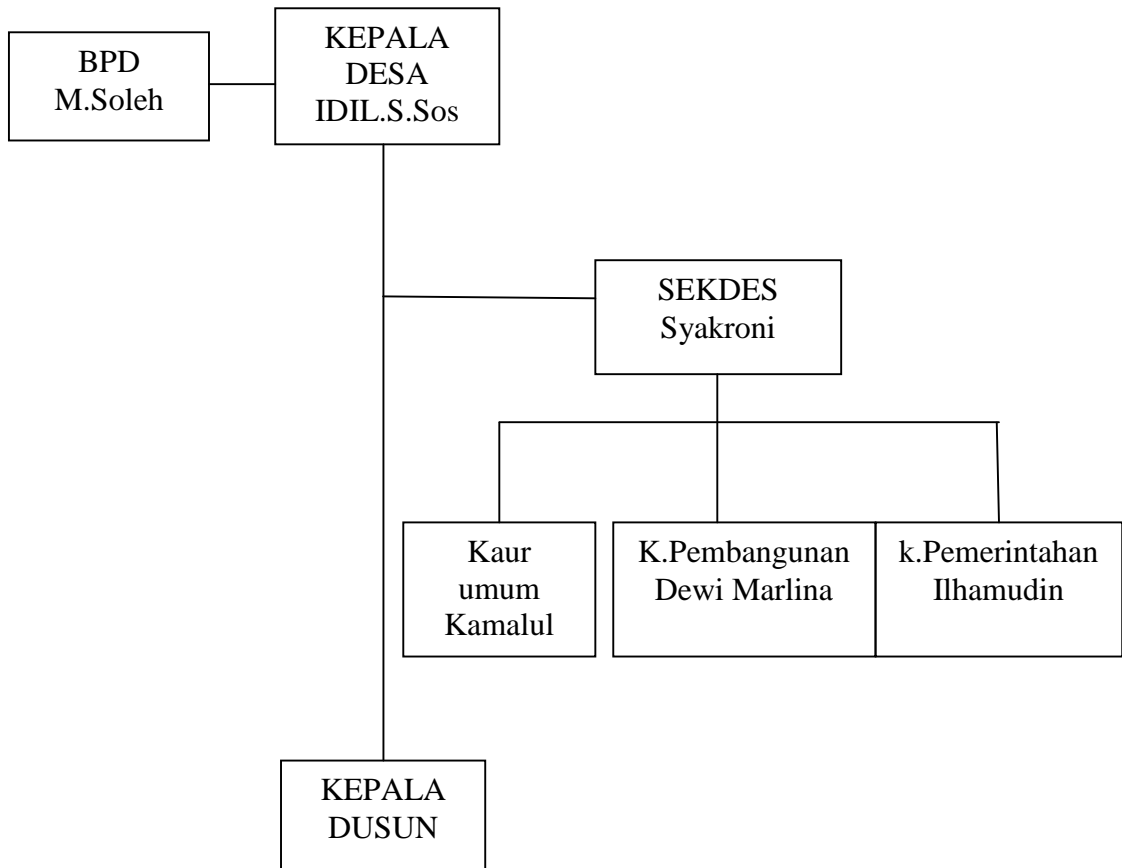
Adapun bagan organisasi pemerintahan teluk nilap adalah:

Gambar IV.3
Struktur organisasi Pemerintahan Desa



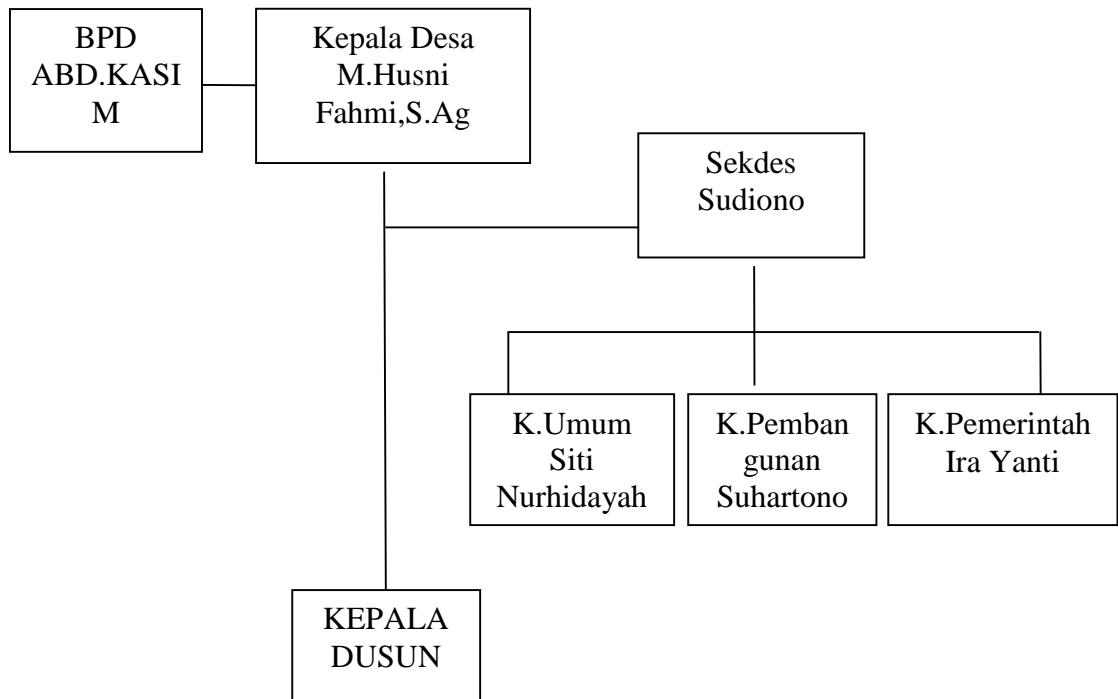
Sumber : Kantor Desa Teluk Nilap

Gambar IV.4
Struktur Organisasi Desa Rantau Panjang Kiri



Sumber : Kantor Desa Rantau Panjang Kiri

Gambar IV.5
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sungai Segajah



Sumber : Kantor Desa Sungai Segajah

Dari bagan di atas dilihat bahwa bagan organisasi berbentuk lini dan staf pada organisasi ini disamping ada petugas lini (komando) yang langsung melakukan kegiatan pencapaian tujuan, ada pula tenaga staf yang memberi bantuan kepada petugas lini untuk melancarkan pencapaian tujuan organisasi

Dari susunan Organisasi pemerintahan Desa dalam Daerah Kabupaten

Rokan Hilir, Pemerintahan Desa terdiri dari:

1. Kepala Desa
2. Perangkat Desa

Perangkat desa sebagaimana yang dimaksud terdiri dari:

1. Sekretaris desa
2. Kepala-kepala urusan

Kepala urusan terdiri dari:

- a. Kepala urusan pemerintahan
- b. Kepala urusan pembangunan
- c. Kepala urusan umum

3. Kepala dusun

Tugas dari kepala Dusun adalah:

- a. Membantu pelaksanaan tugas kaur
- b. Memeriksa hasil pekerjaan dari kaur
- c. Menjaga lingkungan sekitar desa

Tugas dan kewajiban Pemerintahan Desa adalah:

1. Membina kehidupan masyarakat
2. Membina perekonomian
3. Mendamaikan prselisihan masyarakat di Desa
4. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa dan menerapkan sebagai Peraturan

Desa bersama BPD,

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:

1. Pelaksana Pembina masyarakat Desa
2. Pelaksana Pembina perekonomian Desa
3. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
4. Pelaksana musyawarah perselisihan masyarakat Desa
5. Penyusunan dan pengajuan Rancangan Peraturan Desa menerapkannya sebagai Peraturan Desa bersama BPD.

Susunan organisasi pemerintah Desa Kevamatan Kubu terdiri dari:

1. *Kepala Desa*

Berdasarkan peraturan Daerah No 29 Tahun 2009 Kabupaten Rokan Hilir dijelaskan tugas Kepala Desa sebagai berikut:

1. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.
2. Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
 - b. Mengajukan rencana peraturan daerah
 - c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
 - d. Menyusun Dan Mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.

- e. Membina Kehidupan masyarakat desa
- f. Membina perekonomian desa
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- h. Mewakili desanya sebagai didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjukan kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

2. *Sekretaris desa*

Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretaris Desa. Sekretaris desa mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan:
- b. Mengadakan kegiatan investaris (mencatat, mengawasi dan memelihara) kekayaan desa
- c. Melaksanakan administrasi kependudukan, pembangunan dan kemasyarakatan
- d. Merumuskan Program Kegiatan Kepala Desa
- e. Menyusun rancangan APB Desa
- f. Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasil rapat
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa
- h. Melaksanakan administrasi keuangan

3 Kepala urusan pemerintahan

Kepala urusan pemerintahan membantu sekretaris dengan tugas sebagai berikut:

- a. Kegiatan administrasi kependudukan dan catatan sipil
- b. Kegiatan administrasi pertanahan
- c. Pencatatan monografi desa
- d. Kegiatan ketentraman dan ketertiban serta pertanahan sipil
- e. Menyelenggarakan Buku Administrasi Peraturan Desa dan keputusan Desa
- f. Tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4 Kepala Urusan Pembangunan

Kepala urusan pembangunan membantu sekretaris desa dengan tugas sebagai berikut:

- a. Kegiatan administrasi pembangunan desa
- b. Pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan desa
- c. Menghimpun, menganalisa dan memelihara potensi desa
- d. Mencatat dan mempersiapkan bahan usulan kegiatan pembangunan desa ,
dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

6 Kepala Urusan Umum

Kepala urusan umum membantu Sekretaris Desa dengan tugas:

- a. Melaksanakan tata kearsipan pengendalian surat masuk dan surat keluar
- b. Mempersiapkan dan mencatat hasil rapat, persidangan dan naskah lainnya

- c. Memelihara, mendistribusikan dan menyimpan alat-alat tulis dan peralatan kantor
- d. Pelaksanaan ketertiban dan kebersihan kantor dan bangunan lain milik desa
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian aparat desa
- f. Pencatatan investarisasi kekayaan desa
- g. Mempersiapkan penerimaan tamu kedinasan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang tidak diurus oleh urusan lainnya.
- i. Tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan.

4.10 Sosial Budaya

Mengenai aspek social budaya yang dimiliki oleh masyarakat desa Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Cukup Banyak, dalam hal ini merupakan Khazanah budaya daerah jawa dibawa dan dikembangkan dari turun temurun oleh masyarakat desa Kecamatan Kubu. Adapun aspek sosial budaya yang sangat berharga diantaranya, Wayang Kulit, Jaran Kepang/Kuda Kepang,dan Perkumpulan Wirid Yasin.

Masyarakat desa yang ada DiKecamatan Kubu telah lama membudayakan kerja sama dan persaudaraan seperti perkumpulan wirid yasin. Perkumpulan ini bertujuan untuk menghibur masyarakat yang mengalami musibah meninggal dunia dengan cara membaca Surat Yasin bersama-sama.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab hasil penelitian dan pembahasan ini akan memuat data-data yang diperoleh oleh penulis dari hasil penelitian di Kecamatan Kubu mengenai Analisis Tugas Camat Sebagai Kepala Pemerintahan Dalam Melaksanakan Pembinaan Dan Menyelenggarakan Pemerintahan Desa. Penyajian data tersebut diuraikan dalam bentuk deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara menyebarkan kuesioner ,wawancara langsung, dan mengambil refrensi dari buku-buku yang relevan dengan penelitian ini. Setiap jawaban dari pertanyaan dalam kuesioner akan didistribusikan dalam bentuk tabel frekuensi.

Hasil dari penelitian ini antara lain menjelaskan tentang:

1. Jawaban responden mengenai identitas responden.
2. Menjelaskan jawaban responden dari pertanyaan masing-masing sub indikator variabel yang disajikan dalam bentuk tabel.
3. Menjelaskan rekapitulasi jawaban responden dalam setiap indikator variabel.
4. Setelah menganalisis tugas camat sebagai kepala pemerintah dalam melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintah desa Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir dalam membina administrasi desa.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dari setiap jawaban kuesioner, di bawah ini akan disajikan tabel-tabel yang disertai jawaban responden yang kemudian diinterpretasikan sebagai berikut.

5.1 Identitas Responden

Untuk mengetahui lebih mudah tentang kondisi responden , penulis merasa perlu menjelaskan identitas responden . Oleh karena hal tersebut dapat mempengaruhi objektivitas dan validitas berbagai informasi penelitian yang diberikan para responden sebagai objek penelitian ,yaitu jenis kelamin,umur responden, tingkat pendidikan responden berdasarkan masa kerja.

1. Jenis Kelamin Responden

Adapun jenis kelamin responden dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel V.1
Jenis Kelamin Responden

No	Jenis kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Laki-laki	12	66.7%
2	Perempuan	6	33.3%
Jumlah		18	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian ,2012

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah sampel untuk responden sebanyak 18 orang, yang terdiri dari 12 orang(66.7%), dan perempuan 6 orang (33.3%). Jadi jumlah keseluruhan responden dijadikan sampel kepala desa dan Perangkat desa di tiga desa tersebut adalah 18 orang.

2. Tingkat Umur Responden

Dari hasil penelitian terhadap Kepala Desa ,Sekretaris Desa, Perangkat Desa dapat diketahui jumlah responden berdasarkan usia atau umur , yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.2
Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Umur

No	Tingkat Umur	Frekuensi	Persentase %
1	17-25 Tahun	3	17%
2	26-34 Tahun	8	44%
3	35-42 Tahun	7	39%
Jumlah		18	100

Sumber : Data Olahan Penelitian ,2012

Dari tabel V.2 diatas terlihat bahwa jumlah responden berdasarkan usia atau umur yang paling banyak adalah responden yang berumur 26-34 tahun yakni 8 orang atau 44 % ,responden yang berumur 35-42 tahun yakni 7 orang atau 39% dan responden yang berumur 17-25 tahun yakni 3 orang atau 17%.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa tingkat umur responden sudah cukup dewasa dalam memberikan tanggapan-tanggapannya terhadap pertanyaan dalam kuesioner penelitian ini ,sebab asumsi penulis adalah kedewasaan umur dapat memberikan isyarat terhadap kemampuan dari seseorang dalam menilai dan memutuskan suatu permasalahan dengan jalan pikir yang lebih matang dan lebih bijak, karena umur berhubungan dengan seberapa banyak pengalaman yang mereka peroleh.

3. Tingkat pendidikan Responden

Pendidikan sangat diperlukan dalam pembangunan, karena dengan pendidikanlah sumber daya manusianya akan berkualitas. Untuk mengetahui gambaran dan tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.3
Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1	SMP	2	11
2	SMA	8	44%
3	Diploma	3	17%
4	Sarjana	5	28%
Jumlah		18	100

Sumber : Data Olahan Penelitian ,2012

Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan responden sebagai besar adalah tamatan SMA yang berjumlah 8 orang atau 44% kemudian tamatan sarjana berjumlah 5 orang atau 28% sedangkan yang tamatan SMP berjumlah 2 orang atau 11% dan SD tidak ada. Dengan semakin baiknya tingkat pendidikan responden ,diharapkan jawaban-jawaban yang mereka berikan akan lebih rasional dan objektif.

4. Masa Kerja Responden

Masa kerja seseorang sangat berpengaruh pada tingkat pemahaman terhadap pekerjaannya. Artinya semakin lama seseorang bekerja, maka semakin banyak pengetahuannya pada bidang pekerjaannya. Bila dilihat dari data yang diperoleh dari responden, masa kerja relative lama yaitu 3 tahun. Untuk dapat mengetahui dengan jelas penelitian terhadap analisis tugas camat dalam membina pemerintahan desa dapat diketahui responden berdasarkan masa kerjanya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel V.4 berikut ini:

Tabel V.4
Jumlah Responden Berdasarkan Masa Kerja

No	Masa kerja	Frekuensi	Persentase (%)
1.	1-2 tahun	3	16,6%
2.	3-4 tahun	5	27.7%
3.	5-6 tahun	6	33.3%
4.	Diatas 7 tahun	4	22.2%
Jumlah		18	100

Sumber : Data Olahan Penelitian , 2012

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa masa kerja responden yang terbanyak adalah yang masa kerjanya 7 tahun keatas berjumlah 4 orang atau 22,2% kemudian reponden yang masa kerjanya 5-6 tahun berjumlah 6 orang atau 33,3%, responden yang masa kerjanya 3-4 tahun berjumlah 5 orang atau 27,7% dan responden yang masa kerjanya 1-2 tahun berjumlah 3 orang atau 16,6%.

5.2 Analisis Tugas Camat Sebagai Kepala Pemerintahan Dalam Melaksanakan Pembinaan dan Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, bukan sebagai kepala wilayah. Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah (Nurcholis, 2005:133).

Camat sebagai pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintah desa perlu memberi perhatian pada perangkat desa karena dengan pembinaan kekurangan pengetahuan,kemampan dan keterampilan aparat desa dapat diperbaiki. Dalam PP No 19 tahun 2008 pasal 21 tentang kecamatan, pemerintah menugaskan camat

untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam menyelenggarakan pemerintah desa. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut adalah:

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib Administrasi Pemerintahan Desa atau kelurahan.
- b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitas dan konsultasi pelaksanaan Administrasi Desa atau kelurahan.
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa atau lurah.
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Desa atau kelurahan.s
- e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa atau kelurahan ditingkat kecamatan.
- f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa atau kelurahan ditingkat Kecamatan kepada Bupati atau Walikota.

Untuk menciptakan hal diatas maka diperlukan suatu konsep pembinaan dan pengawasan terhadap aparat pemerintah desa tersebut. Agar dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang diembankan kepadanya, oleh karena itu diperlukan kemampuan dari pada para pemimpin pemerintah untuk dapat melaksanakan suatu bentuk pembinaan kepada pemerintahan desa.

Adapun hasil penelitian penulis mengenai tugas camat sebagai kepala pemerintahan dalam melaksanakan pembinaan dan menyelenggarakan pemerintah

desa Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan indikator penelitian yaitu:

1. Melakukan Pembinaan Dan Pengawasan Tertib Administrasi Pemerintah Desa

Adanya pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa yang diberikan Camat kubu di kecamatan kubu kepada kepala desa atau perangkat desa yaitu :

a. Memberikan Pelatihan Tentang Tertib Administrasi Desa

Adapun tanggapan responden tentang tertib administrasi desa oleh Camat dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel V.5
Jawaban Responden Mengenai Pelatihan Tentang Tertib Administrasi Desa

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	4	22%
2	Cukup Baik	7	39%
3	Kurang Baik	7	39%
Jumlah		18	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian , 2012

Bila dilihat dari indikator mengenai pelatihan tentang administrasi desa yang diberikan Camat Kubu ternyata 4 orang atau 22% yang jawabannya dikategorikan baik dan 7 orang atau 39% yang dikategorikan cukup baik, kemudian yang menyatakan kurang baik 7 orang atau 39% . Hal ini dapat dinyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang disampaikan oleh Camat mengenai pelatihan tentang tertib administrasi desa dalam kategori cukup baik.

Sehubungan dengan kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Camat pada pemerintah Desa di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir serta pemahaman mereka tentang pelatihan tertib administrasi desa, dilihat dari penilaian yang diberikan oleh pemerintah desa sebagaimana data berikut ini:

Kegiatan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dalam kurun 3 tahun terakhir ini dilakukan camat melalui :

Penataran/pelatihan yang dilakukan pada Perangkat Desa Di Kantor Camat sebanyak 2 kali tahun 2009 dan 2010 dengan materi:

- a. Pegenalan tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab Perangkat Pemerintahan Desa.
- b. Pembinaan mentalitas aparat pemerintahan dalam bekerja.
- c. System inventaris asset desa.
- d. Orientasi dan penyegaran pegawai terhadap tugas bidang :
 - Adm. Kependudukan
 - Adm.Umum
 - Adm.Keuangan

(Sumber : Sekretaris Kecamatan Kubu)

Selain melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa, Camat juga memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan.

Adapun alasan responden tentang adanya pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa yang disampaikan oleh Camat ,hal ini tidak sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 29 Tahun 2009 yang seharusnya

pelatihan tersebut diadakan dalam jangka waktu 1 tahun sekali atau 1 tahun 2 kali memberikan pelatihan tentang pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa yang disampaikan oleh Camat tentang apa saja yang harus mereka kerjakan.

Kegiatan yang dilakukan Camat dalam tahunan atau pun bulanan tentang Pembinaan Pemerintah Desa juga belum maksimal ,pembinaan yang dilakukan Camat terhadap administasi pemerintahan desa antara lain adalah dengan memberikan petunjuk dan arahan mengenai pengolahan adminitasi pemerintah desa , meningkatkan pengetahuan, keahlian/keterampilan personil di pemerintah desa, serta mengawasi penyelenggaraan administasi pemerintahan desa di bidang administasi seperti pembinaan tentang administrasi desa yaitu bidang administasi umum, administrasi kependudukan dan administasi keuangan,

Dari hasil tanggapan responden maka hal ini dapat dinyatakan bahwa memahami tentang pelatihan tertib administrasi desa dapat dikategorikan cukup baik Hal ini dikarenakan pembinaan dan pengawasan yang disampaikan oleh Camat kepada perangkat desa sebagian mereka masih banyak yang belum memahami tentang pelatihan tertib administrasi yang dilakukan oleh pihak kecamatan. Dan pelatihan tentang tertib administrasi desa menurut penulis adalah bagaimana cara mengerjakan suatu pekerjaan itu sesuai dengan peraturan dan prosedur berlaku menurut Peraturan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir Nomor 29 Tahun 2009.

b. Memberikan Prosedur Kerja Tentang Administrasi Desa.

Adapun tanggapan responden mengenai prosedur kerja tentang adminitrasi desa pada perangkat desa dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.6

Jawaban Responden Mengenai Prosedur Kerja Tentang Administrasi Desa

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	5	28%
2	Cukup Baik	9	50.0%
3	Kurang Baik	4	22%
Jumlah		18	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2012

Bila dilihat dari indikator pembinaan dan pengawasan dari aspek adanya prosedur kerja tentang administrasi desa yang diberikan Camat Kubu ternyata 5 orang atau 28% yang jawabannya dikategorikan baik dan 9 orang atau 50.0% yang dikategorikan cukup baik, kemudian yang menyatakan kurang baik 4 orang atau 22%.

Hasil tanggapan responden diatas menunjukkan bahwa dari aspek adanya prosedur kerja pemerintah desa dikategorikan cukup baik. Dalam hal ini harus lebih diperhatikan dari kesalahan yang mereka lakukan dalam menangani prosedur kerja Administrasi Pemerintahan Desa disini yang seharusnya buku – buku anggaran desa ,buku kas umum,buku kas pembantu yang seharusnya dilaporkan periga bulannya juga belum dilaksanakan sebagaimana mestinya hasil dari hasil wawancara kepada salah satu Perangkat Desa pada tgl 9 februari 2012

“Jarangnya pembinaan dari kecamatan yang memantau kinerja dari perangkat desa sehingga tugas tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, tugas administrasi desa tidak berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diinginkan, karna mereka hanya mengerjakan tugas tersebut jika sudah ditegur oleh atasan jika tidak maka tugas tersebut akan dibiarkan menumpuk, seperti buku administrasi kependudukan, dan administrasi keuangan, adminisrasi umum.”

- c. Memberikan metode/cara kerja administrasi desa.

Adapun tanggapan responden mengenai Camat memberikan pembinaan dan pengawasan tentang metode/cara kerja administrasi desa:

Tabel V.7

Jawaban Responden Mengenai Camat Memberikan Pembinaan Dan Pengawasan Tentang Metode/Cara Kerja Administrasi Desa

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	3	17%
2	Cukup Baik	9	50%
3	Kurang Baik	6	33%
Jumlah		18	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2012

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa memberikan pembinaan dan pengawasan tentang metode/cara kerja administrasi,yang menyatakan baik 3 orang atau 17% dan 9 orang atau 50% yang dikategorikan cukup baik, kemudian yang menyatakan kurang baik 6 orang atau 33%.

Dari hasil tanggapan responden mengenai Camat memberikan pembinaan dan pengawasan tentang metode/cara kerja administrasi desa dikategorikan cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa dalam memberikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat desa yang disampaikan Camat sesuai dengan cara kerja administrasi desa. Namun, disamping itu Perangkat Desa dibagian tertentu harus bisa menyelesaikan tugas tersebut meskipun pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Camat belum secara optimal sesuai dengan yang dijadwalkan, yang seharusnya rata-rata sekali dalam 6 bulan, dan itu hanya dilakukan dalam 2 tahun sekali sehingga membutuhkan waktu yang lama. Hasil wawancara dengan salah

seorang perangkat desa yang penulis jadikan sampel yaitu desa rantau panjang kiri,

“Mengatakan bahwa 2 tahun belakangan ini camat tidak pernah memberikan pembinaan dan pengawasan kepada kami, jika ada suatu pekerjaan administrasi kependudukan ataupun data yang lain yang harus diserahkan kepada pihak kecamatan, maka pihak kecamatan hanya mengirimkan surat rekom yang mengharuskan kami melakukan suatu pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi desa”.

d. Memberikan Pengawasan Tentang Adm Desa Terhadap Perangkat Desa

Adapun tanggapan responden mengenai Camat memberikan pembinaan dan pengawasan tentang administrasi desa terhadap perangkat desa:

Tabel V.8

Jawaban Responden Mengenai Camat Memberikan Pembinaan dan Pengawasan Tentang Administrasi Desa Terhadap Perangkat Desa

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	7	39%
2	Cukup Baik	9	50%
3	Kurang Baik	2	11%
Jumlah		18	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2012

Bila dilihat dari indikator pembinaan dan pengawasan dari aspek adanya administrasi terhadap perangkat desa yang diberikan Camat Kubu ternyata 7 orang atau 39% yang jawabannya dikategorikan baik dan 9 orang atau 50.0% yang dikategorikan cukup baik, kemudian yang menyatakan kurang baik 2 orang atau 11%.

Hasil tanggapan responden diatas menunjukkan bahwa dari aspek adanya pembinaan dan pengawasan administrasi desa terhadap perangkat desa dikategorikan cukup baik. Demikian juga seharusnya buku-buku anggaran Desa, buku kas umum, buku kas pembantu yang seharusnya diisi dan dilaporkan pada Camat setiap pertiga bulanya juga belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Fenomena yang terlihat tidak tertatanya Administrasi Pemerintahan Desa hampir disemua desa yang ada di Kecamatan Kubu ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orang” Kepala Desa dan Perangkat Desa “diperoleh informasi

“Bahwa mereka tidak terlalu mengerti tata cara pengisian buku Administrasi Keuangan Desa tersebut. Tidak diisinya buku-buku desa dan tidak dilaporkannya kegiatan Administrasi Desa ke Kecamatan secara berkala mengindikasikan belum tertatanya Administrasi Desa dengan baik”.

Kegiatan yang dilakukan Camat dalam tahunan atau pun bulanan tentang Pembinaan Administrasi Desa juga belum ada, sedangkan untuk laporan rekapitalisasi desa yang ada dikecamatan kubu Kabupaten Rokan Hilir juga tidak terlaksana dengan baik. Dari hasil wawancara tersebut mereka hanya mengatakan kalau kegiatan yang dilakukan camat untuk membina pemerintahan desa Camat hanya memberikan tugas/undangan/rekomendasi lainnya, Kalaupun memang ada hanya berbentuk rapat.

2. Memberikan bimbingan ,supervise , fasilitas, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa atau kelurahan.

Bimbingan diberikan untuk membantu individu memahami dan menggunakan secara luas kesempatan pendidikan, jabatan, dan pribadi yang mereka miliki atau yang dapat mereka kembangkan dan sebagai satu bentuk bantuan yang sistematik dimana seorang atau kelompok dibantu untuk dapat memperoleh penyesuaian yang baik terhadap pekerjaan dan terhadap kehidupan.

Supervisi adalah salah satu bentuk pengawasan atasan yaitu camat selaku yang mengawasi dan perangkat desa selaku bawahan yang diawasi ,supervise ini penting dilakukan guna untuk tercapainya tujuan organisasi, apalagi perangkat desa adalah bawahan yang terkadang memiliki kekurangan dari segi pengalaman atau bahkan pengetahuan sehingga camat selaku menjalankan fungsi pengawasan dalam aspek supervise perlu memberikan pengarahan atau konsultasi mengenai administrasi pemerintah desa. Adapun sub indicator dari bimbingan,supervise , fasilitas dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa antara lain:

- a. Memberikan bimbingan agar bekerja dengan baik dan memberitahu akibat dari kesalahan dalam pekerjaan tersebut.

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai bimbingan agar bekerja dengan baik memberitahu akibat kesalahan dalam pekerjaan administrasi desa dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.9

Jawaban Responden Mengenai Camat Memberikan Bimbingan Agar Bekerja Dengan Baik Dan Memberitahu Akibat Kesalahan Dalam Pekerjaan Administrasi Desa

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	3	17%
2	Cukup Baik	8	44%
3	Kurang Baik	7	39%
Jumlah		18	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian ,2012

Bila dilihat dari indikator memberikan bimbingan, supervise, fasilitas , dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dari aspek adanya memberi yang diberikan Camat Kubu ternyata 3orang atau 17% yang jawabannya dikategorikan baik dan 8 orang atau 44% yang dikategorikan cukup baik, kemudian yang menyatakan kurang baik 7orang atau 39%.

Hasil tanggapan responden diatas menunjukkan bahwa yang menyatakan melakuka bimbingan agar bekerja denga baik dan memberitahu akibat kesalahan dalam pekerjaan administrasi desa cukup baik. Dengan alasan responden bahwa mereka yang menangkap isi dari bimbingan yang dilakukan camat, sebagian perangkat desa tidak menghadiri acara tersebut saat melakukan bimbingan, sehingga banyaknya perangkat desa tidak mengerti akan tugas dan fungsinya sebagai aparat pemerintah desa.

Namun ,disisi lain menurut pengamatan penulis dilapangan menunjukkan bahwa belum terlihatnya adanya pemerintah desa yang menjalankan tugas administrasi tersebut sesuai dengan bidang pekerjaannya.

“Hasil wawancara dengan salah satu perangkat desa pada tgl 9 februari 2012 pelaksanaan bimbingan, supervisi, dan konsultasi tersebut hanya didiskusikan kepada kepala desa bukan pada perangkat desa sehingga sebagian besar mereka mengatakan mereka tidak bisa memahami hasil dari bimbingan administrasi desa tersebut sehingga tugas administrasi desa tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak kecamatan”.

- b. Memberikan pengarahan langsung yang bersifat motivasi agar dapat bekerja dengan baik dan optimal.

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pengarahan langsung yang bersifat motivasi agar dapat bekerja dengan baik dan benar dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.10
Jawaban Responden Mengenai Pengarahan Langsung Yang Bersifat Motivasi Agar Dapat Bekerja Dengan Baik Dan Benar

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	4	22.2%
2	Cukup Baik	8	44.4%
3	Kurang Baik	6	33.3%
Jumlah		18	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2012

Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 18 orang responden yang pernah bimbingan oleh camat kepada pemerintah desa ternyata penilaian responden relatif bervariasi.

Bila dilihat dari indikator bimbingan dari aspek pengarahan langsung yang bersifat motivasi yang jawabannya baik, 4 orang atau 22.2% dan 8 orang atau 44.4% yang dikategorikan cukup baik, kemudian yang menyatakan kurang baik 6 orang atau 33.3%.

Hasil tanggapan responden diatas menunjukkan bahwa pengarahan langsung yang bersifat motivasi dalam kategori cukup baik. Dengan alasan responden bahwa kepala desa/perangkat desa diberikan bimbingan oleh camat dalam bentuk pengarahan,penataran. Dan dalam hal ini bahwa camat memberikan dukungan atau penilaian dari suatu pekerjaan yang dilakukan pemerintah desa langsung yang bersifat memotivasi agar perangkat desa bias mengerjakan tugas tersebut dengan baik dan benar. hasil wawancara penulis pada tanggal 9 februari 2012 Camat mengatakan,

“Bahwa dalam melakukan pembinaan,supervise, dalam hal ini camat berusaha memotivasi semangat kerja para perangkat desa terutama bagi perangkat desa yang bekerja dengan baik dapat di promosikan sesuai dengan jabatannya atau memberikan suatu nilai plus terhadap kepala desa/perangkat desa yang benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya sebaik-baiknya”

- c. Memberikan fasilitas yang memadai untuk pelaksanaan pemerintahan desa.

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai fasilitas yang memadai untuk pelaksanaan pemerintahan desa dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.11

Jawaban Responden Mengenai Fasilitas Yang Memadai Untuk Pelaksanaan Pemerintahan Desa

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	3	17%
2	Cukup Baik	11	61%
3	Kurang Baik	4	22%
Jumlah		18	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian,2012

Bila dilihat dari indikator bimbingan, supervise, dari aspek mengenai adanya fasilitas yang memadai untuk pelaksanaan pemerintah desa yang jawabannya baik 3 orang atau 17% dan 11 orang atau 61% yang dikategorikan cukup baik, kemudian yang menyatakan kurang baik 4 orang atau 22%.

Dari hasil tanggapan responden mengenai adanya fasilitas yang memadai untuk pelaksanaan pemerintah desa dalam kategori cukup baik. Hal ini sebagian besar mereka mengatakan bahwa fasilitas yang ada dipemerintahan desa masih dikatakan kurang, seperti tentang adanya computer hanya ada 3 komputer dan lainnya berupa mesin ketikan. Namun, jika untuk memberikan hasil yang optimal dalam pelaksanaan pemerintah desa maka diperlukan kemampuan yang memadai baik dari segi kemampuan aparat pelaksanaan itu sendiri maupun dari fasilitas pendukung, termasuk kondisi pekerjaan yang dilaksanakan, sehingga akan dapat diarahkan kepada adanya kesatuan tindakan.

d. Memberikan Peluang Untuk Berkonsultasi Tentang Pelaksanaan Adm.Desa

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai peluang untuk berkonsultasi tentang pelaksanaan administrasi desa dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel V.12

Jawaban Responden Mengenai Memberikan Peluang Untuk Berkonsultasi Tentang Pelaksanaan Administrasi Desa

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	5	28%
2	Cukup Baik	8	44%
3	Kurang Baik	5	28%
Jumlah		18	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian ,2012

Bila dilihat dari indikator bimbingan, supervisi, dari aspek mengenai peluang untuk berkonsultasi tentang pelaksanaan administrasi desa yang menyatakan baik 5 orang atau 28% dan 8 orang atau 44% yang dikategorikan cukup baik, kemudian yang menyatakan kurang baik 5 orang atau 28%.

Dari hasil tanggapan responden mengenai pemerintah Desa yang memberikan peluang untuk berkonsultasi tentang pelaksanaan administrasi desa dalam kategori cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa bisa bertanya dan bisa mengasi pendapat pada saat diskusi dilaksanakan, seperti administrasi kependudukan, administrasi keuangan desa, buku keputusan kepala desa, dan administrasi yang berkaitan dengan pemerintahan desa. Namun, disisi lain bahwa tidak semua perangkat desa yang mau bertanya pada saat diadakan diskusi dengan Camat, mereka hanya bertanya pada saat tugas tersebut akan dikerjakan, apabila mereka tidak bisa memahami tugas tersebut maka mereka bertanya pada kepala desa dan kaur-kaur yang memahami tentang tugas yang mereka lakukan.

3. Melakukan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Kepala Desa Atau Lurah

Pembinaan diberikan untuk membantu individu memahami dan menggunakan secara luas kesempatan pendidikan, jabatan, dan pribadi yang mereka miliki atau dapat mereka kembangkan dan sebagai satu bentuk untuk dapat memperoleh penyesuaian yang baik terhadap pekerjaan dan terhadap kehidupan.

Camat sebagai pemimpin kecamatan, dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dituntut melakukan pembinaan dan pengawasan ditujukan tentang bagaimana mengambil keputusan dengan baik dan benar kemudian memberikan pelatihan dan mengoreksi kesalahan dalam pelaksanaan tugas tersebut.

Sedangkan kepala desa adalah merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Adapun sub indikator dari pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa atau lurah antara lain yaitu:

- a. Memberikan pembinaan tentang cara pengambilan keputusan yang baik dan benar

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pembinaan tentang cara pengambilan keputusan yang baik dan benar dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.13
Jawaban Responden Mengenai Pembinaan Tentang Cara Pengambilan Keputusan Yang Baik Dan Benar

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	2	11%
2	Cukup Baik	9	50%
3	Kurang Baik	7	39%
Jumlah		18	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2012

Bila dilihat dari indikator pembinaan dan pengawasan dari aspek adanya pembinaan mengenai tentang cara pengambilan keputusan yang baik dan benar yang menyatakan baik 2 orang atau 11% yang jawabannya dikategorikan baik dan

9 orang atau 50 % yang dikategorikan cukup baik, kemudian yang menyatakan kurang baik 7 orang atau 39%.

Dari hasil tanggapan responden mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa tentang cara pengambilan keputusan yang baik dan benar dalam kategori cukup baik. Adapun alasan responden mengatakan cukup baik yaitu bahwa perangkat desa melakukan pembinaan tentang cara pengambilan keputusan yang baik dan benar tersebut hanya pada saat tertentu, seharusnya sebagai kepala pemerintah harus bisa mengambil suatu keputusan yang baik agar suatu pekerjaan yang ada dipemerintah desa bisa berjalan dengan benar sesuai dengan tujuan yang diinginkan, seperti yang terjadi bahwa pembinaan tersebut tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, yang seharusnya sebulan sekali tetapi pembinaan tersebut hanya dilakukan pada saat perangkat desa tidak bisa melakukan suatu pekerjaan yang berkaitan dengan administrasi pemerintah desa tersebut.

b. Memberikan Pelatihan Tentang Cara Pembuatan Perdes

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pelatihan tentang cara pembuatan perdes dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.14
Jawaban Responden Mengenai Tentang Cara Pembuatan Perdes

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	3	17%
2	Cukup Baik	10	56%
3	Kurang Baik	5	28%
Jumlah		18	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2012

Bila dilihat dari indikator pembinaan dan pengawasan dari aspek adanya pembinaan mengenai tentang cara pembuatan perdes yang menyatakan baik 3 orang atau 17% dan 10 orang atau 56 % yang dikategorikan cukup baik, kemudian yang menyatakan kurang baik 5 orang atau 28%.

Adapun alasan responden mengatakan cukup baik mengenai pelatihan tentang cara pembuatan perdes dalam hal ini dikategorikan cukup baik. Adapun alasan responden mengatakan cukup baik dalam hal ini pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dalam membuat peraturan desa seperti administrasi desa, kependudukan dimana kependudukan ini yaitu mendata penduduk , keuangan , dan tertib penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun dalam hal ini pemerintah desa harus bisa menyusun program pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh pihak kecamatan dan melakukan konsultasi dengan atasan koordinasi dengan sekretaris baik langsung maupun tidak langsung .

c. Mengkoreksi Kesalahan-Kesalahan Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Pekerjaan

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.15

Jawaban Responden Mengenai Tentang Mengkoreksi kesalahan-Kesalahan Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Pekerjaan

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	4	22%
2	Cukup Baik	7	39%
3	Kurang Baik	7	39%
Jumlah		18	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian ,2012

Bila dilihat dari indikator pembinaan dan pengawasan dari aspek adanya mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan yang menyatakan baik 4 orang atau 22% dan 7orang atau 39 % yang dikategorikan cukup baik, kemudian yang menyatakan kurang baik 7 orang atau 39%.

Adapun alasan responden mengatakan cukup baik mengenai mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam melakukan pekerjaan dalam hal ini dikategorikan cukup baik. Adapun alasan responden mengatakan cukup baik yaitu pembinaan tersebut yang dibina adalah kepala desa, jika terjadi suatu kesalahan maka sebelum dilaporkan kepihak kecamatan terlebih dahulu mengkoreksi dari suatu peraturan mengenai administrasi pemerintahan desa. Namun dalam hal ini menurut penulis dilapangan bahwa kepala desa harus bisa memberikan pengarahan kepada perangkat desa dan membagi tugas tersebut sesuai dengan bidang dan tugasnya agar tidak terjadi suatu kesalahan dalam pekerjaan.

- d. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan.

Untuk mengetahui tanggapan responden memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.16
Jawaban Responden Mengenai Tentang Memperbaiki kesalahan-Kesalahan Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Pekerjaan

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	3	16.7%
2	Cukup Baik	12	66.7%
3	Kurang Baik	3	16.7%
Jumlah		18	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2012

Bila dilihat dari indikator pembinaan dan pengawasan dari aspek adanya tentang memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan yang menyatakan baik 3 orang atau 16.7% dan 12 orang atau 66.7 % yang dikategorikan cukup baik, kemudian yang menyatakan kurang baik 3 orang atau 16.7%.

Adapun alasan responden mengatakan cukup baik mengenai memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam pekerjaan dalam hal ini dikategorikan cukup baik. Adapun alasan responden mengatakan cukup baik dengan adanya memperbaiki kesalahan yang terjadi dalam melakukan pekerjaan, hal ini kepala desa yang dibina oleh pihak kecamatan, pembinaan tersebut dilakukan pihak kecamatan terkadang hanya berbentuk rapat atau surat rekom/arahan dari camat mengenai tugas yang harus dikerjakan. Namun jika terjadi suatu kesalahan maka kepala desa harus bisa mengatasi dengan benar agar suatu pekerjaan tersebut bisa sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

4. Melakukan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Perangkat Desa atau Kelurahan

Pembinaan diberikan untuk membantu individu memahami dan menggunakan secara luas kesempatan pendidikan, jabatan, dan pribadi yang mereka miliki atau dapat mereka kembangkan dan sebagai satu bentuk untuk dapat memperoleh penyesuaian yang baik terhadap pekerjaan dan terhadap kehidupan.

Camat sebagai pemimpin kecamatan, dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dituntut melakukan pembinaan dan pengawasan ditujukan tentang bagaimana mengambil keputusan dengan baik dan benar kemudian memberikan pembinaan, pengawasan, mengenai administrasi desa, tentang tugas dan tanggung jawab. Sedangkan perangkat desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya. Salah satu perangkat desa adalah Sekretaris Desa, yang diisi dari Pegawai Negeri Sipil. Adapun sub indikator dari pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa atau lurah antara lain yaitu:

a. Memberikan Pembinaan Tentang Pengetahuan Mengenai Administrasi

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pembinaan tentang pengetahuan mengenai administrasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.17
Jawaban Responden Mengenai Memberikan Pembinaan Tentang
Pengetahuan Mengenai Administrasi Desa

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	8	44%
2	Cukup Baik	3	17%
3	Kurang Baik	7	39%
Jumlah		18	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian , 2012

Bila dilihat dari indikator pembinaan dan pengawasan dari aspek adanya memeberikan pembinaan tentang pengetahuan administrasi desa yang menyatakan baik 8 orang atau 44% dan 3 orang atau 17 % yang dikategorikan cukup baik, kemudian yang menyatakan kurang baik 7 orang atau 39%.

Adapun alasan responden mengatakan bahwa memberikan pembinaan tentang pengetahuan mengenai administrasi desa dikategorikan baik. Dengan adanya pembinaan yang diberikan camat kepada perangkat desa maka perangkat desa bisa memahami isi dari pembinaan tentang pengetahuan camat tersebut guna untuk mempermudah mengerjakan tugas-tugas perangkat desa yang diberikan oleh camat sesuai dengan permasalahan yang diberi pembinaan kepada seluruh perangkat desa, menurut responden pembinaan tersebut tidak sesuai dengan yang dijadwalkan. Namun, dengan adanya pembinaan tentang pengetahuan mengenai administrasi ada juga sebagian perangkat desa yang bertanya dalam pembinaan tersebut tentang bagaimana cara mengisi buku pemerintahan desa dan apa saja yang harus dipahami dalam menjalankan tugas sebagai kepala desa (perangkat desa).

b. Perangkat Desa Diberi Pelatihan Tentang Tugas Dan Kewajibannya

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai perangkat desa diberi pelatihan tentang tugas dan kewajibannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.18
Jawaban Responden Mengenai Perangkat Desa Diberi Pelatihan Tentang Tugas Dan Kewajibannya

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	2	11%
2	Cukup Baik	7	39%
3	Kurang Baik	9	50%
Jumlah		18	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian ,2012

Bila dilihat dari indikator Pelatihan dari aspek adanya pelatihan tentang tugas dan kewajibannya ternyata 2 orang atau 11% yang jawabannya dikategorikan baik dan 7 orang atau 39% yang dikategorikan cukup baik, kemudian yang menyatakan kurang baik 9 orang atau 50%. Dalam hal ini pelatihan tentang tugas dan kewajibannya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dikategorikan kurang baik.

Dalam hal ini responden beralasan bahwa pelatihan tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, karna pelatihan tersebut dilaksanakan apabila perangkat desa sudah tidak bisa lagi mengerjakan tugas tersebut dan hanya pada moment-moment tertentu sehingga tugas perangkat desa tidak bekerja maksimal sesuai dengan yang diinginkan.

Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan yang diberikan camat kepada perangkat desa tidak sesuai yang dijadwalkan , namun menurut penulis agar

pemerintah desa dapat sesuai dengan rencana kerja dan menghasilkan kerja yang baik, maka camat perlu memberikan pelatihan tentang tugas dan kewajiban perangkatnya dengan memberikan pelatihan sesuai dengan yang dijadwalkan , dengan demikian keahlian atau skill dari pemerintah desa tersebut dapat ditingkatkan.

c. Perangkat Desa Diberi Pengarahan Untuk Meningkatkan Pengetahuan,Keterampilan Dan Keahlian

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai perangkat desa diberi pengarahan untuk meningkatkan pengetahuan,keterampilan dan keahlian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.19

Jawaban Responden Mengenai Perangkat Desa Diberi Pengarahan Untuk Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Dan Keahlian

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	4	22%
2	Cukup Baik	9	50%
3	Kurang Baik	5	28%
Jumlah		18	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian ,2012

Bila dilihat dari indikator pembinaan dan pengawasan dari aspek adanya pengarahan untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan dan keahlian ternyata 4 orang atau 22% yang jawabannya dikategorikan baik dan 9 orang atau 50% yang dikategorikan cukup baik, kemudian yang menyatakan kurang baik 5 orang atau 28%. Dalam hal pembinaan tersebut dikategorikan cukup baik.

Adapun alasan responden mengatakan cukup baik mengenai perangkat desa diberi pembinaan meningkatkan pengetahuan tersebut benar dilaksanakan oleh Camat sehingga dapat membantu pekerjaan perangkat desa dalam menyelesaikan kerja yang diberikan oleh camat. Dengan adanya pembinaan tersebut dapat membantu perangkat desa mengetahui bagaimana tehnik dalam mengerjakan pembukuan administrasi dan perangkat desa juga mendapatkan pembekalan dari hasil diskusi tersebut khususnya dibidang administrasi pemerintahan desa. berikut hasil wawancara penulis pada salah seorang kepala desa pada tgl 9 februari 2012, sebagai berikut:

“Secara umum maka dapat dikatakan bahwa telah adanya pembinaan yang dilakukan camat sesuai dengan bidang kerja masing-masing untuk menambah pengetahuan dengan melakukan pelatihan kepada perangkat desa yang mempunyai pendidikan rendah. Agar pemerintah desa dapat mengerjakan tugas tersebut sesuai dengan yang diinginkan camat maka camat perlu meningkatkan pengetahuan perangkatnya dengan memberikan pelatihan dan keahlian dibidang masing-masing kerja administrasi tersebut sesuai dengan skill yang dimilkinya”.

- d. Memberikan pengawasan kepada perangkat desa mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab administarsi desa

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang memberikan pengawasan kepada perangkat desa mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab administrasi desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.20

**Jawaban Responden Mengenai Pengawasan Kepada Perangkat Desa
Mengenai Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Administrasi Desa**

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	6	16.7%
2	Cukup Baik	7	66.7%
3	Kurang Baik	5	16.7%
Jumlah		18	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2012

Bila dilihat dari indikator pembinaan dan pengawasan dari aspek adanya pengawasan kepada perangkat desa mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab administrasi desa ternyata 6 orang atau 16.7% yang jawabannya dikategorikan baik dan 7 orang atau 66.7% yang dikategorikan cukup baik, kemudian yang menyatakan kurang baik 5 orang atau 16.7%. Dalam hal pembinaan tersebut dikategorikan cukup baik.

Adapun alasan responden mengatakan cukup baik mengenai pengawasan kepada perangkat desa mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab administrasi desa dalam menangani administrasi yang ada di pemerintah desa perangkat desa harus bisa melaksanakan tugas tersebut dengan benar agar administrasi tersebut bisa terarah dan sesuai dengan yang diinginkan. Namun, perangkat desa juga harus bisa menyelesaikan tugas tersebut dengan adanya pengawasan dari pihak kecamatan mengenai administrasi kependudukan, administrasi umum, administrasi keuangan. Hasil wawancara dengan perangkat desa pada tanggal 9 februari 2012.

“Camat mempunyai peranan yang sangat penting, karena dalam hirarki pemerintahan kecamatan merupakan salah satu lembaga supra desa, yang mana salah satu tugasnya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan

terhadap pemerintahan desa/kelurahan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan”.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, selain menjalankan perannya sebagai pembina dan pengawas pemerintahan desa, Camat juga melaksanakan berbagai urusan administrasi yang ada di pemerintahan desa.

5. Melaporkan Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa Atau Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Kepada Bupati Walikota

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa dan laporan pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan pemerintah desa mengenai administrasi ,kemudian mengenai pembinaan pegawai agar tugas tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan target yang diinginkan. Adapun sub indicator dari pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa atau lurah antara lain yaitu:

a. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.21
Jawaban Responden Mengenai Tentang Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Desa

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	6	33%
2	Cukup Baik	8	44%
3	Kurang Baik	4	22%
Jumlah		18	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2012

Bila dilihat dari indikator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dari aspek adanya evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang menyatakan baik 6 orang atau 33% dan 8 orang atau 44 % yang dikategorikan cukup baik, kemudian yang menyatakan kurang baik 4 orang atau 22%.

Adapun alasan responden mengatakan cukup baik mengenai evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa dalam hal ini dikategorikan cukup baik. Adapun alasan responden mengatakan cukup baik dengan adanya pengawasan dan penyelenggaraan pemerintah desa setelah Jalannya suatu proses pemerintahan sangat membutuhkan adanya monitoring dan evaluasi. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban, dengan adanya evaluasi dapat dijadikan tolak ukur guna memperbaiki kinerja di masa mendatang. Dilaterbelakangi tujuan tersebut, Pemerintah Kecamatan kubu Kabupaten Rokan Hilir berinisiatif menggelar kegiatan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelatihan peningkatan SDM bagi aparat pemerintah yang berada di desa.

Camat juga berkewajiban melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan pada tingkat kecamatan, agar dapat

mengetahui sampai sejauh mana tugas-tugas pemerintahan dalam urusan administrasi , pelayanan dan pembangunan terhadap masyarakat yang telah dilaksanakan.

b. Laporan secara tertulis

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang laporan secara tertulis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.22
Jawaban Responden Mengenai Tentang Laporan Secara Tertulis

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	3	17%
2	Cukup Baik	8	39%
3	Kurang Baik	7	44%
Jumlah		18	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian ,2012

Bila dilihat dari indikator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dari aspek adanya laporan secara tertulis yang menyatakan baik 3 orang atau 17% dan 8 orang atau 39 % yang dikategorikan cukup baik, kemudian yang menyatakan kurang baik 7 orang atau 44%.

Adapun alasan responden mengatakan cukup baik mengenai laporan secara tertulis mengenai pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa dalam hal ini dikategorikan cukup baik. Adapun alasan responden mengatakan cukup baik yaitu dengan adanya pembinaan dan pengawasan tentang pemerintah desa ditingkat kecamatan dalam hal ini laporan tertulis mengenai tentang administrasi kependudukan seperti buku penduduk,buku kartu keluarga,administrasi umum seperti buku keputusan desa,buku ekspedisi, buku tentang tanah desa, dan administrasi keuangan,setelah data tersebut terlaksana dengan baik maka

pemerintah desa harus melaporkan setiap pertiga bulannya kepada pihak kecamatan.

c. Laporan Secara Lisan

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang laporan secara lisan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.23
Jawaban Responden Mengenai Tentang Laporan Secara Lisan

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	3	17%
2	Cukup Baik	11	61%
3	Kurang Baik	4	22%
Jumlah		18	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2012

Bila dilihat dari indikator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dari aspek adanya laporan secara tertulis yang menyatakan baik 3 orang atau 17% dan 11 orang atau 61 % yang dikategorikan cukup baik, kemudian yang menyatakan kurang baik 4 orang atau 22%.

Adapun alasan responden mengatakan cukup baik mengenai laporan secara lisan mengenai pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa dalam hal ini dikategorikan cukup baik. Adapun alasan responden mengatakan cukup baik dengan adanya laporan secara tulisan mengenai administrasi pemerintahan desa tersebut maka pihak kecamatan harus lebih memperhatikan jika masih ada terlihat adanya indikasi ataupun masalah dalam laporan tulisan tersebut maka bisa diperjelas dengan lisan, agar laporan tersebut tugas kepada atasan tersebut bisa sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

d. Kecepatan dan Target Pelaksanaan Tugas

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang kecepatan dan target pelaksanaan tugas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.24
Jawaban Responden Mengenai Tentang Kecepatan Dan Target Pelaksanaan Tugas

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	6	33%
2	Cukup Baik	9	50%
3	Kurang Baik	3	17%
Jumlah		18	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian ,2012

Bila dilihat dari indikator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dari aspek adanya kecepatan dan target pelaksanaan tugas yang menyatakan baik 6 orang atau 33% dan 9 orang atau 50 % yang dikategorikan cukup baik, kemudian yang menyatakan kurang baik 3 orang atau 17%.

Dalam penyelenggaraan pembangunan pemerintah desa dalam mencapai target kurang baik dalam mencapai tugas tersebut. Namun, disisi lain menurut pengamatan penulis dilapangan menunjukkan bahwa target pelaksanaan pembangunan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak kecamatan dan masyarakat desa. menginventarisir permasalahan, hasil pembangunan, peningkatan partisipasi masyarakat, swadaya dan gotong royong masyarakat dengan menginventarisir data dari desa/kelurahan agar di ketahui tingkat perkembangan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan.

e. Rekapitulasi Jawaban Responden Dalam Setiap Indikator Variabel

Adapun hasil rekapitulasi dari jawaban responden pada Pemerintah Desa Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, dapat dilihat dalam tabel rekapitulasi berikut ini:

1. Mengenai Adanya Pembinaan Dan Pengawasan Tertib Administrasi Desa

Tabel V.25

Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Adanya Pembinaan Dan Pengawasan Tertib Administrasi Desa kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir

No	Indikator	Jawaban 18 Responden		
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik
1	Memberikan pelatihan tentang tertib administrasi desa	4	7	7
2	Memberikan prosedur kerja tentang administrasi desa	5	9	4
3	Memberikan metode/cara kerja administrasi desa	3	9	6
4	Memberikan pengawasan tentang administrasi desa terhadap perangkat desa	7	9	2
Skor		19(3)	34(2)	19(1)
Jumlah		57	68	19
Jumlah Skor		144		
Interval skor		120-167(Cukup Baik)		

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2012

Dari tabel diatas,dapat diketahui bahwa 4 sub indikator yang diteliti dari pembinaan dan pengawasan tertib administasi desa tanggapan responden yang

menyatakan Baik berjumlah 57 ,kemudian yang menyatakan Cukup berjumlah adalah 68, dan yang menyatakan Kurang Baik berjumlah 19 .

Kemudian berdasarkan penjumlahan dari 4 sub indikator yang diteliti, maka dapat diketahui bahwa indikator pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dalam menyelenggarakan tugas camat sebagai kepala pemerintah dalam melaksanakan pembinaan pemerintahan desa kecamatan kubu mendapat jumlah skor 144 dan dinyatakan dalam kategori “Cukup Baik”.

2. Memberikan Bimbingan Supervisi, Fasilitas Dan Konsultasi Pelaksanaan Administrasi Desa

Tabel V.26

Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Adanya Bimbingan Supervisi, Fasilitas Dan Konsultasi Pelaksanaan Administrasi Desa kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir

No	Indikator	Jawaban 18 Responden		
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik
1	Memberikan bimbingan agar bekerja dengan baik dan memberitahu akibat dari kesalahan dalam pekerjaan tersebut	3	8	7
2	Memberikan pengarahan langsung yang bersifat motivasi agar dapat bekerja dengan baik dan optimal	4	8	6
3	Memberikan fasilitas yang memadai untuk pelaksanaan pemerintah desa	3	11	4
4	Memberikan peluang untuk berkonsultasi tentang pelaksanaan administrasi desa	5	8	5
Skor		15(3)	35(2)	22(1)
Jumlah		45	70	22
Jumlah Skor		137		
Interval Skor		120-167 (Cukup Baik)		

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2012

Dari tabel diatas,dapat diketahui bahwa 4 sub indikator yang diteliti dari indikator bimbingan ,supervisi, fasilitas dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa, tanggapan responden yang menyatakan Baik berjumlah 45 ,kemudian yang menyatakan Cukup Baik berjumlah 70, dan yang menyatakan Kurang Baik berjumlah 22 .

Kemudian berdasarkan penjumlahan dari 4 sub indikator yang diteliti, maka dapat diketahui bahwa indikator memberikan bimbingan ,supervisi, fasilitas dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa menyelenggarakan tugas camat sebagai kepala pemerintah dalam melaksanakan pembinaan pemerintahan desa kecamatan kubu mendapat jumlah skor 137 dinyatakan dalam kategori “Cukup Baik”,

3. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Kepala Desa Atau Kelurahan

Tabel V.27

Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Adanya Melakukan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Kepala Desa Atau Kelurahan Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir

No	Indikator	Jawaban 18 Responden		
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik
1	Memberikan pembinaan tentang cara pengambilan keputusan yang baik dan benar.	2	9	7
2	Memberikan pelatihan tentang cara pembuatan perdes.	3	10	5
3	Mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan .	4	7	7
4	Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan.	3	12	3
Skor		12(3)	38(2)	22(1)
Jumlah		36	76	22
Jumlah Skor		134		
Interval Skor		120-167 (Cukup Baik)		

Sumber: Data Olahan Penelitian. 2012

Dari tabel diatas,dapat diketahui bahwa 4 sub indikator yang diteliti dari indikator melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepal desa , tanggapan responden yang menyatakan Baik berjumlah 36 ,kemudian yang menyatakan Cukup Baik berjumlah 76, dan yang menyatakan kurang baik berjumlah 22 .

Kemudian berdasarkan penjumlahan dari 4 sub indikator yang diteliti, maka dapat diketahui bahwa indikator melakukan pembinaan pengawasan terhadap

kepala desa dalam menyelenggarakan tugas camat sebagai kepala pemerintah dalam melaksanakan pembinaan pemerintahan desa kecamatan kubu mendapat jumlah skor 134 dan dinyatakan dalam kategori “Cukup Baik”,

4. Melakukan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Perangkat Desa Atau Kelurahan

Tabel V.28

Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Adanya Melakukan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Perangkat Desa Atau Kelurahan Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir

No	Indikator	Jawaban 18 Responden		
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik
1	Memberikan pembinaan tentang pengetahuan mengenai administrasi desa	8	3	7
2	Perangkat desa diberi pelatihan tentang tugas dan kewajibannya.	2	7	9
3	perangkat desa diberikan pengarahan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan keahlian.	4	9	5
4	Memberikan pengawasan kepada perangkat desa mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab administrasi desa	6	7	5
Skor		20(3)	26(2)	26(1)
Jumlah		60	52	26
Jumlah Skor		138		
Interval Skor		120-167 (Cukup Baik)		

Sumber: Data Olahan Penelitian. 2012

Dari tabel diatas,dapat diketahui bahwa 4 sub indikator yang diteliti dari indikator pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa tanggapan

responden yang menyatakan Baik berjumlah 60 ,kemudian yang menyatakan Cukup Baik berjumlah 52, dan yang menyatakan kurang baik berjumlah 26 .

Kemudian berdasarkan penjumlahan dari 4 sub indikator yang diteliti, maka dapat diketahui bahwa indikator melakukan pembinaan pengawasan terhadap perangkat desa dalam menyelenggarakan tugas camat sebagai kepala pemerintah dalam melaksanakan pembinaan pemerintahan desa kecamatan kubu mendapat jumlah skor 138 dan dinyatakan dalam kategori “Cukup Baik”,

5. Melaporkan Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Atau Kelurahan Ditingkat Kecamatan Kepada Bupati/Walikota

Tabel V.29

Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Adanya Melaporkan Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Atau Kelurahan Di Tingkat Kecamatan kepada Bupati/ walikota Kabupaten Rokan Hilir

No	Indikator	Jawaban 18 Responden		
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik
1	Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa	6	8	4
2	Laporan secara tertulis	3	8	7
3	Laporan secara lisan	3	11	4
4	Kecepatan dan target pelaksanaan tugas	6	9	3
Skor		18(3)	36(2)	18(1)
Jumlah		54	72	18
Jumlah Skor		144		
Interval Skor		120-167 (Cukup Baik)		

Sumber: Data Olahan Penelitian. 2012

Dari tabel diatas,dapat diketahui bahwa 4 sub indikator yang diteliti dari indikator melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawsan penyelenggaraan pemerintah desa, tanggapan responden yang menyatakan Baik berjumlah 54,kemudian yang menyatakan Cukup Baik berjumlah 72, dan yang menyatakan kurang baik berjumlah 18.

Kemudian bedasarkan penjumlahan dari 4 sub indikator yang diteliti, maka dapat diketahui bahwa indikator melakukan pembinaan pengawasan terhadap perangkat desa dalam menyelenggarakan tugas camat sebagai kepala pemerintah dalam melaksanakan pembinaan pemerintahan desa kecamatan kubu mendapat jumlah skor 144 dan dinyatakan dalam kategori “Cukup Baik”,

Kemudian untuk mengetahui secara keseluruhan hasil dari analisis tugas camat sebagai kepala pemerintah dalam melaksanakan pembinaan dan menyelenggaraan pemerintah desa Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel V.19
Rekapitulasi Seluruh Indikator Variabel Penelitian
Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir

No	Sub Variabel	Jawaban Responden		
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik
1	Pembinaan dan Pengawasan tertib administrasi desa	57	68	19
2	Memberikan bimbingan , supervisi,fasilitas dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa	45	70	22
3	Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa atau kelurahan	36	76	22
4	Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa atau kelurahan.	60	52	26
5	Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawsan penyelenggaraan pemerintah desa atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota	54	72	18
Skor		252	338	107
Jumlah skor : Jumlah Sub Variabel		697 : 5		
Jumlah Skor Rata-rata		139.4		
Kategori		150-209(Cukup Baik)		

Sumber: Data Olahan Penelitian. 2012

Dari tabel diatas,dapat diketahui bahwa dari 5 indikator yang diteliti , tanggapan responden yang menyatakan Baik jumlah skornya adalah 252 ,kemudian yang menyatakan Cukup Baik jumlah skornya adalah 338 dan yang menyatakan Kurang Baik jumlah skornya adalah 107 .

Dengan demikian secara umum dapat diketahui bahwa analisis tugas camat sebagai kepala pemerintah dalam melaksanakan pembinaan dan menyelenggaraan

pemerintah desa kecamatan kubu mendapat skor rata-rata 139.4 dan dinyatakan dalam kategori “Cukup Baik”.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian penulis dengan judul Analisis Tugas Camat sebagai kepala pemerintah dalam melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintah desa Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, penulis mengambil kesimpulan bahwa tugas camat adalah sebagai kewajiban untuk dilaksanakan, dimana keberhasilan tugas seorang kepala pemerintah adalah sejauh mana dia berhasil mencapai tujuan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka melaksanakan kewajiban untuk membina pemerintah desa .

Adapun analisis tugas camat sebagai kepala pemerintahan dalam melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat berdasarkan Melalui PP No. 19 Tahun 2008 pasal 21 tentang Kecamatan, Pemerintah menugaskan Camat sebagai Kepala Pemerintahan untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Dengan demikian secara umum dapat diketahui bahwa analisis tugas camat sebagai kepala pemerintah dalam melaksanakan pembinaan dan menyelenggarakan pemerintahan desa kecamatan kubu mendapat skor rata-rata 139,4 dan dinyatakan dalam kategori “ Cukup Baik”.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang telah dikemukakan di atas , maka kiranya penulis dapat memberikan saran sebagai pertimbangan dan mungkin dapat berguna bagi pihak kecamatan maupun pemerintah desa yang ada dikecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

Hendaknya dalam melakukan bimbingan ,supervisi , fasilitas dan konsultasi pihak Kecamatan harus bisa memberikan bimbingan kepada pemerintah desa dengan cara memberikan pengarahan langsung yang bersifat memotivasi agar pemerintah desa tersebut bisa melakukan tugasnya dengan optimal. Pihak kecamatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa berupa pembinaan tentang cara pembuatan peraturan desa dengan baik, mengkoordinasi tugas desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Secara umum,melakukan pembinaan tentang pemerintah desa tentang bagaimana cara melakukan administrasi tentang desa yang berupa administasi umum, administrasi kependudukan dan keuangan, bisa terlaksana sesuai yang diinginkan oleh pihak kecamatan , dengan cara memberikan pengetahuan terhadap perangkatnya, dan dengan cara melaporkan administrasi tersebut sesuai dengan peraturan dari pihak kecamatan, dan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan tersebut agar bisa berjalan dengan baik tentang pelaksanaan pemerintahan desa agar bisa melayani dan mengkoordinasi tugas desa tersebut maka pihak kecamatan harus melakukan pembinaan terhadap pemerintah desa agar efektif dan sesuai dengan tujuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Berry , David. 2003, *Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta , Raja Grafindo Persada.
- Dedi, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Jakarta, 2002.
- Ismail, Maimunah.1989, *Pengembangan,Implikasi ke atas Pembangunan Masyarakat*. Dewan Bahasa Pustaka, Kementrian Pendidikan Malays. Kuala Lumpur.
- Kansil, C.S.T. 2001 , *Pemerintah daerah di indonesia* , Jakarta. Sinar Grafika .
- Nawawi , Hadari. 1995, *Pengawasan Melekat Dilingkungan Aparat pemerintah*. Jakarta, Erlangga.
- Ndraha, Taliziduhu. 1991, *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta ,Rineka Cipta .
- Nurcholis , Hanif. 2005, *Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta . Bumi Aksara.
- Nurcholis ,Hanif. 2011, *Pertumbuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga. PT. Gelora Aksara Pratama.s
- Syafii, Inu Kencana. 2003. *Birokrasi Pemerintahan Indonesia* , Bandung. Mandar Maju.
- Supriady , Deddy Dkk. 2001, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama .
- Sedarmayanti. 2004, *Good Governance (Pemerintahan yang Baik)*, Bandung, Mandar Maju.
- S.P. Siagian, 2003, *Administrasi Pembangaunan*, Jakarta. Gramedia .
- Suradinata, Erma. *Otonomi Daerah dan Paradikma Baru Kepemimpinan Pemerintah Dalam Politik dan Bisnis*, Jakarta, Suara Babas 2006.
- Soekanto, Soeryono. 2001, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Wijaya ,A W. 2000, *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Wijaya, Haw, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*, Palembang, PT. Rasa Grafindo Persada, 2005.

_____, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta, PT. Rasa Grafindo Persada, 2005

_____, *Pemerintah Desa / Marga Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah Suatu Telaah Administrasi Negara*, Jakarta, PT. Rasa Grafindo Persada, 2000

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.72 tahun 2005 Tentang Desa pasal 1 ayat 15 , pasal 98 ayat 2

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan Pasal 21